LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Polewali Mandar

Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun Anggaran 2025

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah di sajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang di sajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Polewali, 30 Maret 2025

INSPEKTUR KABUPATEN.

H. AHMAD SAIFUDDIN, SH.,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP 19651231 200003 1 084

Daftar iSi

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR vi
KATA PENGANTAR vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 2
1.1.1. Penjelasan Umum 2
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah 22
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal 61

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 71

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO 72
2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia 72
2.1.2. Angka Kemiskinan 73
2.1.3. Angka Pengangguran 73
2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi 74
2.1.5. Pendapatan Per Kapita 75
2.1.6. Ketimpangan Pendapatan 75
2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 76
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil 76
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 76
2.2.3. Indikator Kinerja Komponen Otonomi Daerah 76
2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH 77
2.3.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja 77
2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja 79
2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya 82
2.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah 90
2.3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai 117

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 146

3.1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 147
3.2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DI KABUPATEN 148
3.3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 149

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 156

4.1. URUSAN PENDIDIKAN 157
4.2. URUSAN KESEHATAN 162
4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM 167
4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT 169
4.5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 172
4.6. URUSAN SOSIAL 178

BAB V PENUTUP 182

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Indikator Kinerja Kunci Hasil / *Outcome*
- Lampiran 2 : Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
- Lampiran 3 : Indikator Komponen Otonomi Daerah

Daftar Tabel

Tabel 1.1. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar 5
Tabel 1.2. Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 6
Tabel 1.3. Letak Geografi dan Ketinggian dari Permukaan Laut Menurut Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar 6
Tabel 1.4. Luas Penyebaran Kelas Topografi dan Kelas Lereng Kabupaten Polewali Mandar 7
Tabel 1.5. Jumlah Penduduk per-Kecamatan Kab. Polewali Mandar Tahun 2024 7
Tabel 1.6. Kepadatan Penduduk Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 8
Tabel 1.7. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 9
Tabel 1.8. Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Tahun 2024 9
Tabel 1.9. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Polewali Mandar per Tahun 2023-2024 10
Tabel 1.10. Kecamatan, Kelurahan Dan Desa Di Kabupaten Polewali Mandar 11
Tabel 1.9. Jumlah Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 dan 2024 11
Tabel 1.10. Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2023 13
Tabel 1.11. Jumlah ASN Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 dan 2024 13
Tabel 1.12. Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 dan 2024 14
Tabel 1.13. Jumlah ASN Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 dan 2024 15
Tabel 1.14. Jumlah ASN Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 dan 2024 15
Tabel 1.15. Jumlah Kebutuhan ASN Kabupaten Polewali Mandar 16
Tabel 1.16. Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 17
Tabel 1.17. Laporan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 19
Tabel 1.18. Laporan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 22
Tabel 1.19. Keterkaitan Misi dengan Pokok Visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 32
Tabel 1.20. Rumusan Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 34
Tabel 1.21. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja 2019-2024 36
Tabel 1.22. Arah Kebijakan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024 36
Tabel 1.23. Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 48
Tabel 1.24. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 . 50
Tabel 1.25. Indikasi Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah dan Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 – 2024 65
Tabel 1.26. Alokasi Anggaran SPM Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 69
Tabel 2.1. Capaian Kinerja Makro Kabupaten Polewali Mandar 2023-2024 72
Tabel 2.2. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021-2024 72
Tabel 2.3. Data Angka Kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021-2024 73
Tabel 2.4. Data Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021-2024. 73
Tabel 2.5. Data Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021-2024 74
Tabel 2.6. Statistik Kunci Bidang Ekonomi Kabupaten Polewali Mandar 2022-2024 75
Tabel 2.7. Gini Rasio Kabupaten Polewali Mandar 2020-2024 75
Tabel 2.8. Target Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 77
Tabel 2.9. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 81
Tabel 2.10. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya 85
Tabel 2.11. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan

Jangka Menengah 87
Tabel 2.12. Kategori Desa Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal dan Sangat Tertinggal Kab. Polewali Mandar Tahun 2020-2024 93
Tabel 2.13. Persentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Tahun 2024 101
Tabel 2.14. Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 103
Tabel 2.15. Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 105
Tabel 2.16. Opini Laporan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar 10 Tahun Terakhir 105
Tabel 2.17. Penetapan hasil evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 106
Tabel 2.18. Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat 117
Tabel 2.19. Program Kegiatan Sasaran Strategis Berkurangnya Pengangguran 118
Tabel 2.20. Program Kegiatan Sasaran strategis Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal 119
Tabel 2.21. Program Kegiatan Sasaran Strategis Meningkatnya Ketahanan Pangan 120
Tabel 2.22. Program Kegiatan Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pendidikan 121
Tabel 2.23. Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan 124
Tabel 2.24. Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak 130
Tabel 2.25. Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan 131
Tabel 2.26. Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah 132
Tabel 2.27. Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Investasi Daerah 134
Tabel 2.28. Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Pemerataan Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan 135
Tabel 2.29. Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi 137
Tabel 2.30. Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan 138
Tabel 2.31. Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Infrastruktur Jaringan Irigasi 139
Tabel 2.32. Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pemukiman 139
Tabel 2.33. Program Kegiatan Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 142
Tabel 2.34. Program Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan 144
Tabel 3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Tahun 2024 152
Tabel 3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Tahun 2024 155
Tabel 4.1. Target Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024 157
Tabel 4.2. Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024 158
Tabel 4.3. Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024 158
Tabel 4.4. Dukungan Personil atau Jumlah Pegawai Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kemenag Tahun 2024 159
Tabel 4.5. Program dan Kegiatan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024 160
Tabel 4.6. Target Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024 162
Tabel 4.7. Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024 163
Tabel 4.8. Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024 164
Tabel 4.9. Jumlah Personil / Pegawai Lingkup Dinas Kesehatan Berdasarkan Kecamatan, Instansi/Puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar Tahun 2024 165
Tabel 4.10. Program dan Kegiatan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024 166
Tabel 4.11. Target Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024 167
Tabel 4.12. Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024 167
Tabel 4.13. Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024 168

Tabel 4.14. Program dan Kegiatan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024 169
Tabel 4.15. Target Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024 170
Tabel 4.16. Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024 170
Tabel 4.17. Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024 171
Tabel 4.18. Program dan Kegiatan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024 172
Tabel 4.19. Target Capaian SPM Urusan Trantibum dan Linmas Tahun 2024 173
Tabel 4.20. Realisasi Pencapaian SPM Urusan Trantibum dan Linmas Tahun 2024 173
Tabel 4.21. Alokasi Anggaran SPM Urusan Trantibum dan Linmas Tahun 2024 174
Tabel 4.22. Program dan Kegiatan SPM Urusan Trantibumlinmas (Satpol PP dan BPBD) Tahun 2024 177
Tabel 4.23. Target Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2024 178
Tabel 4.24. Realisasi Peencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2024 179
Tabel 4.25. Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial Tahun 2024 180
Tabel 4.26. Program dan Kegiatan SPM Urusan Sosial Tahun 2024 181

Daftar Gambar

GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Polewali Mandar 5

CHART

Chart 2.1. Angka Kemiskinan Tahun 2019-2024 90
Chart 2.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2019-2024 91
Chart 2.3. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 93
Chart 2.4. Pengeluaran Konsumsi Rata-Rata Perkapita Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023-2024 93
Chart 2.5. Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Polewali MandarTahun 2019-2024 94
Chart 2.6. Harapan Lama Sekolah Kab. Polewali MandarTahun 2019-2024 95
Chart 2.7. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 - 2024 95
Chart 2.8. Prevalensi Stunting Tahun 2019-2024 96
Chart 2.9. Trend Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 96
Chart 2.10. Trend Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 97
Chart 2.11. Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 98
Chart 2.12. Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 98
Chart 2.13. Jumlah Wisatawan Tahun 2019-2024 99
Chart 2.14. Trend Pertumbuhan Investasi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 99
Chart 2.15. Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 100
Chart 2.16. Trend Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 101
Chart 2.17. Trend Perkembangan Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap Tahun 2019-2024 101
Chart 2.18. Trend Perkembangan Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2024 102
Chart 2.19. Indeks Infrastruktur Permukiman Tahun 2019-2024 103
Chart 2.20. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2019-2024 104
Chart 2.21. Trend Capaian Kinerja SAKIP Tahun 2019-2024 105
Chart 2.22. Indeks SPBE 2019-2024 107
Chart 2.23. Nilai SKM Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024 107

Kata Pengantar

Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa tercurahkan kehadirat ALLAH SWT. Rabbul ‘Alamin, karena atas limpahan rahmat, karunia serta perkenan-Nya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Sulawesi Barat.

Bahwa berdasarkan pasal 69 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah adalah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun mengenai teknis penyusunan LPPD tersebut yang sesuai dengan amanat pasal 74 Undang-Undang 23 Tahun 2014 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat pada dasarnya memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan sepanjang tahun 2024. Dimana dalam capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri dari capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Selain itu, LPPD juga memuat Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024.

Dengan segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan yang menyebabkan belum optimalnya beberapa hal dalam proses pencapaian target kinerja pada tahun 2024, akan kami jadikan sebagai salah satu bahan evaluasi bagi peningkatan capaian kinerja pemerintah daerah pada tahun berikutnya. Saran, pendapat, maupun kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penyelesaian laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesarbesarnya, seraya berharap semoga segala upaya yang kita lakukan dalam membangun Kabupaten Polewali Mandar yang lebih baik dapat terwujud dan bernilai ibadah di sisi ALLAH SWT. Aamiin.

Polewali, 25 Maret 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

BUPATI POLEWALI MANDAR

H. SAMSUL MAHMUD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Titik awal pembentukan Kabupaten Polewali Mandar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Tanggal 4 Juli 1959 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Polewali Mandar yang sebelumnya bernama Kabupaten Polewali Mamasa. Kemudian sebagai konsekuensi terbentuknya Kabupaten Mamasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, maka nama Kabupaten Polewali Mamasa Berubah menjadi Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, maka 5 (lima) Kabupaten yang semula berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terpisah dari provinsi induk, selanjutnya masuk ke dalam Provinsi Sulawesi Barat, termasuk Kabupaten Polewali Mandar.

Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah dengan memperhatikan karakteristik daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Polewali Mandar, yang sebelumnya bernama Kabupaten Polewali Mamasa, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat.

Pada tanggal 24 Oktober 2024 telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat. Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Polewali Mandar yang sebelumnya. Undang-Undang ini mengatur mengenai penyesuaian cakupan wilayah dan batas daerah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar diberikan kewenangan untuk menjalankan otonomi daerah dengan mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kemandirian daerah. Kewenangan pemerintah kabupaten memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, menetapkan peraturan daerah, mengalokasikan anggaran untuk penyertaan modal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi yang luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya di dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Pasal 70 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Bupati/walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat (1) kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun”. Pasal 72 menyatakan bahwa “Kepala daerah menyampaikan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

Kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Serta diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintaha Daerah.

Untuk memberikan dasar kebijakan yang jelas, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 ini mengacu dan berpedoman pada Landasan Hukum sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7) Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Peraturan tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
14) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 4);
15) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
16) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Darah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 3);
17) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 6);
18) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 5);
19) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 19).

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sebelumnya bernama Kabupaten Polewali Mamasa yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah daerah ini dimekarkan dengan berdirinya Kabupaten Mamasa sebagai kabupaten tersendiri, maka nama Kabupaten Polewali Mamasa dirubah menjadi Kabupaten Polewali Mandar. Nama kabupaten ini resmi digunakan dalam proses administrasi pemerintahan sejak tanggal 1 Januari 2006, setelah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005, tanggal 27 Desember 2005, tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar.

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu dari enam kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dengan luas wilayah 2.074,76 Km². Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Polewali Mandar berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Mamasa
- Sebelah Selatan dengan Selat Makassar
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Majene
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Pinrang (Provinsi Sulawesi Selatan)

Gambar 1.1.
Peta Administrasi Kabupaten Polewali Mandar

Sumber : Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar

Kabupaten Polewali Mandar secara administratif terbagi ke dalam 16 kecamatan yang terdiri atas 144 desa dan 23 kelurahan. Kecamatan Tubbi Taramanu merupakan kecamatan yang terluas dengan luas wilayah 436,00 Km² atau sekitar 21,01 % dari luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tinambung dengan luas ±22,12 Km² atau hanya 1,07 % dari luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1.
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar

NO	KECAMATAN	IBU KOTA KECAMATAN	LUAS WILAYAH	
			Luas Areal (Km²)	Persentase (%)
1.	Tinambung	Batulaya	22,12	1,07
2.	Balanipa	Balanipa	32,98	1,59
3.	Limboro	Limboro	69,47	3,35
4.	Tubbi Taramanu	Taramanu	436,00	21,01
5.	Allu	Petoosang	164,15	7,91
6.	Campalagian	Parappe	114,52	5,52
7.	Luyo	Mambu	123,82	5,97
8.	Wonomulyo	Sidodadi	76,84	3,70
9.	Mapilli	Mapilli	102,75	4,95
10.	Tapango	Tapango	129,39	6,23
11.	Matakali	Matakali	72,61	3,50
12.	Bulo	Bulo	228,91	11,03
13.	Polewali	Pekkabata	32,38	1,56
14.	Binuang	Amassangan	145,89	7,03
15.	Anreapi	Anreapi	89,04	4,29
16.	Matangnga	Matangnga	234,40	11,29
JUMLAH			**2.075,27**	**100,00**

Sumber : Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka 2025.

Selama tahun 2024 di Kabupaten Polewali Mandar tercatat sebanyak 268 hari hujan dengan curah hujan sebesar 1.566,4 mm. Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Agustus dan Oktober dengan jumlah hari hujan 31 hari dan curah hujan tertinggi pada bulan Desember sebesar 381,60 mm. Sebaliknya, jumlah hari hujan terendah terjadi pada bulan Juni dengan jumlah hari hujan 11 hari dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 8 mm.

Tabel 1.2.
Jumlah Hari Hujan, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024

No.	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (jam)
1	Januari	120,90	20	5,8
2	Februari	78,90	13	7,3
3	Maret	154,70	18	5,4
4	April	62,60	16	6,8
5	Mei	145,70	12	6,0
6	Juni	225,50	11	6,3
7	Juli	15,10	27	6,0
8	Agustus	8,00	31	6,6
9	September	79,00	30	7,0
10	Oktober	164,20	31	6,9
11	November	130,20	30	6,9
12	Desember	381,60	29	3,6

Sumber : Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka 2025.

Kabupaten Polewali Mandar secara astronomis terletak pada posisi antara 3^0 4'7,83" - 3^0 32 3,79" Lintang Selatan dan antara 118^0 53' 57,55 - 119^0 29' 33,31" Bujur Timur, untuk lebih jelasnya, letak astronomis per kecamatan dan ketinggian dari permukaan laut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3.
Letak Geografi dan Ketinggian dari Permukaan Laut Menurut Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar

No	Kecamatan	Letak Geografi		Ketinggian dari Permukaan Laut (mdpl)
		Lintang Selatan	Bujur Timur	
1	Tinambung	03° 30' 14.863" S	119° 0' 25.851" E	1
2	Balanipa	03° 29' 7.109" S	119° 3' 51.193" E	2
3	Limboro	03° 26' 52.442" S	119° 1' 3.260" E	3
4	Tubbi Taramanu	03° 13' 13.495" S	119° 0' 24.366" E	4
5	Alu	03° 22' 3.539" S	118° 58' 0.719" E	5
6	Campalagian	03° 27' 15.375" S	119° 7' 31.958" E	6
7	Luyo	03° 21' 56.414" S	119° 6' 21.975" E	7
8	Wonomulyo	03° 25' 23.888" S	119° 14' 9.489" E	8
9	Mapilli	03° 21' 29.259" S	119° 10' 31.480" E	9
10	Tapango	03° 18' 39.784" S	119° 15' 18.772" E	10
11	Matakali	03° 22' 7.263" S	119° 17' 8.657" E	11
12	Polewali	03° 24' 39.456" S	119° 20' 3.884" E	12
13	Binuang	03° 25' 19.275"	119° 25' 28.360" E	13
14	Anreapi	03° 20' 44.795"	119° 21' 47.552" E	14
15	Matangnga	03° 10' 51,710"	119° 13' 41.588" E	15
16	Bulo	03° 12' 16.300"	119° 7' 36.059" E	16

Sumber : Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka 2024.

Topografi wilayah Kabupaten Polewali Mandar yaitu bentuk permukaan bumi Polewali Mandar yaitu datar, landai, bergelombang dan bukit serta bergunung. Luas penyebaran kelas topografi dan kelas lereng sebagian besar atau 41-60 persen dari luas kabupaten memiliki topografi bergunung dengan luas 69,50 persen dari luas topografi kabupaten, dan sisanya sekitar 2 persen dari luas kabupaten memiliki topografi datar atau sebesar 26,55 dari luas topografi kabupaten Kondisi topografi Polewali Mandar ini, dalam perencanaan pembangunan di kabupaten dilaksanakan dengan ekstra hati-hati agar sumberdaya alam yang tersedia dapat bermanfaat secara optimal dan berkelanjutan. Luas penyebaran kelas topografi dan kelas lereng di wilayah Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4.
Luas Penyebaran Kelas Topografi dan Kelas Lereng Kabupaten Polewali Mandar

No.	Topografi	Kelas Lereng (%)	Luas (Ha)	Persen (%)
1	Datar	0-2	33.773,38	16
2	Agak Datar	>2-8	26.022,10	13
2	Landai	>8-15	18.941,29	9
3	Agak Curam / Bergelombang	>15-25	22.104,35	11
4	Curam / Berbukit	>25-40	46.200,19	22
5	Sangat Curam / Bergunung	>40	60.435,36	29
Total			**207.476,67**	**100**

Sumber Data : RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024

c. Jumlah Penduduk

Sebagai pelaku dari pembangunan, penduduk merupakan sasaran dari pembangunan itu sendiri. Karena pada dasarnya semua program pembangunan memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Olehnya itu, informasi keberadaan penduduk yang akurat dapat memperlancar pembangunan pemerintah.

Jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2024 mencapai 495.371 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar tersebut didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 246.600 jiwa atau 49,96% sedangkan perempuan sebanyak 245.739 jiwa atau 49,91%. Adapun Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Polewali sebanyak 67.745 jiwa atau 13,76% kemudian Kecamatan Campalagian sebanyak 64.849 jiwa atau 13,17%. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Matangnga yaitu sebanyak 6.082 jiwa atau 1,24%.

Tabel 1.5.
Jumlah Penduduk per-Kecamatan Kab. Polewali Mandar Tahun 2024

Kecamatan	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Tinambung	12.294	12.776	25.070
Campalagian	32.395	32.454	64.849
Wonomulyo	26.171	26.59	52.761
Polewali	33.729	34.016	67.745
Tutar	11.958	11.629	23.587
Binuang	20.512	20.117	40.629
Tapango	13.647	13.273	26.920
Mapilli	17.333	17.317	34.650
Matangnga	3.181	2.901	6.082

Luyo	17.134	16.818	33.952
Limboro	9.469	9.824	19.293
Balanipa	14.888	14.989	29.877
Anreapi	6.074	5.765	11.839
Matakali	14.612	14.323	28.935
Allu	7.603	7.545	15.148
Bulo	5.6	5.402	11.002
Kab. Polewali Mandar	**246.600**	**245.739**	**492.339**

Sumber : Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka 2025.

Kepadatan penduduk adalah ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2024 mencapai 237 jiwa/km2. Kecamatan Polewali mencatat tingkat kepadatan tertinggi, yaitu 2.092 jiwa/km^2, disusul Kecamatan Tinambung yaitu 1.133 jiwa/km^2. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Matangnga yaitu 26 jiwa/km^2. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.6.
Kepadatan Penduduk Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024

No	KECAMATAN	PERSENTASE PENDUDUK		KEPADATAN PENDUDUK	
		2023	2024	2023	2024
1	TINAMBUNG	5,06	5.09	1.173,90	1,133
2	BALANIPA	6,09	6.07	806,12	906
3	LIMBORO	3,98	3.92	414,26	278
4	TUBBI TARAMANU	4,91	4.79	68,09	54
5	ALU	3,08	3.08	66,86	92
6	CAMPALAGIAN	13,40	13.17	755,71	566
7	LUYO	6,87	6.90	217,47	274
8	WONOMULYO	10,54	10.72	716,75	687
9	MAPILLI	7,05	7.04	380,48	337
10	TAPANGO	5,35	5.47	210,80	208
11	MATAKALI	5,86	5.88	503,71	398
12	BULO	2,19	2.23	47,26	48
13	POLEWALI	13,72	13.76	2.586,87	2,092
14	BINUANG	8,37	8.25	336,24	278
15	ANREAPI	2,34	2.40	92,83	133
16	MATANGNGA	1,21	1.24	25,44	26
KAB. POLEWALI MANDAR		**100**	**100**	**244,95**	**237**

Sumber : Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka 2025.

Apabila dilihat dari struktur usia penduduk menurut kelompok umur Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 335.697 jiwa, lebih banyak dibandingkan usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65+ tahun) sebesar 156.642 jiwa. Proporsi penduduk usia 0-14 tahun turun dari 27,24 % pada tahun 2023 menjadi 26,23 % pada tahun 2024. Dalam periode yang sama penduduk usia kerja 15-64 tahun sedikit meningkat dari angka 66,66 % di tahun 2023 menjadi 68,18 % di tahun 2024. Sementara itu penduduk usia 65 tahun ke atas menurun dari 6,11 % di tahun 2023 menjadi 5,59 % di tahun 2024.

Berdasarkan gambaran tersebut struktur umur penduduk Kabupaten Polewali Mandar didominasi oleh usia produktif sebesar 335.697 jiwa atau 68,18%. Kondisi ini

menunjukkan bahwa Kabupaten Polewali Mandar telah mengalami bonus demografi, dengan jumlah usia produktif lebih banyak daripada jumlah usia nonproduktif.

Tabel 1.7.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024

Kelompok Umur	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
0 – 4	19.825	18.333	**38.158**
5 – 9	22.928	21.586	**44.514**
10 – 14	23.806	22.655	**46.461**
15 – 19	24.406	23.096	**47.502**
20 – 24	24.308	23.263	**47.571**
25 – 29	20.871	19.790	**40.661**
30 – 34	18.260	17.410	**35.670**
35 – 39	17.315	17.047	**34.362**
40 – 44	16.245	16.427	**32.672**
45 – 49	14.508	15.502	**30.010**
50 – 54	14.241	14.697	**28.938**
55 – 59	10.723	11.667	**22.390**
60 – 64	7.463	8.458	**15.921**
65 – 69	4.548	5.935	**10.483**
70 – 74	3.242	4.230	**7.472**
75+	3.911	5.643	**9.554**
KAB. POLEWALI MANDAR	**246.600**	**245.739**	**492.339**

Sumber : Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka 2025

Pada tahun 2024 di Kabupaten Polewali Mandar jumlah angkatan kerja sebesar 259.466, terdiri dari 153.068 laki-laki dan 106.398 orang perempaun. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, 96,90 % atau 251.424 orang bekerja dan 3,10 persen atau 8.042 orang pengangguran terbuka. Penduduk yang termasuk Bukan Angkatan Kerja sebesar 107.938 orang. Terdiri dari 27,04 % atau 29.186 laki-laki dan 72,96 % atau 78.752 perempuan.

Tabel 1.8.
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Tahun 2024

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	**153.068**	**106.398**	**259.466**
Bekerja (Jiwa)	148.701	102.723	251.424
Pengangguran Terbuka (Jiwa)	4.367	3.675	8.042
Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)	**29.186**	**78.752**	**107.938**
Sekolah (Jiwa)	14.070	16.020	30.090
Mengurus Rumah Tangga (Jiwa)	5.530	58.321	63.851
Lainnya	9.586	4.411	13.997
Jumlah	**182.254**	**185.150**	**367.404**

Sumber : Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka 2025.

Laju pertumbuhan penduduk per tahun merupakan angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Berdasarkan data berikut, diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2024 sebesar 0,75. Sedangkan kecamatan dengan laju pertumbuhan tertinggi ada di kecamatan Campalagian sebesar 1,54.

Tabel 1.9.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Polewali Mandar per Tahun 2023-2024

No	KECAMATAN	PENDUDUK		LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK 2023-2024
		2023	2024	
1	TINAMBUNG	24.732	25.070	1.37
2	BALANIPA	29.569	29.877	1.04
3	LIMBORO	19.265	19.293	0.15
4	TUBBI TARAMANU	23.494	23.587	0.40
5	ALU	15.120	15.148	0.19
6	CAMPALAGIAN	63.866	64.849	1.54
7	LUYO	33.863	33.952	0.26
8	WONOMULYO	52.311	52.761	0.86
9	MAPILLI	34.391	34.650	0.75
10	TAPANGO	26.733	26.920	0.70
11	MATAKALI	28.899	28.935	0.12
12	BULO	10.866	11.002	1.25
13	POLEWALI	67.276	67.745	0.70
14	BINUANG	40.453	40.629	0.44
15	ANREAPI	11.778	11.839	0.52
16	MATANGNGA	6.082	6.082	0.00
Polewali Mandar		**488.698**	**492.339**	**0.75**

Sumber : Disdukcapil Polewali Mandar Dalam Angka 2025.

Jumlah data penduduk tahun 2023 sejumlah 488.698 jiwa sedangkan jumlah data tahun 2024 sejumlah 492.339, terdapat kenaikan 3,641 jiwa. Pertambahan dan pengurangan jumlah penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

Faktor penambah :

1. Kelahiran penduduk yang sudah dilaporkan dan diterbitkan akta kelahirannya
2. Kedatangan penduduk dari Kabupaten/Kota dan Provinsi lain
3. Perekaman KTP-el bagi Wajib KTP yang NIK nya berasal dari data non aktif atau bagi penduduk yang tadinya belum memiliki NIK dan menghasilkan status yang tunggal
4. Aktivasi NIK yang tadinya sudah dilaporkan meninggal ternyata masih hidup, misalnya didapatkan informasi dari laporan desa atau hasil pemutakhiran data

Faktor pengurang :

1. Kematian penduduk yang sudah dilaporkan dan diterbitkan akta kematiannya
2. Pindah penduduk ke Kabupaten/Kota dan Provinsi lain
3. Perekaman KTP-el yang menghasilkan status Duplicate Record / ganda (penduduk melakukan perekaman lebih dari sekali dengan NIK berbeda)
4. Penonaktifan data berdasarkan informasi dari desa atau hasil coklit KPU karena meninggal tidak dilaporkan dan belum diterbitkan akta kematian, pindah keluar negeri, tidak dikenal atau WNA yang tidak sengaja tercatat sebagai WNI.

Pertumbuhan penduduk akan semakin berkualitas jika ditunjang dengan anggaran yang memadai untuk mendukung proses pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Semakin tinggi pelaporan penduduk kepada dinas dukcapil maka kualitas data kependudukan akan semakin tinggi pula karena proses updating elemen data dan status kependudukan sangat menentukan keakuratan data.

b. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kecamatan adalah wilayah administratif yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Masing-masing camat merupakan pegawai negeri sipil serta bertanggung jawab kepada bupati atau walikota. Setiap kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan/desa atau nama lain. Tingkatan di bawah kecamatan adalah Kelurahan atau desa. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah, sedangkan Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari 16 kecamatan, 23 kelurahan dan 144 desa. Berikut daftar kecamatan, kelurahan dan desa :

Tabel 1.10.
Kecamatan, Kelurahan Dan Desa Di Kabupaten Polewali Mandar

No	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA			
1	BINUANG	1	Kel. Amassangan	6	Mirring
		2	Kaleok	7	Tonyaman
		3	Kuajang	8	Paku
		4	Amola	9	Mammi
		5	Battetangnga	10	Rea
2	POLEWALI	1	Kel. Polewali	6	Kel. Pekkabata
		2	Kel. Wattang	7	Kel. Madatte
		3	Kel. Lantora	8	Kel. Manding
		4	Kel. Sulewatang	9	Kel. Darma
		5	Kel. Takatidung		
3	ANREAPI	1	Kel. Anreapi		
		2	Kelapa Dua		
		3	Pappandangan		
		4	Kunyi		
		5	Duampanua		
4	MATAKALI	1	Kel. Matakali	5	Bunga-Bunga
		2	Tonrolima	6	Patampanua
		3	Pasiang	7	Indu Makkombong
		4	Barumbung		
5	WONOMULYO	1	Kel. Sidodadi	8	Kebunsari
		2	Sugihwaras	9	Banua Baru
		3	Sidorejo	10	Campurjo
		4	Arjosari	11	Bakka-Bakka
		5	Bumimulyo	12	Nepo
		6	Bumiayu	13	Galeso
		7	Tumpiling	14	Sumberjo
6	TAPANGO	1	Kel. Pelitakan	8	Dakka
		2	Rappang	9	Banatorejo
		3	Jambu Malea	10	Palatta
		4	Kalimbua	11	Tapango
		5	Batu	12	Riso
		6	Tuttula	13	Kurrak
		7	Tapango Barat	14	Bussu
7	BULO	1	Bulo	6	Sabura
		2	Karombang	7	Patambanua

		3	Daala Timur	8	Sepporakki
		4	Pulliwa	9	Ihing
		5	Lenggo		
8	MATANGNGA	1	Kel. Matangnga	5	Katimbang
		2	Rangoan	6	Tapua
		3	Ba'ba Tapua	7	Mambu Tapua
		4	Lilli		
9	MAPILLI	1	Kel. Mapilli	7	Buku
		2	Beroangin	8	Kurma
		3	Landi Kanusuang	9	Bonra
		4	Ugi Baru	10	Bonne-Bonne
		5	Segerang	11	Sattoko
		6	Rappang Barat	12	Rumpa
10	LUYO	1	Kel. Batupanga	7	Mapilli Barat
		2	Batupanga Daala	8	Baru
		3	Pussui	9	Puccadi
		4	Tenggelang	10	Pussui Barat
		5	Sambali Wali	11	Mambu
		6	Luyo		
11	TUBBI TARAMANU	1	Kel. Taramanu	8	Arabua
		2	Ambopadang	9	Peburru
		3	Tubbi	10	Besoangin Utara
		4	Ratte	11	Pollewani
		5	Besoangin	12	Poda-Poda
		6	Piriang Tapiko	13	Taramanu Tua
		7	Taloba		
12	CAMPALAGIAN	1	Kel. Pappang	10	Laliko
		2	Ongko	11	Bonde
		3	Kenje	12	Katumbangan Lemo
		4	Sumarrang	13	Panyampa
		5	Botto	14	Suruang
		6	Gattungan	15	Lampoko
		7	Padang Timur	16	Katumbangan
		8	Lagi Agi	17	Lapeo
		9	Padang	18	Parappe
13	BALANIPA	1	Kel. Balanipa	7	Galung Tuluk
		2	Tammejarra	8	Pallis
		3	Lego	9	Tamangalle
		4	Pambusuang	10	Bala
		5	Mosso	11	Lambanan
		6	Sabang Subik		
14	TINAMBUNG	1	Kel. Tinambung	5	Galung Lombok
		2	Karama	6	Tandung
		3	Tangnga Tangnga	7	Batulaya
		4	Lekopaddis	8	Sepabatu
15	LIMBORO	1	Kel. Limboro	7	Pandulangan
		2	Lembang-Lembang	8	Renggeang
		3	Tandasura	9	Salarri
		4	Samasundu	10	Tangan Baru
		5	Napo	11	Palece
		6	Todang Todang		

16	ALU	1	Kel. Petoosang	5	Puppuring
		2	Mombi	6	Saragiang
		3	Kalumammang	7	Sayoang
		4	Pao Pao	8	Alu

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda, 2024

c. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah Daerah

Adapun Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagai pelaksana kegiatan urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Untuk Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah pada tahun 2023 sebanyak 6.002 pegawai yang terdiri dari 2.384 laki-laki dan 3.618 perempuan. Sedangkan di tahun 2024 berjumlah 7.699 pegawai yang terdiri dari 2.743 laki-laki dan 4.956 perempuan yang tersebar di seluruh perangkat daerah. Untuk lebih jelasnya, jumlah ASN Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan unit kerja perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.11.
Jumlah ASN Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 dan 2024

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JUMLAH				TOTAL	
		Laki-Laki		Perempuan			
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Sekretariat Daerah	69	68	49	47	118	115
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	20	19	16	16	36	35
3	Inspektorat Kabupaten	29	28	30	30	59	58
4	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	29	27	16	15	45	42
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7	8	13	14	20	22
6	Badan Keuangan	15	14	25	30	40	44
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13	12	3	5	16	17
8	Badan Pendapatan	20	18	14	15	34	33
9	Badan Penelitian Pengembangan Dan Perencanaan	25	25	13	16	38	41
10	Dinas Kelautan Dan Perikanan	18	17	21	19	39	36
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	13	11	20	18	33	29
12	Dinas Kesehatan	155	196	667	876	822	1072
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	15	14	7	7	22	21
14	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	32	34	13	13	45	47
15	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	91	84	29	27	120	111
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	17	20	10	10	27	30
17	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata	15	16	18	16	33	32
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	10	16	16	25	26
19	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1066	1444	1940	3100	3006	4544
20	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3	3	19	18	22	21
21	Dinas Perhubungan	26	25	11	11	37	36
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	20	22	17	16	37	38
23	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5	4	15	14	20	18
24	Dinas Pertanian Dan Pangan	140	127	98	97	238	224

25	Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan	13	13	16	13	29	26
26	Dinas Sosial	13	13	8	8	21	21
27	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi Dan Sumber Daya Mineral	19	18	6	6	25	24
28	Kantor Kecamatan Alu	13	12	5	4	18	16
29	Kantor Kecamatan Anreapi	16	14	6	6	22	20
30	Kantor Kecamatan Balanipa	13	12	15	14	28	26
31	Kantor Kecamatan Binuang	13	11	7	5	20	16
32	Kantor Kecamatan Bulo	12	10	2	2	14	12
33	Kantor Kecamatan Campalagian	23	18	14	12	37	30
34	Kantor Kecamatan Limboro	18	15	7	7	25	22
35	Kantor Kecamatan Luyo	16	14	6	6	22	20
36	Kantor Kecamatan Mapilli	16	14	9	9	25	23
37	Kantor Kecamatan Matakali	13	13	12	12	25	25
38	Kantor Kecamatan Matangnga	16	15	1	1	17	16
39	Kantor Kecamatan Polewali	44	40	45	45	89	85
40	Kantor Kecamatan Tapango	15	16	6	5	21	21
41	Kantor Kecamatan Tinambung	14	10	19	17	33	27
42	Kantor Kecamatan Tubbi Taramanu	18	14	1	1	19	15
43	Kantor Kecamatan Wonomulyo	24	23	13	12	37	35
44	Satuan Polisi Pamong Praja	112	108	3	3	115	111
45	RSUD Hajjah Andi Depu	75	90	271	315	346	405
46	Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo	13	2	63	5	76	7
47	Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	3	2	3	2	6	4
JUMLAH TOTAL		**2.384**	**2.743**	**3.618**	**4.956**	**6.002**	**7.699**

Sumber : BKPP Polewali Mandar

Tabel 1.12.
Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 dan 2024

NO.	JABATAN	JUMLAH				TOTAL	
		Laki-Laki		Perempuan			
		2023	2024	2023	2024	2024	2024
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	0	0	0	0	0	0
2	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	0	0	0	0	0	0
3	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	26	22	7	6	33	28
4	Administrator	116	100	57	45	173	145
5	Pengawas	255	234	0	154	412	388
6	Eselon V	0	0	0	0	0	0
7	Jabatan Fungsional Dosen	0	0	0	0	0	0
8	Jabatan Fungsional Guru	857	1.325	1.550	2.979	2.407	4.304
9	Jabatan Fungsional Medis	165	216	832	1.030	997	1.246
10	Jabatan Fungsional Teknis	205	185	142	134	347	319
11	Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana	760	661	873	608	1.633	1.269
JUMLAH TOTAL		**2,384**	**2.743**	**3.618**	**4.956**	**6.002**	**7.699**

Sumber : BKPP Polewali Mandar

Tabel 1.13.
Jumlah ASN Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 dan 2024

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH				TOTAL	
		Laki-Laki		Perempuan			
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	SD (Sekolah Dasar)	5	3	1	0	6	3
2	SMP (Sekolah Menengah Pertama)	10	8	2	2	12	10
3	SMA (Sekolah Menengah Atas)	332	307	190	169	522	476
4	Diploma I / Akta I	0	0	4	2	4	2
5	Diploma II / Akta II	54	46	72	61	126	107
6	Diploma III / Akta III	79	92	374	458	453	550
7	Diploma IV / Akta IV	17	18	81	94	98	112
8	S1 / Sarjana	1.533	1919	2.610	3.839	4.143	5.758
9	S2 / Pasca Sarjana	352	348	283	330	635	678
10	S3 / Doktor / Ph.D	2	2	1	1	3	3
JUMLAH TOTAL		**2.384**	**2.743**	**3.618**	**4.956**	**6.002**	**7.699**

Sumber : BKPP Polewali Mandar

Tabel 1.14.
Jumlah ASN Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024

No.	Golongan Kepangkatan	Jenis Kelamin		TOTAL
		Laki-Laki	Perempuan	
1	I/a (Juru Muda)	0	0	-
2	I/b (Juru Muda Tk. I)	0	1	1
3	I/c (Juru)	1	0	1
4	I/d (Juru Tingkat I)	5	0	5
	Golongan I/Range I :	**6**	**1**	**7**
1	II/a (Pengatur Muda)	33	5	38
2	II/b (Pengatur Muda Tk. I)	41	25	66
3	II/c (Pengatur)	97	213	310
4	II/d (Pengatur Tk. I)	109	130	239
	Golongan II/Range II :	**280**	**373**	**653**
1	III/a (Penata Muda)	792	1990	2,782
2	III/b (Penata Muda Tk. I)	329	509	838
3	III/c (Penata)	359	541	900
4	III/d (Penata Tk. I)	431	677	1,108
	Golongan III/Range III :	**1911**	**3717**	**5,628**
1	IV/a (Pembina Muda)	242	367	609
2	IV/b (Pembina Muda Tk. I)	251	425	676
3	IV/c (Pembina)	52	73	125
4	IV/d (Pembina Tk. I)	1	0	1
5	IV/e (Pembina Tk. I)	0	0	-
	Golongan IV/Range IV :	**546**	**865**	**1,411**
JUMLAH TOTAL		**2,743**	**4,956**	**7.699**

Sumber : BKPP Polewali Mandar

Penyebab terjadinya Penambahan PNS / ASN dari tahun 2023 dan 2024 disebabkan adanya kekurangan ASN sebagai berikut :

Tabel 1.15.
Jumlah Kebutuhan ASN Kabupaten Polewali Mandar

No	JENIS KEPEGAWAIAN	KEADAAN ASN	JUMLAH KEBUTUHAN ASN	KEKURANGAN ASN
1	Tenaga Kesehatan	1.246	1.410	164
2	Tenaga Guru	4.304	4.693	389
3	Tenaga Teknis	2.149	2.460	311
Jumlah		**7.699**	**8.563**	**864**

Sumber : BKPP Polewali Mandar

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Jumah Kekurangan PNS tahun 2024 adalah sebanyak 864 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kebutuhan Tenaga Kesehatan 1.410 sedangkan PNS yang ada adalah 1.246 sehingga terjadi kekurangan sebanyak 164 PNS.
2. Kebutuhan Tenaga Guru 4.693 sedangkan PNS yang ada adalah 4.304 sehingga terjadi kekurangan sebanyak 389 PNS
3. Kebutuha Tenaga Teknis 2.460 sedangkan PNS yang ada adalah 2.149 sehingga terjadi kekurangan sebanyak 311 PNS

Penerimaan ASN tahun 2024 merupakan program Pemerintah pusat dalam penyelesaian pegawai NON ASN dalam hal Penataan dan pengangkatan Non ASN menjadi ASN. Khusus tenaga pendidik formasi tahun 2024 merupakan sisa formasi tahun sebelumnya (2023) sebanyak 389, sehingga pemenuhan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, yang seharusnya batas tertinggi sebesar 30% dari Total Belanja APBD tidak dapat dipenuhi, dan sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/521/M.SM.01.00/2023 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 tanggal 14 Maret 2023, menyatakan " usulan kebutuhan ASN memperhatikan kesediaan anggaran dalam APBN/APBD dengan prinsip zero growth kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan Dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.

d. Realisasi Angggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pengelolaan keuangan daaerah merupakan keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib administrasi keuangan. Struktur APBD Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2023 terdiri dari komponen Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. Secara terperinci jenis Pendapatan terdiri: (1) pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (2) pendapatan transfer yang bersumber Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah; serta (3) lain-lain pendapatan yang sah yang berasal dari pendapatan hibah.

Komponen belanja terdiri atas: (1) belanja operasional, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial; (2) belanja modal yang meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja modal aset tetap lainnya dan (3) belanja tak terduga, yang merupakan belanja yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. (4) Belanja Transfer terdiri atas transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan. Sementara komponen pembiayaan terdiri atas: penerimaan daerah, yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi. Adapun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut. Sampai dengan LPPD ini dilaporkan data tersebut masih ***unaudited*** karena masih dalam proses pemeriksaan BPK RI Perwakil Provinsi Sulawesi Barat.

❖ *Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan*

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih, atau merupakan penerimaan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Analisis pendapatan daerah menggunakan angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pendapatan daerah dimasa yang akan datang. Anggaran Pendapatan Daerah pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.627.490.487.902,87 dengan realisasi Rp. 1.567.871.750.079,96. atau 96,34%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada berikut:

Tabel 1.16.
Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024

NO	URAIAN	Catatan	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**PENDAPATAN**	**7.5.1.A**	**1.627.490.487.902,87**	**1.567.871.750.079,96**	**96,34**	**1.516.764.288.978,72**
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**7.5.1.A.1**	**246.100.435.095,87**	**230.174.571.951,26**	**93,53**	**230.029.361.038,72**
3	Pajak Daerah	7.5.1.A.1.a	36.566.000.000,00	32.164.628.114,30	87,96	31.169.111.675,97
4	Retribusi Daerah	7.5.1.A.1.b	24.433.677.380,00	17.630.937.310,00	72,16	15.584.920.898,05
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.A.1.c	4.367.319.482,00	3.906.598.619,00	89,45	3.973.313.202,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	7.5.1.A.1.d	180.733.438.233,87	176.472.407.907,96	97,64	179.302.015.262,70
7	**PENDAPATAN TRANSFER**	**7.5.1.A.2**	**1.320.270.310.846,00**	**1.302.744.631.411,00**	**98,67**	**1.283.499.099.028,00**
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.5.1.A.2.a	1.268.833.310.294,00	1.253.464.524.842,00	98,79	1.234.414.353.532,00
9	Dana Perimbangan	7.5.1.A.2.a.1)	1.119.670.086.294,00	1.104.301.304.342,00	98,63	1.084.591.467.532,00
10	Dana Desa		142.976.314.000,00	142.976.310.500,00	100,00	144.190.872.000,00
11	Insentif Fiskal		6.186.910.000,00	6.186.910.000,00	100,00	5.632.014.000,00
12	Pendapatan Transfer Antar Daerah	7.5.1.A.2.b	51.437.000.552,00	49.280.106.569,00	95,81	49.084.745.496,00
13	Pendapatan Bagi Hasil	7.5.1.A.2.b.1)	51.437.000.552,00	49.280.106.569,00	95,81	49.084.745.496,00
14	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**7.5.1.A.3**	**61.119.741.961,00**	**34.952.546.717,70**	**57,19**	**3.235.828.912,00**
15	Pendapatan Hibah	7.5.1.A.3.a	3.732.000.000,00	3.896.488.886,70	104,41	3.235.828.912,00
16	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		57.387.741.961,00	31.056.057.831,00	54,12	0,00

*Sumber : Laporan Realisasi APBD (Konsolidasi) T.A. 2024. Bakeu. *Data Unaudited*

a) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat direalisasikan sebesar Rp. **230.174.571.951,26** atau 93,53% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 246.100.435.095,87. PAD tersebut terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

- **Hasil Pajak Daerah**

  Dari 11 (sebelas) jenis pajak daerah yang ada, secara keseluruhan ada yang telah melampaui target dan ada yang belum melampaui terget. Pajak daerah dapat direalisasikan sebesar Rp. 32.164.628.114,30 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 36.566.000.000,00 atau 87,96%. Komponen pajak retribusi yaitu pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Komponen lainnya yaitu pajak air tanah, pajak hiburan, pajak parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- **Hasil Retribusi Daerah**

  Jenis retribusi daerah di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 3 (tiga) jenis retribusi. Secara total, retribusi daerah dapat direalisasikan sebesar Rp. 17.630.937.310,00 atau secara kumulatif terealisasi sebesar 72,16% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 24.433.677.380,00. Berdasarkan jenis retribusi daerah antara lain retribusi jasa umum. Retribusi jasa usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

- **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

  Realisasi PAD dari komponen pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara kumulatif adalah Rp. 3.906.598.619,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 4.367.319.482,00 atau 89,45%. Komponen dari jenis pendapatan ini adalah Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) dengan realisasi dan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).

- **Lain-Lain PAD Yang Sah**

  Realisasi dari komponen lain-lain PAD yang sah secara kumulatif adalah sebesar Rp. 176.472.407.907,96 atau 97,64% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 180.733.438.233,87. Komponen dari jenis pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah adalah Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, jasa giro, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan dari Pengembalian. Komponen lainnya yaitu Pendapatan BLUD dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.302.744.631.411,00 atau 98,67% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.320.270.310.846,00. Pendapatan transfer tersebut terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah.

- **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

  Tahun 2024 pendapatan transfer pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp. 1.253.464.524.842,00 atau 98,79% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.268.833.310.294,00 Komponen pendapatan transfer pemerintah pusat yang telah mencapai target yang ditetapkan berasal dari komponen Dana Desa sebesar 100,00% dan insentif fiskal sebesar 100%. Sedangkan realisasi dari komponen lainnya yaitu Dana Perimbangan sebesar 98,63% terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) realisasi sebesar 110,27%, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 99,36%, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus

(DAK) Fisik sebesar 96,76%, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar 95,87% serta Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 0%.

- **Pendapatan Transfer Antar Daerah**
  Realisasi dari komponen pendapatan transfer antar daerah secara kumulatif adalah sebesar Rp. 49.280.106.569,00 atau 95,81% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 51.437.000.552,00. Komponen yang berasal dari pendapatan bagi hasil sebesar 95,81%.

c) *Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah*

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk ke dalam PAD dan Pendapatan Transfer. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun di tahun 2024 anggaran lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 61.119.741.961,00 dengan realisasi Rp. 32.002.483.232,70 atau 52,36%.

❖ *Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja*

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tetang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat perubahan Jenis Belanja Daerah yan sebelumnya dikenal belanja tidak langsung dan langsung kini berubah menjadi belanja Operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Anggaran belanja daerah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.639.650.779.700,87 dengan realisasi Rp. 1.572.789.715.366,31 atau 95,92%. Untuk lebih rincinya disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.17.
Laporan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024

NO	URAIAN	Catatan	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
17	**BELANJA DAERAH**	**7.5.1.B**	**1.639.650.779.700,87**	**1.572.789.715.366,31**	**95,92**	**1.512.773.072.001,00**
18	**BELANJA OPERASI**	**7.5.1.B.1**	**1.236.349.720.248,87**	**1.203.380.978.260,83**	***97,33***	**1.078.299.090.759,00**
19	Belanja Pegawai	7.5.1.B.1.a	680.066.662.073,31	695.010.123.376,83	102,20	586.271.380.557,00
20	Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.B.1.b	453.011.565.779,56	410.595.519.473,00	90,64	422.890.435.937,00
21	Belanja Hibah	7.5.1.B.1.c	99.913.292.396,00	94.617.135.411,00	94,70	63.149.254.265,00
22	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.B.1.d	3.358.200.000,00	3.158.200.000,00	94,04	5.988.020.000,00
23	**BELANJA MODAL**	**7.5.1.B.2**	**163.767.418.649,00**	**141.663.607.148,48**	**86,50**	**224.579.869.941,00**
24	Belanja Tanah	7.5.1.B.2.a	520.000.000,00	11.398.800,00	2,19	670.053.000,00
25	Belanja Peralatan dan Mesin	7.5.1.B.2.b	51.921.744.565,00	47.622.494.716,00	91,72	85.522.036.564,00
26	Belanja Gedung dan Bangunan	7.5.1.B.2.c	54.482.387.777,00	49.052.868.496,48	90,03	70.663.130.086,00
27	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.B.2.d	51.918.603.907,00	40.097.648.362,00	77,23	63.465.130.691,00
28	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.5.1.B.2.e	4.924.682.400,00	4.879.196.774,00	99,08	4.259.519.600,00
29	Belanja Modal Aset Lainnya	7.5.1.B.2.f	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**BELANJA TAK TERDUGA**	**7.5.1.B.3**	**2.500.000.000,00**	**1.645.652.204,00**	**65,83**	**1.479.737.131,00**
31	Belanja Tak Terduga	7.5.1.B.a	2.500.000.000,00	1.645.652.204,00	65,83	1.479.737.131,00
32	**BELANJA TRANSFER**	**7.5.1.B.4**	**237.033.640.803,00**	**226.099.477.753,00**	**95,39**	**208.414.374.170,00**
33	Belanja Bagi Hasil	7.5.1.B.4.a	2.913.500.000,00	0,00	0,00	2.508.391.310,00
34	Belanja Bantuan Keuangan	7.5.1.B.4.b	234.120.140.803,00	226.099.477.753,00	96,57	205.905.982.860,00
35	**SURPLUS / DEFISIT**	**7.5.1.C**	**(12.160.291.798,00)**	**(4.917.965.286,35)**	**59,56**	**3.991.216.977,72**

*Sumber : Sumber : Laporan Realisasi APBD (Konsolidasi) T.A. 2024. Bakeu. *Data Unaudited*

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.203.380.978.260,83 atau 97,33% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.236.349.720.248,87. Belanja Operasi tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah serta belanja bantuan sosial.

- **Belanja Pegawai**
  Realisasi dari komponen belanja pegawai secara kumulatif adalah sebesar Rp. 695.010.123.376,83 atau 102,20% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 680.066.662.073,31. Adapun komponen belanja pegawai yaitu Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH serta Belanja Pegawai BLUD.

- **Belanja Barang dan Jasa**
  Realisasi komponen belanja barang dan jasa secara kumulatif adalah sebesar Rp. 410.595.519.473,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 453.011.565.779,56 atau 90,64%. Komponen jenis belanja barang dan jasa yaitu belanja barang, Belanja jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas serta Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- **Belanja Hibah**
  Realisasi komponen belanja hibah secara kumulatif adalah sebesar Rp. 94.617.135.411,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 99.913.292.396,00 atau 94,70%. Komponen jenis belanja hibah yaitu Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Dana BOS dan Belanja Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- **Belanja Bantuan Sosial**
  Realisasi komponen belanja bantuan sosial secara kumulatif adalah sebesar Rp. 3.158.200.000,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 3.358.200.000,00 atau 94,04%. Komponen jenis belanja bantuan sosial yaitu Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga dan Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.

b) Belanja Modal

Belanja modal adalah adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud dan pengeluaran setelah perolehan yang menambah nilai aset yang bersangkutan (Subsequent Expenditures). Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Adapun anggaran belanja modal yaitu sebesar Rp. 163.767.418.649,00 dengan realisasi Rp. 141.663.607.148,48 atau 86,50%.

- **Belanja Modal Tanah**
  Realisasi komponen belanja modal tanah secara kumulatif adalah sebesar Rp. 11.398.800,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 520.000.000,00 atau 2,19%.

- **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**
  Realisasi komponen belanja modal peralatan dan mesin secara kumulatif adalah sebesar Rp. 47.622.494.716,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 51.921.744.565,00 atau 91,72%. Komponen jenis belanja peralatan dan mesin yaitu Belanja Modal Alat Besar, Belanja Modal Alat Angkutan, Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur, Belanja Modal Alat Pertanian, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar, Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan, Belanja Modal Alat Laboratorium, Belanja Modal Komputer, Belanja Modal Alat Eksplorasi, Belanja Modal Rambu-Rambu, Belanja Modal Peralatan Olahraga, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**
  Realisasi komponen belanja modal gedung dan bangunan secara kumulatif adalah sebesar Rp. 49.052.868.496,48 atau 90,03% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 54.482.387.777,00. Komponen jenis belanja modal gedung dan bangunan yaitu Belanja Modal Bangunan Gedung, Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

- **Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi**
  Realisasi komponen belanja modal jalan, jaringan dan irigasi secara kumulatif adalah sebesar Rp. 40.097.648.362,00 atau 77,23% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 51.918.603.907,00. Komponen jenis belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yaitu Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Bangunan Air dan Belanja Modal Instalasi serta Belanja Modal Jaringan dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

- **Belanja Aset Tetap Lainnya**
  Realisasi komponen belanja modal aset tetap lainnya secara kumulatif adalah sebesar Rp. 4.879.196.774,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 4.924.682.400,00 atau 99,08%.

- **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**
  Realisasi komponen belanja modal aset tetap lainnya secara kumulatif adalah sebesar Rp. 0,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,00 atau 0,00%. Komponen jenis belanja modal modal aset tetap lainnya yaitu Belanja Modal Aset Tidak Berwujud dengan realisasi sebesar 0,00%.

c) Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Untuk tahun 2024 anggaran belanja tak terduga adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,00 dengan realisasi Rp. 1.645.652.204,00 atau 65,83%.

d) Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun anggaran belanja transfer Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 237.033.640.803,00 dengan realisasi Rp. 226.099.477.753,00 atau 95,39%.

- **Belanja Bagi Hasil**
  Realisasi komponen belanja bagi hasil secara kumulatif adalah sebesar Rp. 0,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.913.500.000,00 atau 0,00%. Komponen jenis belanja bagi hasil yaitu Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa serta Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

- **Belanja Bantuan Keuangan**
  Realisasi komponen belanja bantuan keuangan secara kumulatif adalah sebesar Rp. 226.099.477.753,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 234.120.140.803,00 atau 96,57%. Komponen jenis belanja bagi hasil yaitu Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

❖ ***Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan***

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Jumlah anggaran pembiayaan daerah tahun 2024 sebesar Rp. 12.260.291.798,00 dengan realisasi Rp. 12.260.291.797,62 atau 100,00%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.18.
Laporan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024

NO	URAIAN	Catatan	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
36	**PEMBIAYAAN**	**7.5.1.D**				
37	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**7.5.1.D.1**	**12.260.291.798,00**	**12.260.291.797,62**	**100,00**	**8.589.805.434,90**
38	Penggunaan SiLPA		12.260.291.798,00	12.260.291.797,62	100,00	8.589.805.434,90
39	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
40	**PEMBIAYAAN NETO**	**7.5.1.E**	**12.260.291.798,00**	**12.260.291.797,62**	**100,00**	**8.589.805.434,90**
41	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) SEBELUM KOREKSI**		**-**	**7.342.326.511,27**		**12.581.022.412,62**
42	**KOREKSI SILPA**		**0,00**	**1.365.000.000,00**		**320.730.615,00**
43	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) SETELAH KOREKSI**	**7.5.1.F**	**-**	**5.977.326.511,27**		**12.260.291.797,62**

*Sumber : Sumber : Laporan Realisasi APBD (Konsolidasi) T.A. 2024. Bakeu. *Data Unaudited*

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk mewujudkan kondisi perekonomian lebih baik, berkembang dan maju, baik secara kualitas maupun kuantitas dengan target peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pemerintah melaksanakan pembangunan bersama dengan stakeholder terkait dengan melalui beberapa tahapan yaitu : perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Perencanaan pembangunan daerah adalah usaha yang dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan nasional dan daerah menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP / RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM / RPJMD),

dan Rencana Pembangunan Tahunan / Rencana Kerja Pemerintah (RKP / RKPD). RPJP / RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan RPJM / RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, dan RKP / RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 merupakan tahapan pembangunan 5 (lima) tahun keempat atau sebagai tahapan terakhir didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025. Pada tahapan ini pembangunan daerah akan lebih ditekankan pada peningkatan kualitas manusia dan perbaikan taraf hidup masyarakat. Sasaran utama peningkatan kualitas manusia adalah meningkatnya nilai dan posisi relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan sasaran utama perbaikan taraf hidup masyarakat adalah menurunnya jumlah dan persentase penduduk miskin, meningkatnya pendapatan atau pengeluaran per kapita. Target utama yang ingin dicapai pada tahapan ini adalah nilai IPM Kabupaten Polewali Mandar sama dengan nilai IPM Provinsi Sulawesi Barat; Persentase penduduk miskin Kabupaten Polewali Mandar sama dengan angka rata-rata Provinsi Sulawesi Barat; dan Pendapatan atau pengeluaran per kapita Kabupaten Polewali Mandar berada di atas angka rata-rata Provinsi Sulawesi Barat.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 memuat visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang selanjutnya dijabarkan ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan serta pendanaan. Dalam penyusunan RKPD kabupaten juga harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

❖ ***Permasalahan Pembangunan***

Permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan dan merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang akan dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembangunan di daerah Kabupaten Polewali Mandar dirumuskan berdasarkan identifikasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah masa yang lalu, khususnya terkait dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Hal ini juga dapat diidentifikasi dari seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa permasalahan utama/ pokok yang dihadapi di Kabupaten Polewali Mandar.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan / kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang

dimilikinya. Adapun beberapa permasalahan pokok pemangunan daerah adalah sebagai berikut.

1) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan manusia menjadi satu keniscayaan bagi suatu bangsa, karena sejatinya pembangunan tidak hanya dilihat dari capaian fisik saja tetapi juga dari sudut manusianya, hal ini sejalan dengan kriteria yang dikembangkan UNDP, dimana pembangunan seharusnya tidak hanya dianalisis dari pertumbuhan ekonomi saja, tapi juga harus dipahami dari sudut manusianya. Untuk itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diciptakan untuk menegaskan bahwa manusia dan segenap kemampuannya harus menjadi kriteria utama untuk menilai keberhasilan pembangunan sebuah negara. Selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2018-2022 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Polewali Mandar berada di angka 63,14 – 64,79. Pencapaian tersebut mengalami peningkatan dai tahun ke tahun , namun belum sesuai dengan target RPJMD tahun 2019-2024, dimana pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 67,73. Hal ini menjadi tantangan besar dalam mengejar ketertinggalan tersebut. Indeks Pembangunan Manusia diukur dari tiga dimensi yaitu dimensi pendidikan, dimensi kesehatan dan pengeluaran perkapita. Pada dimensi pendidikan angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 7,60 dan angka harapan lama sekolah sebesar 13,39. Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah disebabkan masih tingginya angka putus sekolah yakni sebesar, jumlah anak yang tidak bersekolah, dan rasio jumlah anak usia sekolah yang bersekolah. Selain itu pemerataan jumlah guru di setiap sekolah juga sangat berpengaruh dan pemerataan jumlah sekolah.

Rata-rata lama sekolah (RLS) mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi RLS maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani dan semakin tinggi pula kualitas seseorang dalam pola pikir maupun pola tindakannya. Angka rata-rata lama sekolah dari tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan kecenderungan di kisaran angka 7 tahun. Penduduk Kabupaten Polewali Mandar yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,41 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII atau tidak tamat SMP pada tahun 2022.

Harapan lama sekolah adalah perhitungan lamanya jumlah waktu sekolah (dalam tahun) yang akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. Indikator harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukan dalam lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat ditempuh oleh setiap anak sampai usia 12 tahun keatas. Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2018-2022 berada di kecenderungan kisaran angka 13 tahun. Angka ini menunjukkan secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal memiliki peluang untuk bersekolah selama 13 tahun atau setara dengan Diploma I.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan seseorang sangat dipengaruhi oleh perbedaan upah atau pendapatan antara sektor modern dengan sektor tradisional, probabilitas keberhasilan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor modern dengan adanya pendidikan, biaya pendidikan langsung yang harus ditanggung siswa/keluarganya, dan biaya tidak langsung dari Pendidikan.

2) Masih Tingginya Stunting

Stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Stunting pada balita dapat menyebabkan menurunnya produktivitas dan

kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang. Retardasi pertumbuhan atau stunting pada anak-anak di Indonesia terjadi sebagai akibat dari kekurangan gizi kronis dan penyakit infeksi dan memengaruhi 30 persen dari anak-anak usia dibawah lima tahun.

Stunting merupakan permasalahan kesehatan yang menjadi prioritas untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Kunci kesuksesan pencegahan stunting adalah pemantauan gizi dan pengukuran berat badan bayi dan balita yang dilakukan kader masyarakat di posyandu. Saat pandemi covid-19, kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan, dampak pandemi ini terhadap indonesia dapat menyebabkan generation lost di masa depan. Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program-program pencegahan stunting di masa pandemi covid-19 ini.

3) Masih Tingginya Kemiskinan Ekstreem

Tantangan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia dirasa akan semakin berat. Pada level makro, mencakup kebijakan menjaga stabilitas inflasi/harga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, maupun menjaga iklim investasi dihadapkan dengan kenyataan terjadinya kenaikan harga omoditas pangan dan energi. Fenomena ini sebagai akibat perang Ukraina-Rusia yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

Pada level mikro, kebijakan menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan kelompok miskin melalui program ekonomi produktif juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. "Dua isu strategis yang menjadi tantangan pada level mikro adalah akurasi data dan sinergi antar program yang melibatkan kementerian/lembaga dan dunia usaha. Penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui tiga pendekatan yaitu:

- Penurunan beban pengeluaran masyarakat
- Peningkatan pendapatan masyarakat
- Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan
- Lambatnya proses pemulihan ekonomi

Membangun perekonomian dari daerah di era new normal merupakan upaya yang sangat dibutuhkan guna memperbaiki perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19. Kondisi yang terdisrupsi pada berbagai sektor harus direspons dengan agilitas yang tinggi, inovatif dan tidak mengandalkan kebiasaan yang sudah pernah terjadi. Mencari solusi secara bersama dan memenuhi tuntutan lokal spesifik “holistic”, berbasis sumberdaya, digital, kompetensi inti dan didukung oleh upaya inovatif berkelanjutan.

Menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan terus menyatupadukan langkah sinergitas dari beragam pemangku kepentingan ekonomi tampaknya menjadi tantangan yang perlu terus mendapatkan dukungan, utamanya dalam memastikan beragam kebijakan dan strategi yang ditempuh Pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan dan pemulihan ekonomi dapat berjalan optimal pada tataran praktis.

Upaya untuk terus meningkatkan efektivitas belanja pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat menjadi faktor determinan dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Hal ini sejalan prinsip counter cyclical, di mana ketika perekonomian lesu, belanja pemerintah menjadi andalan untuk mendorong perekonomian.

Salah satu sektor yang sangat terpukul oleh pandemi COVID-19 adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang juga menggerek turunnya perekonomian nasional. Hal ini bisa dipahami karena UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional. Program Pemulihan Ekonomi untuk UMKM sebagai salah satu sasaran program PEN

telah dilakukan melalui beberapa kebijakan antara lain subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian jaminan modal kerja dan insentif perpajakan.

Kita tentunya berharap agar strategi Program PEN melalui pendekatan UMKM dapat menjadi pengarusutamaan bagi seluruh kementerian dan lembaga (K/L) agar secara konsisten mengalokasikan minimal 40 persen pagu anggarannya untuk belanja barang/modal dari UMKM sehingga mendorong sektor UMKM agar dapat tumbuh di tengah krisis akibat pandemi.

Setidaknya ada sejumlah pekerjaan yang perlu menjadi fokus prioritas bagi para pemangku kepentingan, khususnya terkait dengan penyiapan kemampuan dari pelaku UMKM, agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas, bermutu tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan belanja K/L serta pelatihan terkait digitalisasi UMKM.

Kita patut mengapresiasi komitmen pemerintah yang telah menyediakan ruang bagi UMKM untuk masuk dalam e-katalog LKPP. Dengan cara ini, UMKM bisa bersaing dengan menawarkan barang atau jasanya menggunakan sistem tender online. Pengadaan barang atau jasa secara digital akan mengurangi tingkat kecurangan lantaran semua proses transaksinya dilakukan dengan transparan.

Pandemi juga berdampak pada kondisi ketenagakerjaan di tanah air, dengan bertambahnya jumlah pengangguran akibat pandemi COVID-19. Selama pandemi, terdapat 6,9 juta pengangguran, belum termasuk 3,5 juta pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan, dan 3 juta angkatan kerja baru yang setiap tahun membutuhkan pekerjaan, sehingga total kebutuhan lapangan kerja baru mencapai sekitar 13,4 juta.

Kondisi ini menuntut adanya penyerapan tenaga kerja yang dapat dicarikan solusinya dengan mengefektifkan implementasi Program Kartu Prakerja melalui dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Di tengah pandemi COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi nasional, Kartu Prakerja dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat. Program ini diprioritaskan untuk membantu WNI berusia 18 tahun ke atas yang tidak sedang menempuh pendidikan formal, pekerja yang mengalami pemutusan hak, pekerja yang dirumahkan, dan pekerja sektor informal yang usahanya terdampak pandemi.

Program Kartu Prakerja diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pengembangan kompetensi kerja (skilling), peningkatan kompetensi (upskilling), dan alih kompetensi (reskilling) lewat serangkaian pelatihan dan penguatan kompetensi SDM menjadi kunci utama daya saing bangsa di kancah global.

Lancarnya program ini juga diharapkan dapat menjadi pelengkap pendidikan formal dan membantu daya beli masyarakat yang terdampak penghidupannya akibat COVID-19. Untuk itu, dukungan optimal dari pemda sangat diperlukan utamanya melalui sosialisasi Program Kartu Prakerja secara masif kepada seluruh pemangku kepentingan di masing-masing daerah dan menyinergikan program tersebut dengan program pemda lain.

Selain itu, momentum pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dapat dimanfaatkan untuk terus meningkatkan investasi sehingga terjadi aliran dana yang masif melalui FDI (foreign direct investment), DDI (domestic direct investment), dan aktivitas UMKM sehingga momentum pemulihan ekonomi dapat terus terpelihara. Akselerasi reformasi struktural yang kondusif untuk menjaga pemulihan ekonomi perlu terus dipacu agar pemulihan ekonomi dapat berlangsung makin cepat, kuat, dan kokoh.

Kita tentunya berharap berbagai langkah strategis yang telah diambil pemerintah dapat terus menjaga sisi permintaan dan pasokan, utamanya dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi sesuai dengan target yang

ditetapkan, menjaga sisi permintaan melalui stimulus bantuan sosial untuk menggeliatkan konsumsi perlu terus dipantau implementasinya, demikian pula menjaga sisi pasok yang berwujud stimulus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), korporasi, dan BUMN.

Optimisme dan semangat nilai gotong-royong atau sosial kapital serta solidaritas yang merupakan identitas masyarakat Indonesia harus dapat terus dipelihara guna memberikan dukungan dan kekuatan bersama dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Keberhasilan bangsa Indonesia untuk keluar dari dampak pandemi COVID-19 dan menjaga momentum pemulihan ekonomi juga tergantung kedisiplinan masyarakat dalam mewujudkan new normal dengan tidak melakukan tindakan yang kontraproduktif dalam mendukung sistem mitigasi penyelamatan ekonomi, sehingga kita dapat membangun optimisme menjaga pemulihan ekonomi, memastikan strategi besar recovery dan tahapannya dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi dan membangkitkan kejayaan ekonomi Indonesia.

4) Masih Terbatasnya Ketersediaan Infrastruktur Dasar

Infrastruktur dasar adalah sektor yang memiliki karakteristik publik dan kepentingan yang dasar dalam hal sektor ekonomi lainnya, tidak dapat diperjual belikan dan tidak dapat dipisah-pisahkan dalam hal ini baik secara teknis maupun spasial contoh dalam infrastruktur dasar adalah jalan raya, bendungan, kereta api, drainase, dan kanal.

Terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar menjadi masalah yang akan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar, selain terkait dengan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi, hal tersebut juga akan sangat terkait dengan kelancaran investasi di daerah. Oleh karena itu pemerataan Pembangunan infrastruktur masih perlu mendapatkan perhatian pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Fokus permasalahan pokok di bidang infrastruktur, dikaitkan dengan infrastruktur wilayah yang belum merata dan infrastruktur permukiman yang belum optimal.

5) Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan

Kualitas tata kelola pemerintahan ditandai dengan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Opini pengelolaan keuangan, Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dari lima indikator tersebut, yang belum optimal adalah Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Seiring dengan perkembangan permasalahan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang semakin dinamis, terbuka, maka dibutuhkan sebuah birokrasi yang kuat, terpercaya, dan akuntabel. Dalam perkembangan penataan birokrasi pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, masih menghadapi beberapa permasalahan pada aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, dan penataan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan penanganan secara mendasar, terencana dan sistematis

❖ ***Isu Strategis***

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan

penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Berdasarkan kondisi tersebut, maka kondisi pembangunan tahun 2024 menjadi sangat penting dalam perumusan isu strategis. Berikut isi strategis Provinsi Sulawesi Barat.

1) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Isu kemiskinan dan pengangguran juga menjadi fokus dan tujuan Pembangunan berkelanjutan yaitu ; mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun; menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; serta menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata; meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

Provinsi Sulawesi Barat dengan luas wilayah sebesar 16.594,75 Km2 memiliki jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 1.458.606 jiwa. Dari jumlah tersebut terdapat penduduk miskin sebesar 11,92 persen pada tahun 2022. Garis Kemiskinan sebesar Rp.426,977 (Rp/Kapita/Bulan). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 2,09 poin, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,52 poin 22. Jumlah tersebut masih digolongkan kedalam kemiskinan Ekstrem 2,94 persen atau 41.406 Jiwa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mentargetkan pada tahun 2024 sebesar 0 persen Kemiskinan Ekstrem. Daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi adalah Polewali Mandar (6,27 %), Majene (2,87 %), Mamasa (2,30 %).

2) Pemilu, Pilpres dan Pilkada Serentak

Pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar serentak. Pemilu digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, lalu anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, dewan perwakilan daerah (DPD) RI, serta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Sementara, pilkada bakal digelar 27 November 2024. Melalui pilkada, akan dipilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia. Ini akan menjadi pemilihan pertama yang terbesar di Indonesia. Kontestasi Politik membutuhkan dukungan dan sinergi dari Pemerintah Daerah agar pelaksanaannya dapat berjalan sukses.

Di Provinsi Sulawesi barat akan diadakan Pilkada serentak tahun 2024 untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar, Mamasa dan Mamuju Tengah.

3) Ibu Kota Nusantara

Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara. Ibu Kota Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk: Kota berkelanjutan dunia, dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ibu Kota Nusantara akan dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai Visi Indonesia 2045. Dibangun dengan identitas nasional, IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, serta mempercepat Transformasi Ekonomi Indonesia.Pemindahan Ibu Kota Nusantara akan berdampak positif bagi pembangunan di Sulbar. Upaya dan strategi perlu dibuat dalam menangkap peluang tersebut. Secara geografis memiliki kedekatan

dengan lokasi pembangunan IKN karena hanya dipisahkan Selat Makassar sehingga memiliki peran penting menjadi penyangga IKN.

4) Percepatan Penurunan Stunting

Angka prevalensi stunting di Sulawesi Barat yang terus meningkat hingga 35 persen sejak empat tahun terakhir pada tahun 2022 Prevalensi Stunting Sulbar 35 persen, tertinggi kedua setelah NTT. Namun saat ini menjadi Tertinggi Pertama Nasional pasca keluarnya NTT dari perhitungan SSGI. Sehingga, diperlukan Penguatan Aksi Konvergensi Penanganan Stunting lintas sektor.

Penyebab tingginya angka stunting di Sulbar selain tingginya angka perkawinan anak, pemicu lain tingginya angka stunting di Sulbar ialah belum optimalnya pelayanan dan pendampingan kesehatan pada kelompok calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil dan menyusui, serta balita dan batita. Skor pola pangan yang brlum ideal, akses sanitasi dan air bersih yang belum optimal serta belum maksimalnya kolaborasi menguatkan tingginya angka stunting di Sulbar. Semua penyebab angka stunting ini semakin ironis mengingat dukungan pemerintah pusat melalui APBN untuk menangani percepatan penanganan stunting cukup besar yakni Rp 148 miliar.

5) Inflasi Pangan Bergejolak

Upaya bersama perlu diperkuat untuk mengendalikan tekanan inflasi pangan. Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta instansi terkait lainnya telah menginisiasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan sejak awal Agustus 2022 yang lalu. Langkah tersebut merupakan wujud komitmen bersama untuk dapat segera mengatasi tingginya inflasi pangan sehingga menjaga daya beli masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Bank Indonesia juga berkomitmen penuh untuk terus bersinergi dengan Pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan moneter difokuskan untuk stabilitas (pro-stability), sementara 4 (empat) kebijakan lainnya, yakni makroprudensial, digitalisasi system pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth). Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah diperkuat sebagai bagian dari upaya mengendalikan inflasi melalui intervensi di pasar valas yang didukung dengan penguatan operasi moneter. Hal ini disampaikan pada kesempatan yang sama oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, yang secara khusus juga menyampaikan apresiasi atas sinergi erat seluruh pemangku kebijakan dalam melakukan berbagai extra efforts pengendalian inflasi.

6) Penataan Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan tulang punggung dan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah Negara dimana Reformasi Birokrasi diperlukan untuk membangun pondasi yang diperlukan. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek Kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia Aparatur. Penguatan Penerapan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi oleh seluruh Perangkat Daerah, dan Pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-government) yaitu : Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Ketatalaksanaan, Penguatan

Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

7) Keberlanjutan Lingkungan Hidup

Mengoptimalkan kebijakan Pembangunan rendah Kabon, program Ekonomi Biru, Perubahan Iklim dll. Konsekuensi dari perubahan iklim saat ini antara lain, kekeringan hebat, kelangkaan air, kebakaran hebat, naiknya permukaan laut, banjir, pencairan es kutub, badai dahsyat dan penurunan keanekaragaman hayati. Dalam laporan PBB tahun 2018, ribuan ilmuwan dan peninjau pemerintah sepakat bahwa membatasi kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5°C akan membantu kita menghindari dampak iklim terburuk dan mempertahankan iklim yang layak huni. Namun jalur emisi karbon dioksida saat ini dapat meningkatkan suhu global sebanyak 4,4°C pada akhir abad ini.

8) Penanganan Bencana

Tingginya potensi bencana di Sulawesi Barat seperti, gempa bumi, tanah longsor, banjir, dll. Perlu menjadi perhatian dan diperlukan upaya dan strategi pembangunan yang lebih adaptif, responsif, antisipatif dalam mitigasi bencana. Gempa bumi berkekuatan 6,2 yang mengguncang Mamuju dan Majene di Sulawesi Barat menyebabkan korban meninggal dunia 109 jiwa. Berdasarkan laporan BNPB per 15 Maret 2021 dampak gempa di Sulawesi Barat menyebabkan kerusakan bangunan sektor permukiman sebanyak 15.522 unit. Di Kabupaten Mamuju, rumah rusak berat sebanyak 2.054 unit, rusak sedang 3.843 unit, dan rusak ringan 5.526 unit.

Pasca bencana di Mamuju juga perlu dilakukan kegiatan pelatihan-pelatihan mitigasi bencana kepada masyarakat agar mendirikan rumah yang ramah gempa. Di beberapa daerah tertentu yang rawan gempa, ada kearifan lokal masyarakat yang mendirikan rumah menggunakan material fleksibel seperti kayu dan bambu yang tidak mudah roboh saat diguncang gempa. Selain gempa bumi di Provinsi Sulawesi Barat juga sering terjadi banjir bandang. Intensitas hujan yang tinggi membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Mamuju, Majene dan Polewali Mandar Sulawesi Barat (Sulbar) diterjang banjir bandang hingga longsor. Hal ini juga mengakibatkan air sungai di sejumlah wilayah meluap dan banjir merendam pemukiman warga.

Selain pemukiman warga, banjir juga merendam jalan Trans Sulawesi sejauh 300 meter, dengan ketinggian air mencapai 20 centimeter yang mengakibatkan arus lalu lintas tersendat. Kondisi tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah provinsi Sulawesi Barat sehingga perlu ada penanganan cepat dan tindakan preventif untuk mencegah melausnya terjadinya bencana banjir. Tingginya potensi bencana di Sulawesi Barat seperti, gempa bumi, tanah longsor, banjir, dll.

Selain gempa bumi di Provinsi Sulawesi Barat juga sering terjadi banjir bandang. Intensitas hujan yang tinggi membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Mamuju, Majene dan Polewali Mandar Sulawesi Barat (Sulbar) diterjang banjir bandang hingga longsor. Hal ini juga mengakibatkan air sungai di sejumlah wilayah meluap dan banjir merendam pemukiman warga. Selain pemukiman warga, banjir juga merendam jalan Trans Sulawesi sejauh 300 meter, dengan ketinggian air mencapai 20 centimeter yang mengakibatkan arus lalu lintas tersendat. Kondisi tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah provinsi Sulawesi Barat sehingga perlu ada penanganan cepat dan tindakan preventif untuk mencegah melausnya terjadinya bencana banjir.

b. Visi Dan Misi Kepala Daerah

❖ *Visi Kepala Daerah*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 Kabupaten Polewali Mandar merupakan penjabaran dari naskah visi, misi dan program prioritas pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2019-2024 yang disampaikan di hadapan Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar saat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.

Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 Kabupaten Polewali Mandar merupakan penjabaran dari visi, misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam periode masa jabatan selama lima tahun.

Selanjutnya dengan memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Polewali Mandar serta budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maka Visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk periode RPJMD tahun 2019-2024 sesuai dengan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah **"Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera".** Rumusan visi mencakup dua pokok visi didalamnya yaitu Maju dan Rakyat Sejahtera. Kedua pokok visi tersebut saling terkait satu sama lain untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Selanjutnya Visi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ✓ **Polewali Mandar Maju**
  Kondisi daerah yang menggambarkan tentang keadaan yang lebih baik dari masa sebelumnya maupun lebih terdepan jika dibandingkan dengan daerah lain terutama pada aspek kemandirian ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan.
- ✓ **Rakyat Sejahtera**
  Kondisi Masyarakat yang memiliki taraf hidup yang lebih baik dan sumberdaya manusia yang berkualitas ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia, menurunnya angka kemiskinan, serta terpenuhinya dan tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat.

❖ *Misi Kepala Daerah*

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar tersebut, maka dalam RPJMD ditetapkan empat misi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

- ✓ Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius;
- ✓ Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah;
- ✓ Mengembangkan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan;
- ✓ Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern.

Keterkaitan antara empat rumusan misi dengan dua pokok visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar disajikan pada Tabel 19 di bawah ini :

Tabel 1.19.
Keterkaitan Misi dengan Pokok Visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2019-2024

No.	Misi	Pokok Visi
1.	Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius	Rakyat Sejahtera
2.	Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah	Polewali Mandar Maju
3.	Mengembangkan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan	Polewali Mandar Maju
4.	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern	Polewali Mandar Maju

Sumber : RPJMD Kab. Polewali Mandar 2019-2024

❖ ***Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan***

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi serta merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Bersifat idealis dan mempunyai jangkauan ke depan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, serta didasarkan pada isu-isu stratejik. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integrasi dalam proses perencanaan strategis.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategik juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Sebuah strategi dapat dirumuskan untuk mencapai satu sasaran, dapat juga untuk mewujudkan lebih dari satu sasaran dan merupakan langkah- langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan perwujudan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun ke depan. Dengan mengacu pada visi dan misi di atas, dirumuskan tujuan, sasaran, Strategi dan Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk tahun 2019-2024 selengkapnya disajikan pada matriks berikut ini :

Tabel 1.20.
Rumusan Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2019 - 2024

VISI : POLEWALI MANDAR MAJU, RAKYAT SEJAHTERA		
MISI 1 : Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Lebih Baik dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Religius		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Meningkatnya taraf hidup dan kualitas sumber daya masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan sosial
	Berkurangnya pengangguran	Menciptakan tenaga kerja terampil dan kompeten berdasarkan kebutuhan lapangan kerja yang tersedia
	Meningkatnya ketahanan pangan	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
	Berkembangnya usaha ekonomi lokal	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkan usaha ekonomi desa
	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Meningkatkan akses dan manajemen pendidikan
	Meningkatnya derajat kesehatan	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
		Meningkatkan Minat Masyarakat Gemar Berolahraga
	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan perlindungan anak
MISI 2 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Meningkatkan daya saing ekonomi yang merata dan berkualitas	Meningkatnya daya saing usaha industri pengolahan dan perdagangan	Peningkatan produksi usaha industri pengolahan dan pengelolaan usaha perdagangan
	Meningkatnya daya saing usaha pariwisata daerah	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata daerah
	Meningkatnya iklim investasi daerah	Pengembangan sentra -sentra pusat ekonomi baru dan berkembang
	Meningkatnya pemerataan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	Pengembangan inovasi intensifikasi dan ekstensifikasi sistem pertanian terpadu
MISI 3 : Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan sistem transportasi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta pelayanan transportasi
	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Mendorong peningkatan aksesibilitas pusat-pusat kegiatan
	Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan irigasi
	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur permukiman
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup
MISI 4 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern		

Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kualitas reformasi birokasi pemerintah daerah
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	

Sumber : Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Polewali Mandar 2019-2024

Tabel 1.21
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja 2019-2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL : TAHUN 2018	TARGET / CAPAIAN					
			TAHUN 2019 (Capaian)	TAHUN 2020 (Capaian)	TAHUN 2021 (Capaian)	TAHUN 2022 (Capaian)	TAHUN 2023 (Target)	TAHUN 2024 (Target)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Tujuan : Meningkatnya taraf hidup dan kualitas sumber daya masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	63,14	63,74	63,84	64,23	64,79	64,89	65,49
Sasaran 1 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Angka kemiskinan	15,97%	15,00%	15,26%	15,68%	16,39%	16,05%	15,71%
Sasaran 2 : Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,97%	3,01%	3,15%	3,38%	2,16%	2,10%	2,00%
Sasaran 3 : Meningkatnya ketahanan pangan	Skor pola pangan harapan	79,02	86,32	86,40	87,87	87,89	88,17	88,53
	Pengeluaran konsumsi rata- rata perkapita (Rp)	699.721	830.977	834.110	804.358	883.870	893.662	919.447
Sasaran 4 : Berkembangnya usaha ekonomi lokal	Persentase desa maju dan mandiri	1,39%	5,56%	8,33%	5,56%	31,25%	32,64%	34,03%
Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	7,24	7,40	7,41	7,44	7,60	7,69	7,78
	Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	13,02	13,05	13,06	13,38	13,39	13,48	13,57
Sasaran 6 : Meningkatnya derajat kesehatan	Prevalensi Stunting	32,90%	39,40%	-	36,00%	39,26%	37,14%	35,02%
	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)	61,97	62,18	62,38	62,53	62,68	62,86	63,04
Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,48	91,75	90,02	91,56	92,00	92,13	92,26
	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Tanpa predikat	Pratama	Madya
Tujuan : Meningkatnya daya saing ekonomi yang merata dan berkualitas	Persentase pertumbuhan ekonomi	7,34%	6,16%	-1,57%	1,86%	3,59%	4,04%	5,50%
Sasaran 1 : Meningkatnya daya saing usaha industri pengolahan dan perdagangan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	7,42%	7,35%	0,04%	5,54%	5,33%	6,63%	7,37%
	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	7,55%	4,80%	-2,45%	3,65%	3,31%	4,77%	5,58%
Sasaran 2 : Meningkatnya daya saing usaha pariwisata daerah	Jumlah wisatawan (orang)	488.299	450.968	800.300	223.447	389.047	400.000	400.010

Sasaran 3 : Meningkatnya investasi daerah	Nilai realisasi investasi daerah:	148.306.017	494.552. 801.000	78.957. 486.000	79.507. 530.000	186.523. 356.799	373.046. 713.598	59.570. 070.397
Sasaran 4 : Meningkatnya pemerataan pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	8,00%	6,27%	0,84%	1,42%	4,67%	4,84%	5,09%
Tujuan : Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur	Indeks Infrastruktur	63,92	78,13	82,51	87,63	88,73	90,17	91,52
Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan sistem transportasi	Angka kecelakaan lalu lintas (kejadian)	233	256	168	178	218	120	90
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	46,74%	63,83%	73,29%	78,95%	74,35%	75,63%	76,91%
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	73,45%	78,86%	81,50%	73,04%	64,66%	66,94%	69,22%
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Indeks infrastruktur permukiman	66,44%	80,13%	83,67%	86,87%	88,13%	89,65%	91,14%
Tujuan : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	63,50%	68,55%	69,22%	66,63%	65,58%	67,67%	68,19%
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas kelestarian lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	63,50%	68,55%	69,22%	66,63%	65,58%	67,67%	68,19%
Tujuan : Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern	Indeks Reformasi Birokrasi	58,02	62,18	63,09	67,21	69,14	71,92	74,70
	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B 66,12	BB 70,17	BB 70,76	BB 71,95	BB 72,16	BB 73,67	BB 75,18
	Opini pengelolaan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	3,038	3,030	3,040	3,110	3,530	3,650	3,780
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,51	2,57	3,30	2,71	3,58	3,64	3.70
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik

Sumber : Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Polewali Mandar 2019-2024

Tabel 1.22.
Arah Kebijakan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 - 2024

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	ARAH KEBIJAKAN					
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	MEWUJUDKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN RELIGIUS									
		MeningkatnyaTaraf Hidup dan Kualitas Sumber Daya Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya KesejahteraanSosial	Peningkatan pelayanan, pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan sosial kepada masyarakat miskin	Peningkatan pelayanan, pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan sosial kepada masyarakat miskin	Peningkatan pelayanan, pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan sosial kepada masyarakat miskin	Penguatan bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dantepat sasaran	Penguatan bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dantepat sasaran	Penguatan bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dantepat sasaran
			Berkurangnya Pengangguran	Menciptakan Tenaga Kerja Terampil dan Kompoten Berdasarkan Kebutuhan Lapangan KerjaYang Tersedia	Peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja	Peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja
					Penciptaan perluasan lapangan kerjasektor formal	Penciptaan perluasan lapangan kerjasektor formal	Penciptaan perluasan lapangan kerjasektor formal	Penciptaan perluasan lapangan kerjasektor formal	Penciptaan perluasan lapangan kerjasekctor formal	Penciptaan perluasan lapangan kerjasektor formal
			Berkembangnya Usaha EkonomiLokal	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Menumbuhkan Usaha EkonomiDesa	Pengembanganusaha dan inovasi berbasis potensi unggulan	Pengembangan usaha dan inovasi berbasispotensi unggulan	Pengembangan usaha dan inovasi berbasispotensi unggulan	Pengembangan usaha dan inovasi berbasispotensi unggulan	Pengembangan usaha dan inovasi berbasispotensi unggulan	Pengembangan usaha dan inovasi berbasispotensi unggulan
					Perluasan kesempatan masyarakat untuk bertransmigrasilokal	Perluasan kesempatan masyarakat untuk bertransmigrasilokal	Perluasan kesempatan masyarakat untuk bertransmigrasilokal	Perluasan kesempatan masyarakat untuk bertransmigrasilokal	Perluasan kesempatan masyarakat untuk bertransmigrasilokal	Perluasan kesempatan masyarakat untuk bertransmigrasilokal
			Meningkatnya Ketahanan Pangan	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha pertanian dan pangan masyarakat	Peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaku usahapertanian dan pangan masyarakat	Peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha pertanian dan pangan masyarakat	Peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha pertanian dan pangan masyarakat	Peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha pertanian dan pangan masyarakat	Peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha pertanian dan pangan masyarakat

			Meningkatnya Kualitas Pendidikan	MeningkatkanAkses dan Manajemen Pendidikan	Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas	Peningkatanakses pendidikan	Peningkatanakses pendidikan	Peningkatanakses pendidikan
					Penataan pengelolaan pendidikan anakusia dini, pendidikan masyarakat dan pendidikan dasar	Penataan pengelolaan pendidikan anakusia dini, pendidikan masyarakat dan pendidikan dasar	Penataan pengelolaan pendidikan anakusia dini, pendidikan masyarakat dan pendidikan dasar	Pemerataansarana prasarana pendidikan	Pemerataansarana prasarana pendidikan	Pemerataansarana prasarana pendidikan
					Peningkatan mutu sumber daya manusia pendidikan	Peningkatan mutu sumber daya manusiapendidikan	Peningkatan mutu sumber daya manusiapendidikan	Peningkatankualitas pendidikan	Peningkatankualitas pendidikan	Peningkatankualitas pendidikan
			MeningkatnyaDerajat Kesehatan	Meningkatkan Mutu PelayananKesehatan	Peningkatankualitas pelayanan kesehatan Masyarakat	Peningkatankualitas pelayanan kesehatan Masyarakat	Peningkatankualitas pelayanan kesehatan Masyarakat	Peningkatan akses layanankesehatan	Peningkatan akses layanankesehatan	Peningkatan akses layanankesehatan
					Peningkatankualitas gizi masyarakat	Peningkatankualitas gizi masyarakat	Peningkatankualitas gizi masyarakat	Peningkatan sarana prasarana kesehatan	Peningkatan sarana prasarana kesehatan	Peningkatan sarana prasarana kesehatan
					Peningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penyakit menular dan tidak menular	Peningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penyakit menular dan tidak menular	Peningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penyakit menular dan tidak menular	Penoingkatan kualitas sumber daya kesehatan	Penoingkatan kualitas sumber daya kesehatan	Penoingkatan kualitas sumberdaya kesehatan
					Peningkatan kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersihdan sehat	Peningkatan kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersihdan sehat	Peningkatan kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersihdan sehat			
					Peningkatan kualitas sumberdaya kesehatan	Peningkatan kualitas sumberdaya kesehatan	Peningkatan kualitas sumberdaya kesehatan			

					Peningkatan kualitas pembinaan olahraga	Peningkatan kualitas pembinaan olahraga	Peningkatan kualitas pembinaan olahraga	Peningkatan kualitas pembinaan olahraga	Peningkatan kualitas pembinaan olahraga	Peningkatan kualitas pembinaan olahraga
				MeningkatkanMinat Masyarakat Gemar Berolahraga	Peningkatankualitas keluarga berencana	Peningkatankualitas keluarga berencana	Peningkatankualitas keluarga berencana	Peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk dan layanan keluarga berencana	Peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk dan layanan keluarga berencana	Peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk dan layanan keluarga berencana
			Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan danAnak	Meningkatkan Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2	**MEMPERKUAT KEMANDIRIAN EKONOMI BERBASIS POTENSI UNGGULAN WILAYAH**									
	MeningkatnyaDaya Saing Ekonomi yang Merata dan Berkualitas	Meningkatnya Pemerataan Pertumbuhan Sektor Pertaniandan Perikanan	Pengembangan Inovasi, Intensifikasi dan Ekstentifikasi Sistem Pertanian Terpadu	Pengembangan sistem pertanian mandiri terintegrasi dan partisipatif berbasis kawasan	Pengembangan sistem pertanian mandiri terintegrasi dan partisipatif berbasis kawasan	Pengembangan sistem pertanian mandiri terintegrasi dan partisipatif berbasis kawasan	Pengembangan Inovasi Sistem Pertanian Mandiri Terintegrasi	Pengembangan Inovasi, Intensifikasi danEkstensifikasi Sistem Pertanian Mandiri Terintegrasi	Pengembangan Inovasi, Intensifikasi danEkstensifikasi Sistem Pertanian Mandiri Terintegrasi	
				Pengembangan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha pertaniandan perikanan	Pengembangan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha pertaniandan perikanan	Pengembangan kapasitas sumber daya manusia pelakuusaha pertaniandan perikanan				
				Pengembangan sarana dan prasarana pertanian berbasis teknologi dan inovasi	Pengembangan sarana dan prasarana pertanian berbasis teknologi dan inovasi	Pengembangan sarana dan prasarana pertanian berbasis teknologi dan inovasi				

			Meningkatnya Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan	Peningkatan Produksi UsahaIndustri Pengolahan dan Pengelolaan Usaha Perdagangan	Peningkatan kapasitas usaha industri mikro, kecil dan menengah	Peningkatan kapasitas usaha industri mikro, kecil dan menengah	Peningkatan kapasitas usaha industri mikro, kecil dan menengah	Pengembangan Pemasaran Produk Secara Terpadu Berbasis Teknologi Digital dan Pengembangan Kapasitas Usaha Industri Mikro, Kecil danMenengah Serta Peningkatan Promosi Produk	Pengembangan Pemasaran Produk Secara Terpadu Berbasis Teknologi Digital dan Pengembangan Kapasitas Usaha Industri Mikro, Kecil danMenengah Serta Peningkatan Promosi Produk	Pengembangan Pemasaran Produk Secara Terpadu Berbasis Teknologi Digital dan Pengembangan Kapasitas Usaha Industri Mikro, Kecil danMenengah
					Peningkatan bantuan saranaprasarana usaha dan kelembagaan usaha	Peningkatan bantuan sarana prasarana usaha dan kelembagaan usaha	Peningkatan bantuan sarana prasarana usaha dan kelembagaan usaha			
					Peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia dengan pendampingan langsung	Peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia dengan pendampingan langsung	Peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia dengan pendampingan langsung			
					Pengembangan pemasaran produk secara terpadu berbasis teknologi informasi	Pengembangan pemasaran produk secara terpadu berbasis teknologi informasi	Pengembangan pemasaran produk secara terpadu berbasis teknologi informasi			
					Penguatan permodalan usaha dan kemitraan usaha	Penguatan permodalan usaha dan kemitraan usaha	Penguatan permodalan usaha dan kemitraan usaha			
			Meningkatnya Investasi Daerah	Pengembangan Sentra-Sentra Pusat Ekonomi Baru dan Berkembang	Pemberian kemudahan berinvestasi	Pemberian kemudahan berinvestasi	Pemberian kemudahan berinvestasi	Pemberian Kemudahan Berinvestasi dan PeningkatanKualitas Promosi	Pemberian Kemudahan Berinvestasi dan PeningkatanKualitas Promosi	Pemberian Kemudahan Berinvestasidan PeningkatanKualitas Promosi

			Meningkatnya Daya Saing Usaha PariwisataDaerah	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata Daerah	Pengembangan destinasi wisata unggulan	Pengembangan destinasi wisata unggulan	Pengembangan destinasi wisata unggulan	Pengembangan destinasi wisata unggulan	Pengembangan destinasi wisata unggulan	Pengembangan destinasi wisata unggulan
3	**MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS DAN TERINTEGRASI SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN**									
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta pelayanan transportasi	Pengembangan sarana dan prasarana sertapelayanan lalu lintas angkutan jalan	Pengembangan sarana dan prasarana serta pelayanan lalu lintas angkutan jalan	Pengembangan sarana dan prasarana serta pelayanan lalu lintas angkutan jalan	Pengembangan sarana dan prasarana serta pelayanan lalu lintas angkutan jalan	Pengembangan sarana dan prasarana serta pelayanan lalu lintas angkutan jalan	Pengembangan sarana dan prasarana serta pelayanan lalu lintas angkutan jalan
			Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Mendorong peningkatan aksesibilitaspusat-pusatkegiatan	Peningkatan konektivitas pada pusat kegiatan wilayah danpusat pelayanan kawasan	Peningkatan konektivitas pada pusat kegiatan wilayah danpusat pelayanan kawasan	Peningkatan konektivitas pada pusat kegiatan wilayah danpusat pelayanankawasan	Peningkatan pemerataan pembangunan infrastuktur jalan.	Peningkatan pemerataan pembangunan infrastuktur jalan.	Peningkatan pemerataan pembangunan infrastuktur jalan.
			Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi	Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan irigasi	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan kabupaten	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan kabupaten	Pengembangan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan kabupaten	Peningkatan dukungan operasional dan pemeliharaan jaringan irirgasi	Peningkatan dukungan operasional dan pemeliharaan jaringan irirgasi	Peningkatan dukungan operasional dan pemeliharaan jaringan irirgasi
					Pemenuhan akses air minumdan sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan	Pemenuhan akses air minumdan sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan	Pemenuhan akses air minumdan sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan	Pemenuhan akses air minumdan sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan	Pemenuhan akses air minumdan sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan	Pemenuhan akses air minumdan sanitasi yang layak, aman dan berkelanjutan
					Peningkatan kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumahtangga dan sampah sejenisrumah tangga	Peningkatan kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumahtangga dan sampah sejenis rumah tangga	Peningkatan kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumahtangga dan sampah sejenis rumah tangga	Peningkatan kinerja pengelolaan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenisrumah tangga	Peningkatan kinerja pengelolaan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenisrumah tangga	Peningkatan kinerja pengelolaan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenisrumah tangga
			Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	Meningkatkan pembangunandan pemeliharaan	Penyehatan lingkungan permukiman	Penyehatan lingkungan permukiman	Penyehatan lingkungan permukiman	Penataan lingkungan permukiman	Penataan lingkungan permukiman	Penataan lingkungan permukiman

				infrastruktur permukiman	Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang
					Pemenuhan perumahan yang layak huni	Pemenuhan perumahan yang layak huni	Pemenuhan perumahan yang layak huni	Pemenuhan perumahan yang layak huni	Pemenuhan perumahan yang layak huni	Pemenuhan perumahan yang layak huni
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	Pengendalian pencemaran udara dan air	Pengendalian pencemaran udara dan air	Pengendalian pencemaran udara dan air	Pengendalian pencemaran air	Pengendalian pencemaran air	Pengendalian pencemaran air
								Pengendalian pencemaran udara	Pengendalian pencemaran udara	Pengendalian pencemaran udara
					Peningkatan fungsi Kawasan hijau	Peningkatan fungsi Kawasan hijau	Peningkatan fungsi Kawasan hijau	Peningkatan ruang terbukahijau pada kawasan perkotaan	Peningkatan ruang terbukahijau pada kawasan perkotaan	Peningkatan ruang terbukahijau pada kawasan perkotaan
4	**MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DAN MODERN**									
		Terwujudnya pemerintahanyang bersih, akuntabel dan modern	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PemerintahanDaerah	Meningkatkan kualitas reformasi birokasi pemerintah daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, perencanaan perangkat daerah dan implementasi manajemen kinerja pemerintah daerah, perangkat daerah dan aparatur	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, perencanaan perangkat daerah dan implementasi manajemen kinerja pemerintah daerah, perangkat daerah dan aparatur	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, perencanaan perangkat daerah dan implementasi manajemen kinerja pemerintah daerah, perangkat daerah dan aparatur	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, perencanaan perangkat daerah dan implementasi manajemen kinerja pemerintah daerah, perangkat daerah dan aparatur	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, perencanaan perangkat daerah dan implementasi manajemen kinerja pemerintah daerah, perangkat daerah dan aparatur	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, perencanaan perangkat daerah dan implementasi manajemen kinerja pemerintah daerah, perangkat daerah dan aparatur

					Peningkatan tertib penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengadaan barang dan jasaserta manajemen aset daerah	Peningkatan tertib penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengadaan barang dan jasaserta manajemen aset daerah	Peningkatan tertib penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengadaan barang dan jasaserta manajemen aset daerah	Peningkatan tertib penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengadaan barang dan jasaserta manajemen aset daerah	Peningkatan tertib penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengadaan barang dan jasaserta manajemen aset daerah	Peningkatan tertib penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, pengadaan barang dan jasaserta manajemen aset daerah
					Peningkatan pengawasan pemerintah daerah	Peningkatan pengawasan pemerintah daerah	Peningkatan pengawasan pemerintah daerah	Peningkatan pengawasan pemerintah daerah	Peningkatan pengawasan pemerintah daerah	Peningkatan pengawasan pemerintah daerah
					Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dannon perizinan	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dannon perizinan	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dannon perizinan	peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien,dan terpercaya	peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya	peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya
					Peningkatan kualitas keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, kebencanaan serta stabilitas sosial, ekonomidan politik	Peningkatan kualitas keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, kebencanaan serta stabilitas sosial, ekonomidan politik	Peningkatan kualitas keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, kebencanaan serta stabilitas sosial, ekonomidan politik	Peningkatan kualitas keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, pelayanan trasnportasi kebencanaan serta stabilitas sosial, ekonomidan politik	Peningkatan kualitas keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, pelayanan transportasi, kebencanaan serta stabilitas sosial, ekonomidan politik	Peningkatan kualitas keamanan, ketenteraman, ketertiban umum, pelayanan transportasi kebencanaan serta stabilitas sosial, ekonomidan politik

					Peningkatan kinerja aparaturmelalui peningkatan kompetensi dan manajemen kepegawaian pemerintah daerah	Peningkatan kinerja aparaturmelalui peningkatan kompetensi dan manajemen kepegawaian pemerintah daerah	Peningkatan kinerja aparaturmelalui peningkatan kompetensi dan manajemen kepegawaian pemerintah daerah	penerapan disiplin, penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) dalam birokrasi	penerapan disiplin, penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) dalam birokrasi	penerapan disiplin, penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) dalam birokrasi
					Peningkatan tata kelola kebijakan, koordinasi, dan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Peningkatan tata kelola kebijakan, koordinasi, dan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Peningkatan tata kelola kebijakan, koordinasi, dan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Peningkatan tata kelola kebijakan, koordinasi, dan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Peningkatan tata kelola kebijakan, koordinasi, dan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Peningkatan tata kelola kebijakan, koordinasi, dan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
					Peningkatan manajemen perkantoran, sarana prasarana dan disiplin aparatur	Peningkatan manajemen perkantoran, sarana prasarana dan disiplin aparatur	Peningkatan manajemen perkantoran, sarana prasarana dan disiplin aparatur	Peningkatan manajemen perkantoran, sarana prasarana dan disiplin aparatur	Peningkatan manajemen perkantoran, sarana prasarana dan disiplin aparatur	Peningkatan manajemen perkantoran, sarana prasarana dan disiplin aparatur

Sumber : Dokumen Perubahan RPJMD Kab. Polewali Mandar 2019-2024

❖ ***Prioritas Daerah***

Memperhatikan rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, maka ditetapkan Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 sebagai berikut :

- ✓ Pemulihan Ekonomi;
- ✓ Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat;
- ✓ Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia;
- ✓ Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pemukiman yang Berkelanjutan;
- ✓ Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program pembangunan daerah merupakan upaya yang hendak dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan prioritas dan sasaran. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Program pembangunan daerah selanjutnya akan menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, dan merupakan pernyataan program kepala daerah Kabupaten Polewali Mandar selama periode tahun 2019-2024. Penetapan program pembangunan daerah yang disesuaikan dengan misi adalah sebagai berikut :

➢ **Misi : Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat Yang Lebih Baik Dan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Religius**

a) Tujuan : Meningkatnya Taraf Hidup dan Kualitas Sumber Daya Masyarakat

1) Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

- ✓ Program Rehabilitasi Sosial
- ✓ Program Pemberdayaan Sosial
- ✓ Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- ✓ Program Penanganan Bencana
- ✓ Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
- ✓ Program Peningkatan Kerjasama Desa

2) Sasaran : Berkurangnya Pengangguran

- ✓ Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- ✓ Program Penempatan Tenaga Kerja
- ✓ Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

3) Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Pangan

- ✓ Program Pengelolaan Sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
- ✓ Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat
- ✓ Program Penanganan Kerawanan Pangan

4) Sasaran : Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal

- ✓ Program Pemberdyaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- ✓ Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- ✓ Program Perencanaan dan kawasan Transmigrasi
- ✓ Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

5) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pendidikan

- ✓ Program Pengelolaan Pendidikan
- ✓ Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

6) Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan

- ✓ Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- ✓ Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman
- ✓ Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan
- ✓ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- ✓ Program Pengendalian Penduduk
- ✓ Program Pembinaan Keluarga Berencana
- ✓ Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
- ✓ Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- ✓ Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

7) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

- ✓ Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- ✓ Program Pemenuhan Hak Anak

➢ **Misi : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah**

a) Tujuan : Meningkatnya Daya Saing Ekonomi yang Merata dan Berkualitas

1) Sasaran : Meningkatnya Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan

- ✓ Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- ✓ Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- ✓ Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM)
- ✓ Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- ✓ Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

2) Sasaran : Meningkatnya Daya Saing Usaha Pariwisata Daerah

- ✓ Program Pemasaran Pariwisata
- ✓ Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- ✓ Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- ✓ Program Pengembangan Kebudayaan
- ✓ Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- ✓ Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- ✓ Program Pengelolaan Permuseuman

3) Sasaran : Meningkatnya Investasi Daerah

- ✓ Program Promosi Penanaman Modal
- ✓ Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

4) Sasaran : Meningkatnya Pemerataan Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan

- ✓ Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- ✓ Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- ✓ Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- ✓ Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- ✓ Program Perizinan Usaha Pertanian
- ✓ Program Penyuluhan Pertanian
- ✓ Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- ✓ Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- ✓ Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- **Misi : Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas Dan Terintegrasi Serta Berwawasan Lingkungan**

a) Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur

1) Sasaran : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi

- ✓ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

2) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

- ✓ Program Penyelenggaraan Jalan

3) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi

- ✓ Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

4) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman

- ✓ Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- ✓ Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- ✓ Program Kawasan Permukiman
- ✓ Program Pengembangan Perumahan
- ✓ Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- ✓ Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
- ✓ Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
- ✓ Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

b) Tujuan : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

1) *Sasaran : Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup*

- ✓ Program Pengelolaan Persampahan
- ✓ Program pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup
- ✓ Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- ✓ Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- ✓ Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- ✓ Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- ✓ Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- ✓ Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

- **Misi : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas Dan Modern**

a) Tujuan : Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Modern

1) Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

2) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

- ✓ Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- ✓ Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- ✓ Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- ✓ Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- ✓ Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- ✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- ✓ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- ✓ Program Penyelenggaraan Pengawasan
- ✓ Program Perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- ✓ Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

- ✓ Program Informasi dan Komunikasi Publik
- ✓ Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- ✓ Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- ✓ Program Pengelolaan Arsip
- ✓ Program Pelayanan Penanaman Modal
- ✓ Program Pendaftaran Penduduk
- ✓ Program Pencatatan Sipil
- ✓ Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- ✓ Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- ✓ Program Pencegahan,Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- ✓ Program Penanggulangan Bencana
- ✓ Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Dan Etika Serta Budaya Politik
- ✓ Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- ✓ Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
- ✓ Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- ✓ Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- ✓ Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- ✓ Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- ✓ Program Kepegawaian Daerah
- ✓ Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- ✓ Program Perekonimian dan Pembangunan
- ✓ Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- ✓ Program Pembinaan Perpustakaan
- ✓ Program Administrasi Pemerintahan Desa
- ✓ Program penelitian dan pengembangan daerah
- ✓ Program Penataan Bangunan Gedung
- ✓ Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- ✓ Program Penatagunaan Tanah

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Rumusan tema pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar selain memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu strategis, juga mempertimbangkan keselarasan dengan tema pembangunan nasional dan provinsi. Pada Rancangan RKP tahun 2024 dengan tema pembangunan nasional **"Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan"**.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat merumuskan tema pembangunan tahun 2024 adalah **"Peningkatan Ekonomi Inklusif Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia"** Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap peningkatan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan dan peningkatan daya saing sumber daya manusia di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar merumuskan Tema pembangunan RKPD tahun 2024 adalah : **"Pengembangan Ekonomi Yang Inklusif Untuk Kesejahteraan Rakyat"**. Pengembangan ekonomi yang inklusif yang dimaksud adalah pengembangan

ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

Pengembangan Ekonomi yang inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat yang ada. pertumbuhan ekonomi yang disertai stratifikasi ekonomi yang tinggi membuat pertumbuhan itu sendiri tidak berkelanjutan. Dengan menerapakan prinsip inkulisifitas maka kita memastikan seluruh Masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap penggunaan infrastruktur kapabilitas sumber daya manusia yang adil dan berkualitas.

Kesejahteraan rakyat yang dimaksud adalah kondisi masyarakat yang memiliki taraf hidup yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas yang dintandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia, menurunnya angka kemiskinan serta terpenuhinya dan tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat. Pengembangan ekonomi yang inklusif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan visi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 yaitu Polewali Mandar maju, rakyat sejahtera.

Berdasarkan isu strategis dan tema pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 maka Prioritas Pembangunan tahun 2023 adalah :

1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2) Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting;
3) Pemerataan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4) Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan;
5) Pemantapan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tabel 1.23.
Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI SULAWESI BARAT	PRIORITAS KABUPATEN POLEWALI MANDAR
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan Daerah	1. Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		2. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	3. Peningkatan Kualitas SDM
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	4. Pemerataan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

6 . Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa	5. Pemantapan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sumber : RKPD Polewali Mandar 2024

Tabel 1.24.
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

No.	Prioritas Kabupaten PolewaliMandar	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)	Kondisi KinerjaAwal RPJMD (Tahun 2018)	Target Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	**Peningkatan Kualitas SDM**	**Meningkatnya Kualitas Pendidikan**		**Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**	**7,24 Tahun**	**7,78 Tahun**	
				Harapan Lama Sekolah (HLS)	**13,02 Tahun**	**13,57 Tahun**	
			Program PengelolaanPendidikan	Persentase APK PAUD	75,00%	88,00%	Dinas Pendidikandan Kebudayaan
				Persentase APK SD/MI	100,00%	100,00%	Dinas Pendidikandan Kebudayaan
				Persenatse APK SMP/MTs	100,00%	100,00%	Dinas Pendidikandan Kebudayaan
				Persentase APM SD/MI	100,00%	100,00%	Dinas Pendidikandan Kebudayaan
				Persentase APM SMP/MTs	77,80%	92,50%	Dinas Pendidikandan Kebudayaan
				Persentase angka putus sekolah SD/MI	0,10%	0,06%	Dinas Pendidikandan Kebudayaan
				Persentase angka putus sekolah SMP/MTs	0,44%	0,30%	Dinas Pendidikandan Kebudayaan
				Persentase tenaga pendidik yang mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah	0,00%	100,00%	Dinas Pendidikandan Kebudayaan
			Program Pendidik danTenaga Kependidikan	Persenatse Guru SD/SMP memenuhistandar kompetensi	86%	89%	Dinas Pendidikandan Kebudayaan
		MeningkatnyaDerajat Kesehatan		**Prevalensi Stunting**	**38,20%**	**21,12%**	
				Angka Harapan Hidup (AHH)	**61,97 Tahun**	**63,04 Tahun**	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Persentase puskesmas dengan statusakreditasi :			Dinas Kesehatan
			Upaya KesehatanMasyarakat	- Dasar	30,00%	0,00%	Dinas Kesehatan
				- Madya	60,00%	64,00%	Dinas Kesehatan
				- Utama	10,00%	30,00%	Dinas Kesehatan
				- Paripurna	0,00%	6,00%	Dinas Kesehatan
				Persentase masyarakat yang memperolehjaminan kesehatan	65,40%	100,00%	Dinas Kesehatan
				Angka kematian ibu	300 per 100.000	133 per 100.000	Dinas Kesehatan

					kelahiran hidup	kelahiran hidup	
				Angka kematian bayi	11 per 1.000 kelahiran hidup	11 per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik	63%	72%	Dinas Kesehatan
				- Poskesdes	50,00%	60,00%	Dinas Kesehatan
				- Pustu	30,00%	40,00%	Dinas Kesehatan
				- Puskesmas	100,00%	100,00%	Dinas Kesehatan
				- Alat kesehatan	100,00%	100,00%	Dinas Kesehatan
				- Puskesmas Keliling	0,00%	100,00%	Dinas Kesehatan
				Prevalensi Penduduk Lanjut Usia RisikoTinggi	332 per 1.000	265 per 1.000	Dinas Kesehatan
					lansia	lansia	Dinas Kesehatan
				Persentase Desa/Kelurahan STBM	1,00%	8,00%	Dinas Kesehatan
				Nilai Akreditasi RS	78	88	RSUD Hajja AndiDepu
				Indeks Kepuasan Layanan RS	-	87,00%	RSUD Wono
			Program sediaan farmasi,alat kesehatan, dan makanan minuman	Presentase Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical, Usaha Mikro ObatTradisional (UMOT) yang sesuai standar	10,40%	85%	Dinas Kesehatan
				Persentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memenuhi standar untukpenerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	67,00%	55%	Dinas Kesehatan
				Persentase Pemeriksaan Post Market Produk Industri Rumah Tangga Pangan	0,00%	60%	Dinas Kesehatan
				Persentase tenaga kesehatan, masyarakatdan Lintas Sektor yang mendapatkan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMa CerMat)	Nakes 3,6 % (25 orang dari 1193 orang), Masyarakat 0,04% (161 dari 431.998 jiwa)	Nakes 30%, Masyarakat 20%	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber PerilakuHidup Bersih dan Sehat (PHBS)	62,00%	62%	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia Kesehatan	Persentase tenaga medis dan para medisyang memenuhi standar kompetensi :			Dinas Kesehatan
				- Tenaga medis	100,00%	100%	Dinas Kesehatan
				- Tenaga para medis	100,00%	100%	Dinas Kesehatan
			Program Pengendalian Penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	1,22%	0,72%	DP2KBP3A

			Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase peserta KB aktif	67,00%	88,27%	DP2KBP3A
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	-	88,27%	DP2KBP3A
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlet berprestasi	40 atlet	65 atlet	Dinas Pemuda, Olahraga danPariwisata
			Program PengembanganKapasitas Kepramukaan	Meningkatnya Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	-	-	Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata
		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak		**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**	**91,48**	**92,26**	
				Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	**Pratama**	**Madya**	
2	**Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting**		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG) danIndeks Pemberdayaan Gender (IDG)	91,48	93,10	DP2KBP3A
			Program Pemenuhan HakAnak	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama	KLA	DP2KBP3A
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		**Angka kemiskinan**	**15,97%**	**15,71%**	
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang ditangani dalampelayanan rehabilitasi sosial	21,76%	36,05%	Dinas Sosial
			Program PemberdayaanSosial	Persentase masyarakat miskin potensiyang diberdayakan	21%	21,00%	Dinas Sosial
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat miskin penerimapenjaminan sosial	59,18%	71,43%	Dinas Sosial
			Program PenangananBencana	Persentase Korban Bencana yangditangani	100,00%	100,00%	Dinas Sosial
			Program Perumahan DanKawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	6.730 unit (TotalRTLH)	2.793 Unit	Dinas Perumahan, Permukiman dan pertanahan
		Berkurangnya Pengangguran	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang melakukankerjasama Desa	-	24,30%	Dinas PMD
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	**2,97%**	**2,05%**	
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja terampil	95 orang	1.000 orang	Dinas PMD

			Program PenempatanTenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap	12,56%	25,00%	Disnakertrans ESDM
			Program PengembanganKapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda Pelopor	75 orang	75 orang	Dispop
				Jumlah Pemuda Wirausaha	30 pemuda	35 pemuda	Dispop
				Persentase desa maju dan mandiri	**1,39%**	**34,03%**	
			Program Pemberdyaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang menerapkanTeknologi Tepat Guna (TTG)	73,61%	100%	Dinas PMD
		Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal	Program PembangunanKawasan Transmigrasi	Jumlah Satuan Kawasan Pengembangan(SKP) Transmigrasi	1 SKP	2 SKP	Disnakertrans ESDM
			Program Perencanaan dan kawasan transmigrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Satuan Permukiman Pada Kawasan Transmigrasi	-	2 Dokumen	Disnakertrans ESDM
3	**Meningkatkan Pemerataan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup**		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Indeks Kawasan Transmigrasi	-	42	Disnakertrans ESDM
		Meningkatnya Ketahanan Pangan		**Skor pola pangan harapan**	**79,02**	**88,53**	
				Pengeluaran konsumsi rata-rataperkapita	**Rp699.721**	**Rp919.447**	
			Program Pengelolaan Sumberdaya ekonomi untukkedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase cadangan pangan masyarakat	11,52%	50,00%	Dinas Pertaniandan Pangan
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahananpangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	79	90,07	Dinas Pertaniandan Pangan
				Skor PPH Ketersediaan	69,00	100,00	Dinas Pertaniandan Pangan
			Program PenangananKerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	27%	23%	Dinas Pertaniandan Pangan
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi		**Angka Kecelakaan Lalu Lintas**	**233 Kejadian**	**90 Kejadian**	
			Program PenyelenggaraanLalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kualitas sarana prasaranaperhubungan dalam kondisi baik	86,39%	96,88%	Dinas Perhubungan
				Persentase titik rawan kecelakaan yangaman	55,00%	90,00%	Dinas Perhubungan
				Persentase angkutan publik yangmemenuhi standar keselamatan	44,88%	66,67%	Dinas Perhubungan
4		**Meningkatnya**		**Persentase Jalan dalam kondisi mantap**	**46,74%**	**76,91%**	

		Kualitas Infrastruktur Jalan	Program PenyelenggaraanJalan	1).Persentase jalan kabupaten dalam kondisi Mantap	51,73%	77,46%	Dinas PUPR
				2).Persentase jembatan dalam kondisibaik;	63,30%	91,03%	Dinas PUPR
		MeningkatnyaKualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi		**Persentase jaringan irigasi dalamkondisi baik**	**73,45**	**69,22**	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Saluran Irigasi Dalam KondisiBaik	59,00%	64,70%	Dinas PUPR
				Persentase Bendung Dalam Kondisi Baik	100%	54,55%	Dinas PUPR
				Persentase Pintu Air Dalam Kondisi Baik	75,00%	88,41%	Dinas PUPR
		MeningkatnyaKualitas Infrastruktur Permukiman		**Indeks infrastruktur permukiman**	**66,44%**	**91,14%**	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase pelayanan akses air minum	86,00%	100,00%	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1).Persentase akses sanitasi yang layak;	82,66%	89,51%	Dinas PUPR
				2).Persentase akses sanitasi yang aman	0,00%	20,00%	Dinas PUPR
			Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan kumuh	57,66 Ha	10,4 Ha	Disrumkimtan
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana yangtertangani sesuai rencana	-	100%	Disrumkimtan
				Persentase pengelolaan Rusunawa	-	100%	Disrumkimtan
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase kawasan perkotaandalam kondisi baik	40,41%	56,72%	Dinas PUPR
			Program PenataanBangunan Dan Lingkungannya	Persentase Jalan Lingkungan kawasanperkotaan dalam kondisi baik	35,00%	63,31%	Dinas PUPR
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana DanUtilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan formal yang memiliki Prasarana, Sarana dan Utilitas(PSU) baik	11,70%	67,65%	Disrumkimtan
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yangsudah dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang	34,03%	60,00%	Dinas PUPR
		Meningkatnya		**Indeks kualitas lingkungan hidup**	**63,50%**	**68,19%**	

		Kelestarian Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yangterkelola	27,40%	56,00%	DLHK
				Persentase pengurangan sampah	6,46%	20,50%	DLHK
				Persentase Penanganan persampahan	20,94%	35,50%	DLHK
			program pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Tingkat pencemaran	Ringan	Ringan	DLHK
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati(Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4,50%	25,00%	DLHK
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan LimbahBahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yangtertangani	-	8,90%	DLHK
			Program PerencanaanLingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang ditetapkan sesuaistandar	-	100%	DLHK
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	-	100%	DLHK
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan DanPenyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina dalam pengelolaan lingkunganhidup	-	100%	DLHK
			Program PengembanganSistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketersediaan PrasaranaPersampahan		26,87%	Dinas PUPR
4	**Peningkatan ProduktivitasSektor Unggulan**	**Meningkatnya Pemerataan Pertumbuhan**		**Persentase laju pertumbuhan PDRBsektor pertanian, kehutanan dan perikanan**	**8,00%**	**5,09%**	
		Sektor Pertaniandan Perikanan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah produksi padi	385.851 ton	360.412 ton	Dinas Pertanian dan Pangan
				Jumlah produksi jagung	64.382 ton	85.476 ton	
				Jumlah Produksi kedelai	6.611 ton	5.794 ton	
				Jumlah Produksi Buah-Buahan	42.370,7 ton	78.884 ton	

				Jumlah Produksi Sayuran	1.744,7 ton	2.405 ton	
				Jumlah produksi Kakao	33.220 ton	33.458 ton	
				Jumlah produksi Kelapa	19.207 ton	21.379 ton	
				Jumlah Produksi Kopi	188 ton	1.279 ton	
				Jumlah Produksi Sapi	391 ton	441 ton	
				Jumlah Produksi Kambing	16 ton	12 ton	
				Jumlah Produksi Unggas	1.652 ton	2.007 ton	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan PrasaranaPertanian	3,7%	18%	
			Program PengendalianKesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	9%	15%	
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Fasilitasi PenanggulanganBencana Pertanian	0,00%	100%	Dinas PertanianDan Pangan
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Penerbitan Izin UsahaPertanian	100%	95%	
			Program PenyuluhanPertanian	Persentase Penyuluh Pertanian yangmengikuti Pelatihan Tematik	60%	75%	
				Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	-4%	7%	
			Program PengelolaanPerikanan Tangkap	Jumlah total produksi perikanan tangkap	25.388,26 Ton	26.161 Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program PengelolaanPerikanan Budidaya	Jumlah total produksi perikanan budidaya	35.310,24 Ton	38.275 Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pertumbuhan usaha pengolahan dan pemasaran hasilperikanan	20%	50%	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Meningkatnya Daya Saing Usaha Industri Pengolahan danPerdagangan		**Persentase laju pertumbuhan PDRBsektor industri pengolahan**	**7,42%**	**7,37%**	
				Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	**7,55%**	**5,58%**	
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Mikro	0,7%	2,00%	Disperindagkop UMKM
				Persentase Pertumbuhan Industri Kecil	0,02%	1,00%	Disperindagkop UMKM

				Persentase Pertumbuhan IndustriMenengah	0,00%	1,00%	Disperindagkop UMKM
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar MARASA (Maju, Rapih,Sehat dan Aman dalam perlindungan konsumen)	27,27%	18,00%	Disperindagkop UMKM
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil danMikro (UMKM)	Persentase UKMM yang tumbuh danberkembang Usah Baru	9,00%	0,55%	Disperindagkop UMKM
				Persentase UKMM yang tumbuh danberkembang Mikro Kecil	5,00%	0,02%	Disperindagkop UMKM
				Persentase UKMM yang tumbuh danberkembang Kecil - Menengah	1,00%	0,00%	Disperindagkop UMKM
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	25,00%	57,03%	Disperindagkop UMKM
			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase penyelesaian kasusperlindungan konsumen	20,00	100,00	Disperindagkop UMKM
		Meningkatnya Investasi Daerah		**Nilai investasi**	**Rp 148.306.017**	**Rp 559.570.070.397**	
			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor	436 Orang	580 Orang	DPMPTSP
			Program Pengendalian Pelaksanaan PenanamanModal	Nilai realisasi investasi daerah	Rp 184.427.021.413	Rp 165.150.000	
		Meningkatnya Daya Saing Usaha PariwisataDaerah		**Jumlah wisatawan**	**488.299 Orang**	**400.010 Orang**	
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pameran/Even PromosiWisata	-	100%	Dispop
			Program Peningkatan DayaTarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata	90 objek	110 objek	Dispop
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata danEkonomi Kreatif	Jumlah wisatawan :			Dispop
				- Domestik	488.012 orang	1.300.000 orang	Dispop
				- Mancanegara	287 orang	1.000 orang	Dispop
			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase situs cagar budaya dalampemantauan untuk dilestarikan	100,00%	100,00%	Dinas Pendidikandan Kebudayaan
			Program PengembanganKesenian Tradisional	Persentase seni budaya daerah yang aktif dikembangkan	100,00%	100,00%	Dinas Pendidikandan Kebudayaan
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Presentase Cagar Budaya yangdilestarikan	100,00%	100,00%	Dinas Pendidikandan Kebudayaan

			Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Benda Pusaka dan Alat Kesenian Tradisional yang dikoleksi	0,00%	30,00%	Dinas Pendidikandan Kebudayaan
5	**Pemantapan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**	**Meningkatnya AkuntabilitasKinerja PemerintahanDaerah**		**Predikat Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (SAKIP)**	**B**	**BB**	
					(66,12)	**(75,18)**	
				Opini pengelolaan keuangan	**WTP**	**WTP**	
				Tingkat maturitas Sistem PengendalianInternal Pemerintah (SPIP)	**3,038**	**3,780**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		**Indeks Sistem Pemerintahan BerbasisElektronik (SPBE)**	**2,510**	**3,700**	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**Baik**	**Sangat Baik**	
			Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program antaraRPJMD dengan RKPD	100,00%	100,00%	Balitbangren
				Persentase konsistensi kegiatan antaraRKPD dengan APBD	100,00%	100,00%	Balitbangren
				Persentase rata-rata capaian programperencanaan pembangunan daerah	65,00%	95,00%	Balitbangren
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program/kegiatanOPD pada Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Bidang ekonomi, Bidang Sosial Budaya antara : - RPJMD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA	100,00%	100,00%	Balitbangren
				Persentase Konsistensi Sub kegiatan OPD antara RENJA dengan RKA pada Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Bidang ekonomi dan Bidang Sosial Budaya	100,00%	100,00%	Balitbangren
				Persentase rata-rata capaian program perencanaan sektoral pada Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Bidang ekonomi dan Bidang Sosial Budaya	100,00%	100,00%	Balitbangren
			Program PengelolaanKeuangan Daerah	Persentase dokumen penganggaran yangdisusun tepat waktu	30,77%	90,00%	Badan Keuangan
				Persentase pencairan belanja tepat waktu	-	93,00%	Badan Keuangan
				Persentase laporan keuangan daerah yangdisampaikan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%	Badan Keuangan
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan BMD sesuaiStandar	95,56%	100,00%	Badan Keuangan
			Program PengelolaanPendapatan	Jumlah penerimaan:			Badan Pendapatan

			Daerah	- Pajak daerah	Rp. 18.849.732.901	Rp30.015.000.000	Badan Pendapatan
				- Retribusi Daerah	Rp. 9.074.857.129	Rp17.540.800.000	Badan Pendapatan
				Persentase administrasi pengelolaan pajakdan retribusi daerah yang tertib sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%	Badan Pendapatan
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuaistandar dan tepat waktu	80,00%	100,00%	Seluruh PerangkatDaerah
				Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100,00%	100,00%	Seluruh PerangkatDaerah
				Persentase tertib ketatausahaan kantor	60,00%	90,00%	Seluruh PerangkatDaerah
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan layanan pemerintahankecamatan	Baik	Sangat Baik	Kecamatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana prasaranadan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	-	30 Kali	Kecamatan
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase perangkat daerah yangmenerapkan SPIP	13,64%	53,45%	Inspektorat
			Program Perumusan kebijakan, Pendampingandan Asistensi	Persentase aparat pengawasan internalpemerintah yang kompeten	61,90%	100,00%	Inspektorat
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan pemerintahan dan layanan publik yang berbasis elektronik	32,00%	82,00%	Dinas Kominfo, SP
			Program Informasi danKomunikasi Publik	Persentase perangkat daerah yanginformatif dan komunikatif	5,00%	96,42%	Dinas Kominfo, SP
			Program PenyelenggaraanStatistik Sektoral	Persentase data sektoral yang valid	25,00%	82,00%	Dinas Kominfo, SP
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase layanan didukung keamananinformasi yang memadai	17,78%	33,00%	Dinas Kominfo, SP
			Program Pengelolaan Arsip	Predikat pengelolaan kearsipan	16,7	86	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks kepuasan pelayanan perizinan dannon perizinan	Baik	Sangat Baik	DPMPTSP
			Program PendaftaranPenduduk	Persentase kepemilikan KTP elektronik	76,25%	100,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

				Persentase kepemilikan kartu keluarga	97,00%	100,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan akta kelahiran 0-18tahun	76,48%	100,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase kepemilikan akta kematian	59,73%	100,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Indeks kepuasan pelayanan administrasikependudukan dan pencatatan sipil	Cukup	Sangat Baik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus pelanggaran peraturandaerah yang ditindak lanjuti	100,00%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase Satpol PP yang memilikikualifikasi :			Satuan Polisi Pamong Praja
				- Dasar	49,19%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
				- Teknis	1,63%	23,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase kecamatan yang memilki tenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan teknisyang memadai	81,00%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kecamatan kesiapsiagaanbahaya bencana kebakaran	81,00%	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase desa siaga bencana	29,94%	90,00%	BPBD
				Waktu Tanggap Darurat Setelah kejadian	72 Jam	72 Jam	BPBD
				Persentase pasca bencana yangtertangani	20,00%	100,00%	BPBD

Sumber : RKPD Polewali Mandar 2024

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (selanjutnya disingkat SPM) disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Dalam penyusunan SPM ditetapkan jenis pelayanan dasar, indikator SPM dan batas waktu pencapaian SPM.

a. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sejalan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah, terutama dalam penyediaan pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Penyediaan dan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah daerah. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang meliputi :

- ✓ pendidikan;
- ✓ kesehatan;
- ✓ pekerjaan umum dan penataan ruang;
- ✓ perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- ✓ ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan sosial.

Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal merupakan acuan dalam penerapan pelayanan dasar bagi Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dimana secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, dan pelaksanaan SPM serta pelaporan.

Sedangkan aturan Kementerian/Lembaga terkait mengenai teknis pelaksanaan pelayanan dasar sebagai berikut :

- Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis

Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Namun sampai dengan saat ini belum adanya Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang mengatur mengenai penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Polewali Mandar.

Sedangkan dalam upaya pembentukan Tim Penerapan SPM, telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023. Namun untuk mendorong pelaksanaan standar teknis pelayanan dasar dalam menjalankan jenis pelayanan dasar dan meningkatkan pencapaian target 100% (seratus persen) standar teknis pelayanan minimal pada masing-masing bidang SPM maka dipandang perlu adanya peraturan kepala daerah yang mengatur hal tersebut. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar saat ini tengah berupaya menyusun rancangan peraturan kepala daerah tersebut.

b. Rencana Penerapan dan Pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Permasalahan Pembangunan khususnya pada urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar diantaranya yaitu :

1) *Pendidikan*

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar merupakan sebuah strategi sebagai cerminan tingginya peradaban bangsa. Bahwa bangsa yang beradab adalah bangsa yang sadar akan siapa dirinya (jati diri) dan apa yang menjadi tujuan bersama sebagai bangsa (cita-cita nasional). Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu :

- ✓ Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
- ✓ Masih rendahnya partisipasi pendidikan tingkat SMP;
- ✓ Belum optimalnya Mutu dan kualitas tenaga kependidikan;
- ✓ Masih kurangnya data dan informasi usia wajib belajar yang tidak sekolah.

2) *Kesehatan*

Pembangunan di bidang kesehatan adalah pembangunan kesehatan yang diukur dengan capaian Derajat Kesehatan meliputi Angka Kematian Bayi, status kesakitan dan status pelayanan kesehatan termasuk kesediaan sarana dan prasana kesehatan. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu :

- ✓ Masih tingginya kasus kematian Ibu dan bayi;
- ✓ Masih tingginya prevalensi anak stunting;

- ✓ Belum terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan secara optimal;
- ✓ Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan (khususnya rumah sakit);
- ✓ Masih Rendahnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.

3) *Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

- ✓ Belum optimalnya akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi yang layak terutama pada daerah terpencil dan masyarakat miskin;
- ✓ Belum berfungsinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
- ✓ Sulitnya mendapatkan sumber air baku yang akan memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum masyarakat;
- ✓ Minimnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur ;
- ✓ Kurangnya pengawasan/monitoring terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

4) *Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman*

- ✓ Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni;
- ✓ Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh perkotaan;
- ✓ Belum tersedianya dokumen perencanaan perumahan dan kawasan permukiman;
- ✓ Belum adanya perda penanganan kawasan kumuh;
- ✓ Sulit melakukan pendataan terkait bencana;
- ✓ Belum ada skema lokasi aman untuk rumah layak huni;

5) *Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*

- ✓ Belum optimalnya peningkatan ketentraman,ketertiban umum dan perlindungan terhadap masyarakat;
- ✓ Belum optimalnya kesadaran masyarakat tentang penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- ✓ Indikator SPM Bidang Ketertiban Umum mendapatkan dukungan dana yang sangat minim untuk pelaksanaan kegiatan/ program mencakup SPM Satpol PP.
- ✓ Belum optimalnya penanggulangan bencana kebakaran;
- ✓ Belum optimalnya penanganan kawasan rawan bencana;
- ✓ Masih kurangnya masyarakat yang mengenali bahaya dan rawan bencana disekitarnya, terutama dilereng yang curam yang sewaktu-waktu dapat mengancam.
- ✓ Masih terbatasnya anggaran tersedia dalam penanganan kawasan rawan bencana.
- ✓ Masih kurangnya penilaian kerusakan dan kerugian setelah terjadi bencana.
- ✓ Masih terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan kebencanaan.
- ✓ Perlunya pengarusutamaan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) dalam perencanaan pembangunan.
- ✓ Masih perlunya pengenalan, pengkajian, dan pemantauan resiko bencana.
- ✓ Masih kurangnya harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana.
- ✓ Penyusuan rencana kontijensi untuk seluruh ancaman bencana (sesuai IRBI) masih sangat minim.
- ✓ Kurangnya budaya sadar bencana di lingkungan sekolah serta kurangnya penerapan aman bencana dirumah sakit dan puskesmas.
- ✓ Sistem peringatan dini per jenis bencana masih minim.
- ✓ Belum adanya pembentukan dan pengembangan desa tangguh bencana.
- ✓ Peralatan dan logistik kebencanaan masih sangat minim.
- ✓ Perlunya pelatihan-pelatihan terkait dengan kebencanaan.

6) *Sosial*

Bidang Sosial yang merupakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, kinerja pembangunannya dapat dilihat dari Capaian persentase Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan persentase PMKS yang ditangani Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu :

- ✓ Masih rendahnya cakupan jaminan sosial;
- ✓ Belum optimalnya penyaluran bantuan bagi masyarakat ekonomi lemah (belum tepat sasaran);
- ✓ Belum tersedianya Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang akurat;
- ✓ Keterbatasan anggaran untuk memenuhi beban tanggungjawab pemenuhan SPM;
- ✓ Tidak tersedianya pusat layanan Rehabilitasi Sosial untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada kelompok rentan seperti disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) serta lainnya.

Tabel 1.25.
Indikasi Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah dan Kebutuhan Pendanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 - 2024

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATORKINERJA PROGRAM	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	CAPAIAN/TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Capaian	Rp.	Capaian	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	URUSAN WAJIB				**551.049.534.537**		**561.476.235.414**		**655.709.605.448**		**648.291.851.976**	
I	**TERKAIT PELAYANAN DASAR**				**511.784.456.243**		**513.240.058.388**		**604.724.176.011**		**611.043.473.897**	
1	**PENDIDIKAN**				**109.724.339.086**		**132.051.727.515**		**161.509.703.106**		**125.474.954.200**	
1.1	Program Pengelolaan Pendidikan	PersentaseAPK PAUD	75,00%	82,00%	109.624.339.486	82,00%	131.877.375.615	83,00%	161.169.425.806	88,00%	124.988.406.900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PersentaseAPK SD/MI	100,00%	99,10%		100,00%		100,00%		100,00%		
		PersenatseAPK SMP/MTs	100,00%	88,03%		100,00%		100,00%		100,00%		
		PersentaseAPM SD/MI	100,00%	99,10%		100,00%		100,00%		100,00%		
		Persentase APM SMP/MTs	77,80%	88,30,%		89,50%		91,70%		92,50%		
		Persentase angka putus sekolah SD/MI	0,10%	0,09%		0,07%		0,06%		0,06%		
		Persentase angka putus sekolah SMP/MTs	0,44%	0,45%		0,40%		0,35%		0,30%		
		Persentase tenaga pendidik yangmengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah	0,00%	100,00%		90,00%		90,00%		100,00%		
1.2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persenatse Guru SD/SMP memenuhi standar kompetensi	86%	86,00%	99.999.600	89%	174.351.900	89%	340.277.300	89%	486.547.300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**KESEHATAN**				**279.299.635.278**		**281.961.497.220**		**307.766.020.575**		**297.567.779.067**	
2.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Persentasepuskesmas			148.672.492.962		115.564.169.580		125.950.206.333		126.331.905.900	Dinas Kesehatan
	Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	dengan statusakreditasi :										
		- Dasar	30,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
		- Madya	60,00%	60,00%		70,00%		68,00%		64,00%		
		- Utama	10,00%	21,00%		25,00%		27,00%		30,00%		
		- Paripurna	-	4,00%		5,00%		5,00%		6,00%		

		Persentase masyarakat yang memperoleh jaminan kesehatan	65,40%	94,00%		95,00%		95,00%		100,00%		
		Angka kematian ibu	300 per 100.000 kelahiran hidup	234 per 100.000 kelahiran hidup		201 per 100.000 kelahiran hidup		168 per 100.000 kelahiran hidup		133 per 100.000 kelahiran hidup		Dinas Kesehatan
		Angka kematian bayi	11 per 1.000 kelahiran hidup	10 per 1.000 kelahiran hidup		11 per 1.000 kelahiran hidup		11 per 1.000 kelahiran hidup		11 per 1.000 kelahiran hidup		Dinas Kesehatan
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisibaik	63%	100%		100%		72%		72%		Dinas Kesehatan
		- Poskesdes	50,00%	100,00%		56,00%		58,00%		60,00%		
		- Pustu	30,00%	100,00%		36,00%		38,00%		40,00%		
		- Puskesmas	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		- Alat kesehatan	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		- PuskesmasKeliling	-	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		Prevalensi Penduduk Lanjut Usia Risiko Tinggi Cerdas Menggunakan Obat (GeMaCerMat)	332 per 1.000 lansia	324 Per 1.000 lansia		293 per 1.000 Lansia		280 per 1.000 lansia		265 per 1.000 lansia		
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**111.417.141.898**		**90.407.012.703**		**123.673.852.716**		**175.719.862.330**	
3.3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentasepelayanan akses airminum	86,00%	85,37%	19.687.332.400	86,84%	12.479.271.800	89%	16.399.946.828	91,39%	14.873.974.350	Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang
3.4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1).Persentase akses sanitasi yang layak;	82,66%	92,54%	5.297.257.600	94,07%	4.007.819.500	96,01%	10.374.670.900	97,95%	45.449.974.850	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2).Persentase akses sanitasiyang aman	-	0		1,43%		1,98%		2,53%		
4	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**5.460.654.800**		**635.505.950**		**5.528.233.200**		**7.794.078.900**	
4.4	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana yangtertangani sesuai rencana	-	-	-	100,00%	108.997.800	100,00%	296.602.700	100,00%	342.575.200	Dinas Perumahan, Permukimandan Pertanahan
		Persentase pengelolaan Rusunawa	-	-	-	-	-	100,00%	-	100,00%	-	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
5	**KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**4.854.576.093**		**3.240.511.900**		**4.987.184.264**		**3.770.059.400**	
5.1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus pelanggaranperaturan daerah yang ditindak lanjuti	100,00%	73,00%	342.370.985	100,00%	482.220.200	100,00%	295.337.300	100,00%	635.839.900	Satuan Polisi PamongPraja
		Persentase gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman yang ditindak lanjuti	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	Satuan Polisi PamongPraja
		Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi :			-		-		-		-	Satuan Polisi PamongPraja
		- Dasar	49,19%	50,00%		100,00%		100,00%		100,00%		

		- Teknis	1,63%	4,50%		16,00%		20,00%		23,00%		
		Persentase kecamatan yang memilkitenaga Satlinmas yang mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan teknis yang memadai	81,00%	81,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	Satuan Polisi PamongPraja
5.2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kecamatan kesiapsiagaanbahaya bencana kebakaran	81,00%	59,00%	4.098.730.608	94,00%	2.367.688.600	100,00%	3.987.501.064	100,00%	2.181.886.200	Satuan Polisi PamongPraja
5.3	Program Penanggulangan Bencana	Persentase desa siaga bencana	29,94%	44,00%	413.474.500	67,00%	390.603.100	78,00%	704.345.900	90,00%	952.333.300	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Waktu TanggapDarurat Setelah kejadian	72 Jam	72 Jam	-	72 Jam	-	72 Jam	-	72 Jam	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase pasca bencana yangtertangani	20,00%	60,00%	-	80,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	**SOSIAL**				**1.028.109.088**		**4.943.803.100**		**1.259.182.150**		**716.740.000**	
6.1	Program Rehabilitasi Sosial	PersentasePMKS yang ditangani dalam pelayanan Rehabilitasi sosial	21,76%	12,00%	192.849.700	33,00%	186.267.800	36,00%	57.990.900	36,05%	272.990.900	Dinas Sosial
6.4	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang ditangani	100,00%	100,00%	-	100,00%	89.193.400	100,00%	344.081.250	100,00%	165.500.000	Dinas Sosial

Sumber data : Dokumen Perubahan RPJMD Polewali Mandar Tahun 2019-2024

c. Rencana Penerapan dan Pencapaian SPM dalam Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah

Rencana pemenuhan target penerapan pelayanan dasar pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1) *Pendidikan*

- ✓ Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD dengan target 17.760 orang.
- ✓ Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs) dengan target 82.270 orang.
- ✓ Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelsaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan dengan target 5.392 orang.

2) *Kesehatan*

- ✓ Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan dengan target 8.067 orang
- ✓ Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan dengan target 8.067 orang.
- ✓ Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan dengan target 7.997 orang.
- ✓ Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan dengan target 40.399 orang.
- ✓ Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatandengan target 78.318 orang.
- ✓ Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatandengan target 312.987 orang.
- ✓ Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatandengan target 47.458 orang.
- ✓ Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatandengan target 22.754 orang.
- ✓ Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan dengan target 4.288 orang.
- ✓ Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani kesehatan dengan target 991 orang.
- ✓ Jumlah Warga Negara terduga tubercolusis yang mendapatkan layanan kesehatandengan target 9.686 orang.
- ✓ Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan Layanan Kesehatan dengan target 11.312 orang.

3) *Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

- ✓ Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari dengan target 8.415 orang.
- ✓ Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik dengan target 5.985 orang.

4) *Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman*

- ✓ Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni dengan target 100%
- ✓ Jenis Pelayanan dasar Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni tidak terlaksana disebabkan tidak ada program relokasi oleh Pemerintah Daerah.

5) *Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*

- ✓ Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi dengan target 100%
- ✓ Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi terhadap rawan bencana dengan target 100%
- ✓ Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan target 100%
- ✓ Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan target 100%
- ✓ Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan target 100%

6) *Sosial*

- ✓ Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dengan target 183 orang
- ✓ Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dengan target 136 orang
- ✓ Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dengan target 87 orang
- ✓ Pelayanan dasar jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial tidak terlaksana disebabkan tidak ada gelandangan dan pengemis ddi Kabupaten Polewali Mandar.
- ✓ Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota dengan target 100%

Tabel 1.26.
Alokasi Anggaran SPM Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024

No	Bidang Urusan SPM / Perangkat Daerah	Program dan Kegiatan yang Mendukung SPM	Alokasi Anggaran SPM (Rp)	Keterangan
1	**Pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)**	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**144,864,114,376**	APBD
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	84,757,884,783	APBD
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	32,189,593,399	APBD
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	21,594,984,920	APBD
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	6,321,651,274	APBD
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	**136,791,880**	APBD
		Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	136,791,880	APBD
2	**Kesehatan (Dinas Kesehatan)**	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**3,083,384,106**	APBD
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3,083,384,106	APBD
3	**Pekerjaan Umum (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**17,260,710,707**	APBD
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	17,260,710,707	APBD
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	**12,096,496,300**	APBD
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	12,096,496,300	APBD

4	**Perumahan Rakyat (Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan)**	**Program Pengembangan Perumahan**	**9,996,809**	APBD
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	9,996,809	APBD
5	**Trantibumlinmas (Satpol PP dan BPBD)**	**Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**122,095,412**	APBD
		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	115,457,012	APBD
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	3,680,000	APBD
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	2,958,400	APBD
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	**3,730,000,000**	APBD
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	3,730,000,000	APBD
		Program Penanggulangan Bencana	**284,346,304**	APBD
		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	16,242,844	
		Kegiatan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	230,274,305	APBD
6	**Sosial (Dinas Sosial)**	**Program Rehabilitasi Sosial**	**471,299,454**	APBD
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	471,299,454	APBD
		Program Penanganan Bencana	**2,362,362,277**	APBD
		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	2,362,362,277	APBD

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Berdasarkan data-data capaian makro tersebut di atas maka perubahan capaian kinerja makro antara tahun sebelumnya dan tahun pelaporan sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Polewali Mandar 2023-2024

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian 2023	Capaian 2024	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,24	69,88	**0,92**
2	Angka Kemiskinan	16,08	15,66	**-2,61**
3	Angka Pengangguran	1,95	3,10	**58,97**
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,56	5,94	**30,26**
5	Pendapatan Per kapita	32.300.000	35.450.000	**9,75**
6	Ketimpangan Pendapatan	0,330	0,303	**-8.18**

Sumber : Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka (BPS), 2025

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir.

Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Tabel 2.2.
Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021-2024

DATA MAKRO	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	***67,85***	***68,42***	***69,24***	***69,88***
DATA PENUNJANG				
Angka Harapan Hidup (AHH) (%)	62,53	70,48	70,82	71,08
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (%)	7,44	7,60	7,71	7,72
Harapan Lama Sekolah (HLS) (%)	13,38	13,39	13,48	13,50

Sumber : Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka, 2025

2.1.2. Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. (BPS).

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai pendudukmiskin.

a. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll.
b. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Tabel 2.3.
Data Angka Kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021-2024

DATA MAKRO	2021	2022	2023	2024
Angka Kemiskinan (%)	***15,68***	***16,39***	***16,08***	***15,66***
DATA PENUNJANG				
Penduduk Miskin (ribu orang)	69,32	72,87	71,92	70,42
Jumlah Penduduk (jiwa)	483.920	490.493	495.371	492.339
Garis Kemisikinan (rupiah)	416.443	452.836	482.658	507.347

Sumber : Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka, 2025

2.1.3. Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka ini kerap digunakan masyarakat sebagai standar untuk menilai keberhasilan pemerintah dalam ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Serta mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan.

Tabel 2.4.
Data Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021-2024

DATA MAKRO	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	***3,38***	***2,16***	***1,95***	***3,1***
DATA PENUNJANG				
Bekerja (Jiwa)	218.765	246.925	260.119	251.424
Laki-Laki (Jiwa)	127.711	135.204	150.196	148.701

Perempuan (Jiwa)	91.054	111.721	109.923	102.723
Menganggur (Jiwa)	7.644	5.451	5.182	8.042
Laki-Laki (Jiwa)	5.037	4.625	3.950	4.367
Perempuan (Jiwa)	2.607	826	1.232	3.675

Sumber : Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka, 2025

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.Pertumbuhan ekonomi atau Pertumbuhan riil PDRB merupakan indikator ekonomi yang menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah.Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Manfaat yang dapat diperoleh dari data PDRB adalah :

a. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya;
b. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun;
c. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori- kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah;
d. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk;
e. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Pada tabel berikut memperlihatkan data mengenai persentase pertumbuhan ekonomidi Kabupaten Polewali Mandar tahun 2021-2024.

Tabel 2.5.
Data Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021-2024

DATA MAKRO	2021	2022	2023	2024
Persentase Pertumbuhan Ekonomi (%)	***1,86***	***3,58***	***4,56***	***5,94***
DATA PENUNJANG				
Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rupiah) PDRB atas dasar harga berlaku	13.812,49	14.844,36	15.999,66	17.770,78
Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rupiah) PDRB atas dasar harga konstan 2010	9.414,90	9.752,35	10.197,11	10.803,24
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (%)	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka, 2025

2.1.5. Pendapatan Per Kapita

Tingkat pendapatan masih menjadi indikator utama tingkat kesejahteraan masyarakat, disamping berbagai indikator sosial ekonomi lainnya. Tingkat pendapatan masyarakat dapat dilihat dari kemampuan setiap penduduk dalam penyediaan barang dan jasa rata-rata pada suatu periode tertentu atau diistilahkan dengan pendapatan per kapita. PDRB Per Kapita dapat diukur atas harga konstan dan atas harga berlaku. PDRB per kapita diperoleh dari penghitungan PDRB. Indikator ini biasa digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku diperoleh dengan membagi PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Indikator Pendapatan Per Kapita digunakan untuk melihat tingkat kenaikan pendapatan per kapita daerah yang bersangkutan. Terdapat 2 (dua) metode penghitungan yaitu PDRB Per Kapita Nominal (berdasarkan harga berlaku) yang tidak mempertimbangkan tingkat inflasi atau kenaikan harga dan yang kedua adalah PDRB Per Kapita Riil (berdasarkan angka konstan) yang dihitung berdasarkan harga tetap sebagai acuan. PDRB Per Kapita atas Harga Berlaku pada tahun pelaporan 2023 adalah 32,30.

Tabel 2.6.
Statistik Kunci Bidang Ekonomi Kabupaten Polewali Mandar 2022-2024

EKONOMI	SATUAN	2022	2023	2024
PDRB harga berlaku (Miliar Rupiah)	Triliun Rupiah	14.844,36	15.999,66	17.770,78
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,58	4,56	5,94
PDRB Per Kapita Harga Berlaku	Juta Rupiah	30,33	32,30	35,45

Sumber : Kabupaten Polewali Mandar Dalam Angka, 2025

2.1.6. Ketimpangan Pendapatan

Gini ratio disebut juga dengan indeks Gini atau koefisien Gini. Secara sederhana, Gini ratio dapat dipahami sebagai suatu alat atau metode yang digunakan untuk mengukur ketimpangan ekonomi dalam suatu populasi melalui distribusi pendapatan. Sebagai alat ukur, Gini ratio digunakan untuk mengukur ketidaksetaraan atau ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan atau kekayaan pada suatu populasi. Indikator ini digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan pada daerah bersangkutan dengan menggunakan *gini ratio.* Bila gini ratio = 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Bila gini ratio = 1, ketimpangan pendapatan yang sempurna, artinya satu orang menguasai semua pendapatan sedangkan yang lainnya nihil. Adapun *gini ratio* Kabupaten Polewali Mandar danProvinsi Sulawesi Barat tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.7.
Gini Rasio Kabupaten Polewali Mandar 2020-2024

No	Tahun	Rasio Gini
1	2020	0,345
2	2021	0,352
3	2022	0,329
4	2023	0,330
5	2024	0,303

Sumber : BPS Polman, 2025

2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Terdapat 24 urusan wajib yang terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, 8 urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator kinerja urusan pemerintahan daerah merupakan indikator yang akan mengukur dan memperbandingkan secara obyektif atas capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Fungsi IKK adalah sebagai variabel penilai setiap hal yang diukur. IKK disusun berdasarkan usulan yang diterima dari Kemeterian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan mempertimbangkan kesesuaian kebijakan daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta kepentingan umum, yang digunakan dalam mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Indikator ini terdiri dari 2 jenis yakni Indikator Kinerja Kunci Hasil (outcome) dan Keluaran (output).

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Merupakan indikator yang mengukur keberhasilan atas hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang merupakan manifestasi dari program yang dilaksanakan dan untuk mengetahui manfaat secara langsung bagi penerima manfaat (masyarakat). Data hasil capaian kinerja pada Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK Hasil) setiap urusan dapat dilihat pada **lampiran 1** tentang Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Hasil dalam Laporan ini.

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Merupakan indikator yang mengukur atas hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat administrasi, SDM, perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Data hasil capaian kinerja pada indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan dapat dilihat pada **lampiran 2** tentang Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dalam Laporan ini.

2.2.3. Indikator Kinerja Komponen Otonomi Daerah

Merupakan indikator yang mengukur atas hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari : Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (FKDH), Produk Hukum Daerah (PHD), Kelembagaan Kepegawaian Perengkat Daerah (KKPD) dan Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD). Data hasil capaian kinerja pada indikator kinerja komponen otonomi daerah dapat dilihat pada **lampiran 3** tentang Capaian Kinerja Indikator Kinerja Komponen Otonomi Daerah dalam Laporan ini.

2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja dimaksudkan untuk menilai, menganalisa, dan menginformasikan mengenai hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga untuk menjelaskan tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja yang dicapai instansi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjiankinerja kepala daerah. Menilai dan menganalisis capaian kinerja sangatlah penting, untuk meyakinkan bahwa kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan. Dengan demikian hasil pengukuran akan memudahkan kita untuk menilai apakah berhasil atau tidak berhasil. Berikut akan diuraikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar yang bersumber dari data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024.

2.3.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji hasil kerja yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, berdasarkan rencana strategis, kemampuan APBD dan kemampuan sumber daya lainnya. Tujuan dilakukan penetapan kinerja ada 2 yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ditetapkannya penetapan kinerja adalah intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan akuntabel.

Sedangkan tujuan khusus adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen pemerintah bersama jajaran Satuan Kerja, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Adapun perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.8.
Target Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024

VISI : POLEWALI MANDAR MAJU, RAKYAT SEJAHTERA					
MISI 1 : Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Lebih Baik dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Religius					
NO	**TUJUAN**	**SASARAN KINERJA**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET**
1	**Meningkatnya Taraf Hidup dan Kualitas Sumber Daya Masyarakat** Indikator : Angka kemiskinan Target : 15,71 % Indikator : Indeks Pembangunan Manusia Target : 65,49	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Persen	15,71
		Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,00
		Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal	Persentase Desa Maju dan Mandiri	Persen	34,03
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	88,53
			Pengeluaran Konsumsi Rata-Rata perkapita	Rupiah	919.447
		Meningkatnya kualitas	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,78

		pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,57
		Meningkatnya derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	63,04
			Prevalensi Stunting	Persen	35,02
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,26
			Predikat Kabupaten Layak anak (KLA)	Predikat	Madya
MISI 2 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah					
NO	**TUJUAN**	**SASARAN KINERJA**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET**
2	**Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Yang Merata Dan Berkualitas** Indikator : Persentase Pertumbuhan Ekonomi Target : 5,50 %	Meningkatnya Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	7,37
			Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	Persen	5,58
		Meningkatnya Daya Saing Usaha Pariwisata Daerah	Jumlah wisatawan	Orang	400.010
		Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai investasi	Rupiah	559.570. 070.397
		Meningkatnya Pemerataan Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	5,09
MISI 3 : Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas Serta Berwawasan Lingkungan					
NO	**TUJUAN**	**SASARAN KINERJA**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET**
3	**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur** Indikator : Indeks Infrastruktur Target : 91,52	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan sistem transportasi	Angka kecelakaan lalu lintas	Kejadian	90
		Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	76,91
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur jaringan Irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	69,22
		Meningkatnya kualitas infrastruktur pemukiman	Indeks infrastruktur pemukiman	Persen	91,14
4	**Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup**	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	68,19
MISI 4 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern					
NO	**TUJUAN**	**SASARAN KINERJA**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET**
5	**Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Dan Modern** Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi Target : 74,70	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat	BB (75,18)
			Opini Pengelolaan Keuangan	Opini	WTP
			Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Angka	3,780
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,70
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	Sangat Baik

Sumber Data : Balitbangren, dan Bagian Organisasi Polewali Mandar, 2024

2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Untuk mengetahui capaian sasaran strategis tersebut perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 mencakup penilaian pencapaian target sasaran yang tersebut di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024. Capaian kinerja sasaran diukur dan didekati dari capaian beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Penetapan dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024.

Pengukuran kinerja sasaran yang termuat di dalam penetapan kinerja adalah capaiankinerja yang merupakan cerminan efektifitas proses penganggaran program kegiatansebagaimana tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2024. Program dan kegiatan pada tiap-tiap OPD merupakan aksi nyata di dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tahap pertama pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar. Sehingga keberhasilan capaian kinerja pada setiap program maupun kegiatan akan berpengaruh langsung maupun tidak langsung pada capaian kinerja tiap- tiap sasaran pembangunan Kabupaten Polewali Mandar.

Dari 26 indikator kinerja yang mendukung 18 sasaran kinerja, ada kinerja sasaran telah mencapai target bahkan ada yang melebihi target dan ada beberapa kinerja sasaran yang belum mencapai target atau tidak berhasil. Berikut diuraikan berdasarkan tujuan dan sasaran kinerja :

a. Tujuan Meningkatnya Taraf Hidup Dan Kualitas Sumber Daya Masyarakat

Pada tujuan ini terdiri dari 7 (tujuh) sasaran kinerja dan 11 (sebelas) indikator kinerja. Indikator kinerja Angka Kemiskinan dari 15,71 % yang ditargetkan berhasil mencapai realisasi 15,66 % atau dengan kata lain adanya penurunan angka kemiskinan dari target yang diharapkan. Sedangkan pada indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka belum mencapai dari target yang diharapkan, dimana targetnya adalah 2,00 sedangkan realisasinya lebih tinggi sebesar 3,10 sehingga adanya peningkatan pengangguran terbuka dari target yang diinginkan. Persentase desa maju dan mandiri mengalami capaian kinerja yang cukup tinggi yaitu 165,29 % dimana target yang ditetapkan sebesar 34,03 % dan realisasi di tahun 2024 sebesar 56,25 % dengan kategori Sangat Berhasil.

Meningkatnya ketahanan pangan dengan tolak ukur indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan berada pada kategori berhasil dengan capaian 99,97 %. Sedangkan pada indikator kinerja Pengeluaran Konsumsi Rata-Rata Perkapita melebihi target dengan capaian 111,99% atau sangat berhasil. Pada Sasaran kinerja lainnya yaitu meningkatnya kualitas Pendidikan dengan indikator Rata-Rata Lama Sekolah dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 7,78 tahun dan berhasil mencapai 7,72 tahun atau 99,22%. Begitupula pada indikator Harapan Lama Sekolah yang mencapai 99,48% dari target 13,57 dengan realisasi 13,50.

Pada bidang kesehatan dengan sasaran kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan untuk indikator kinerja Angka Harapan Hidup (AHH) juga melebihi target yang ditetapkan dimana targetnya sebesar 63,04 tahun dengan realisasi 71,08 tahun atau 112,75 % dengan kategori sangat berhasil. Sedangkan indikator kinerja Prevalensi Stunting dari target yang ditetapkan yaitu 35,02% terealisasi sebesar 21,04% atau dengan capaian realisasi sebesar 163,64% dengan kata lain Sangat Berhasil. Pada tahun 2024 dalam mendukung dan mengukur keberhasilan sasaran kinerja meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak, dilaksanakan indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Predikat Kabupaten Layak Anak.

Realisasi IPG yang dicapai adalah 92,14 dari target 92,26 atau dengan capaian 99,87% dengan kategori berhasil. Indikator kinerja lainnya yaitu Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA), dimana Kabupaten Polewali Mandar memperoleh predikat Pratama.

b. Tujuan Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Yang Merata Dan Berkualitas

Pada tujuan ini memiliki 4 (empat) sasaran kinerja dan 5 (lima) indikator kinerja yang membidangi sektor atau urusan perdagangan, industri, pariwisata, investasi, pertanian, kehutanan dan perikanan. Indikator kinerja Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 7,37 persen dan hanya terealisasi sebesar 5,20 persen atau 70,56 % dengan kata lain belum behasil. Sedangkan indikator kinerja Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran sangat berhasil melampaui target yang ditetapkan atau dengan capaian 142,11 %.

Sasaran kinerja meningkatnya kunjungan wisatawan di tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan. Dimana adanya kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara mencapai bahkan jauh melebihi dari target 400.010 orang. Realisasi kunjungan jumlah wisatawan melebihi target tersebut dengan jumlah wisatawan 790.424 orang atau dengan capaian 197,60%. Begitupula dengan peningkatan nilai investasi daerah yang mencapai Rp. 656.632.116.292 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 559.570.070.397 atau 117,35 % dengan kata lain sangat berhasil.

Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga mengalami pencapaian di atas target yang ditetapkan yaitu 119,06% atau sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari realisasi yang dicapai sevesr 6,06 persen melebihi dari target sebesar 5,09 persen.

c. Tujuan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

Pada tujuan ini terdapat 4 (empat) indikator kinerja, yaitu, angka kecelakaan lalu lintas sebanyak 312 Kejadian di tahun 2024. Angka ini sedikit jauh melebihi dari target yang diperkirakan sebanyak 90 kejadian, Persentase jalan dalam kondisi mantap dengan target sebesar 76,91 persen dan terealisasi sebesar 52,43 persen dengan capaian sebesar 68,17 % atau kategori belum berhasil. Pada indikator lainnya persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik yang ditargetkan sebesar 69,22 persen terealisasi 69,89 persen atau 100,97 %. Indeks infastruktur permukiman dengan nilai realisasi sebesar 86,61 persen sedikit mendekati target yang diharapkan sebesar 91,14 persen atau 95,03 % dengan kata lain cukup berhasil.

d. Tujuan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 diketahui bahwa untuk nilai capaian Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu 55,91, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan capaian 89,96 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) sebesar 49,80. Sehingga capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 yaitu 68,36. Capaian tersebut di atas target yang ditetapkan yaitu 68,19 atau 100,24 % dengan demikian Indikator kinerja IKLH kategori berhasil.

e. Tujuan Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Dan Modern

Pada tujuan ini ada 2 (dua) sasaran kinerja yang ditetapkan untuk mendukung reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel dan modern. Sasaran kinerja dimaksud yaitu sasaran kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator kinerja predikat SAKIP yang memperoleh predikat BB atau dengan nilai 70,73. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabiltas kinerja sangat baik. Kemudian opini pengelolaan keuangan daerah yang meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), serta Tingkat Maturitas SistemPengendalian Internal

(SPIP) yang mencapai skor nilai 3,450 dari target yang ditetapkan 3,780 atau persentase capaian sebesar 91,27%.

Sasaran kinerja yang kedua adalah Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan indikator kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencapai angka penilaian sebesar 3,88 atau predikat sangat baik di tahun 2024. Selanjutnya indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang memperoleh nilai akhir 93,66 atau predikat Sangat Baik.

Untuk lebih jelasnya Indikator Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel 2.9. berikut.

Tabel 2.9.
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024

VISI : POLEWALI MANDAR MAJU, RAKYAT SEJAHTERA							
MISI 1 : Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Lebih Baik dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Religius							
NO	**TUJUAN**	**SASARAN KINERJA**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	**MENINGKATNYA TARAFHIDUP DAN KUALITAS SUMBER DAYA MASYARAKAT** ***Indikator : Angka kemiskinan*** Target : 15,71 % Realisasi : 15,66 % Capaian : 100,31 % ***Indikator : Indeks Pembangunan Manusia*** Target : 65,49 Realisasi : 69,88 Capaian : 106,7 %	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Persen	15,71	15,66	**100,31 %**
		Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,00	3,10	**64,51 %**
		Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal	Persentase Desa Maju dan Mandiri	Persen	34,03	56,25	**165,29 %**
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	88,53	88,5	**99,97 %**
			Pengeluaran Konsumsi Rata-Rata perkapita	Rupiah	919.447	1.029.771	**111,99 %**
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,78	7,72	**99,22 %**
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,57	13,50	**99,48 %**
		Meningkatnya derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	63,04	71,08	**112,75 %**
			Prevalensi Stunting	Persen	35,02	21,4	**163,64 %**
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,26	92,14	**99,87 %**
			Predikat Kabupaten Layak anak (KLA)	Predikat	Madya	Pratama	**Pratama**
MISI 2 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah							
NO	**TUJUAN**	**SASARAN KINERJA**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
2	**Meningkatnya daya saing ekonomi yang merata dan berkualitas** ***Indikator : Persentase Pertumbuhan Ekonomi*** Target : 5,50 % Realisasi : 5,94 %	Meningkatnya Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	7,37	5,20	**70,56 %**
			Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	Persen	5,58	7,93	**142,11 %**
		Meningkatnya Daya Saing Usaha Pariwisata Daerah	Jumlah wisatawan	Orang	400.010	790.424	**197,60 %**
		Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai investasi	Rupiah	559.570. 070.397	656.632 116.292	**117,35 %**

	Capaian : 108 %	Meningkatnya Pemerataan Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	5,09	6,06	**119,06 %**
MISI 3 : Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas Serta Berwawasan Lingkungan							
NO	**TUJUAN**	**SASARAN KINERJA**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
3	**Meningkatnya kualitas infrastruktur** ***Indikator : Indeks Infrastruktur*** Target : 91,52% Realisasi : 84,02% Capaian : 91,81%	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan sistem transportasi	Angka kecelakaan lalu lintas	Kejadian	90	312	**346,66%**
		Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	76,91	52,43	**68,17 %**
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur jaringan Irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	69,22	69,89	**100,97 %**
		Meningkatnya kualitas infrastruktur pemukiman	Indeks infrastruktur pemukiman	Persen	91,14	86,61	**95,03 %**
4	**Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup**	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkunganhidup	Persen	68,19	68,36	**100,24 %**
MISI 4 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern							
NO	**TUJUAN**	**SASARAN KINERJA**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
5	**Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern** ***Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi*** Target : 71,92 Realisasi : 71,36 Capaian : 99,22 %	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat	BB (75,18)	BB (70,73)	**94,08 %**
			Opini Pengelolaan Keuangan	Opini	WTP	WDP	**WDP**
			Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Angka	3,780	3,450	**91,27**
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,70	3,88	**104,86 %**
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	Sangat Baik	93,66 Sangat Baik	**Sangat Baik**

Sumber Data : Balitbangren, dan Bagian Organisasi Polewali Mandar, 2025

2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dan dibandingan dengan tahun sebelumnya, sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 2.10 di bawah maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada semua sasaran strategis dan indikator kinerja mengalami peningkatan pada beberapa indikator namun ada juga yang mengalami penurunan pada indikator yang lain. Secaraumum rata-rata realisasi capaian kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2023.

a. Tujuan Meningkatnya Taraf Hidup Dan Kualitas Sumber Daya Masyarakat

Realisasi capaian kinerja tahun 2024 pada Indikator kinerja angka kemiskinan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, dari 16,08 di tahun 2023 menjadi 15,66 atau menurun sebesar 0,42 poin, capaian tersebut merupakan hasil yang positif. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan sebesar 1,15

poin dari 1,95 % di tahun 2023 menjadi 3,10 % di tahun 2024. Adapun indikator kinerja Persentase Desa Maju Mandiri mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 19,44% menjadi 56,25% di tahun berikutnya.

Pada sasaran kinerja Meningkatnya Ketahanan Pangan untuk indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya dari 87,98 menjadi 88,5 atau naik sebesar 0,52 poin. Sedangkan indikator lainnya Pengeluaran Konsumsi Rata-Rata Perkapita juga mengalami peningkatan signifikan dari Rp. 1.004.050,10 menjadi Rp. 1.029.771. Sasaran kinerja meningkatnya kualitas Pendidikan juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, pada indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dimana di tahun 2023 berada pada angka 7,71 tahun menjadi 7,78 tahun di tahun 2024. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) juga mengalami sedikit peningkatan dari 13,48 tahun menjadi 13,50 tahun.

Sedangkan pada sasaran kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan untuk indikator Angka Harapan Hidup (AHH) di tahun 2023 berada pada angka 63,20 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 71,08. Berbeda dengan indikator kinerja Prevalensi Stunting yang justru menunjukkan hasil positif dengan angka prevalensi stunting tahun sebelumnya dari 22,03 % menjadi 21,4 % atau turun sebesar 0,63 poin. Realisasi capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak mengalami banyak perubahan, dimana realisasi tahun 2023 sebesar 92,01 dan di tahun 2024 sedikit meningkat sebesar 92,14. Begitupula dengan Indikator Kinerja Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) yang kembali memperoleh predikat Pratama.

b. Tujuan Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Yang Merata Dan Berkualitas

Semua indikator kinerja pada sasaran strategis dan tujuan ini mengalami peningkatan capaian kinerja dibanding tahun sebelumnya kecuali Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, dari 7,61 % menjadi 5,20 % di tahun 2024. Indikator kinerja Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran pada tahun 2023 dengan realisasi capaian 4,99 % dan di tahun 2024 meningkat menjadi 7,93 % atau naik sebesar 2,94 poin. Demikian juga dengan indikator kinerja Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,93 poin. Dimana di tahun 2023 sebesar 5,13 % sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 6,06 %.

Indikator kinerja jumlah wisatawan dan nilai investasi juga mengalami tren positif dan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya. Dimana jumlah wisatawan meningkat menjadi 790.424 orang dibanding tahun sebelumnya sebanyak 620.855 orang atau dengan kata lain terjadi penambahan sebear 169.569 wisatawan. Begitupula dengan nilai investasi yang terus mengalami peningkatan. Tahun 2023 sebesar Rp. 656.632.116.292 kemudian meningkat di tahun 2024 sebesar Rp. 651.234.944.128.

c. Tujuan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

Untuk mengukur tingkat keberhasilan tujuan ini dan sasaran kinerjanya maka ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja yang mendukung, yaitu angka kecelakaan lalu lintas, dimana dari data yang ada bahwa di tahun 2023 jumlah kejadian sebanyak 311 kejadian dan di tahun 2024 sedikit mengalami peningkatan jumlah kejadian sebesar 312 kejadian. Indikator kinerja lainnya yaitu Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap mengalami penurunan capaian dibanding tahun sebelumnya dari 58,95 % di tahun 2023 menjadi 52,43 % di tahun 2024. Begitupula dengan Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik yang juga mengalami penurunan dari 80,43 % di tahun 2023 menjadi 69,89 % di tahun 2024 atau menurun sebesar 10,54 poin. Adapun Indikator kinerja Indeks Infrastruktur Permukiman mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana di tahun 2023 sebesar 84,72% menjadi 86,61% di tahun 2024.

d. Tujuan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2023 sebesar 71,40 dan di tahun 2024 sebesar 68,36. Hal ini menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja IKLH dibanding tahun sebelumnya atau menurun sebesar 3,04 poin. Hasil IKLH ini diharapkan meningkat Kembali untuk di tahun-tahun berikutnya.

e. Tujuan Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Dan Modern

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar meraih predikat opini Wajar Dengan Pengecualian. Hal ini berbeda disbanding tahun-tahun sebelumnya yang telah meraih predikat WTP 7 (tujuh) tahun berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan untuk indikator kinerja lainnya, Hasil penilaian Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal (SPIP) di tahun 2024 belum dirilis oleh BPKP Sulawesi Barat sehingga masih menggunakan data nilai tahun sebelumnua yaitu dengan skor 3,450. Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, indikator kinerja predikat SAKIP di tahun 2024 berhasil meraih predikat BB atau nilai 70,73, namun nilai capaian tersebut sedikit lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yaitu 72,04.

Untuk indeks kepuasan Masyarakat (IKM) di tahun 2024 mendapatkan predikat Sangat Baik atau dengan nilai 93,66 (Kualitas Tinggi). Hasil ini lebih baik dari tahun sebelumnya yang mendapatkan skor penilaian 80,68 (Kualitas Tinggi), dengan demikian ada peningkatan sebesar 12,98 poin. Begitupula dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengalami peningkatan nilai dibanding tahun sebelunya yaitu di tahun 2023 berhasil meraih 3,86 (sangat baik) sedangkan tahun 2024 dengan nilai 3,88 (sangat baik) atau dengan kata lain terdapat peningkatan sebesar 0,02 poin dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.10.
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

VISI : POLEWALI MANDAR MAJU, RAKYAT SEJAHTERA									
MISI 1 : Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Lebih Baik dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Religius									
NO	**TUJUAN**	**SASARAN KINERJA**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET 2024**	**REALISASI 2024**	**CAPAIAN (%)**	**REALISASI 2023**	***PERUBAHAN 2024-2023***
1	**Meningkatnya Taraf Hidup dan Kualitas Sumber Daya Masyarakat** ***Indikator : Angka kemiskinan*** Target : 15,71 % Realisasi : 15,66 % Capaian : 100,31 % ***Indikator : Indeks Pembangunan Manusia*** Target : 65,49 Realisasi : 69,88 Capaian : 106,7 %	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Persen	15,71	15,66	**100,31 %**	16,08	*0,42* ↓
		Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,00	3,10	**64,51 %**	1,95	*1,15* ↑
		Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal	Persentase Desa Maju dan Mandiri	Persen	34,03	56,25	**165,29 %**	19,44	*36,81* ↑
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	88,53	88,5	**99,97 %**	87,98	*0,52* ↑
			Pengeluaran Konsumsi Rata-Rata perkapita	Rupiah	919.447	1.029.771	**111,99 %**	1.004.050,10	*25.720,9* ↑
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,78	7,72	**99,22 %**	7,71	*0,01* ↑
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,57	13,50	**99,48 %**	13,48	*0,02* ↑
		Meningkatnya derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	63,04	71,08	**112,75 %**	63,20	*7,88* ↑
			Prevalensi Stunting	Persen	35,02	21,4	**163,64 %**	22,03	*0,63* ↓
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,26	92,14	**99,87 %**	92,01	*0,13* ↑
			Predikat Kabupaten Layak anak (KLA)	Predikat	Madya	Pratama	**Pratama**	Pratama	↔
MISI 2 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah									
NO	**TUJUAN**	**SASARAN KINERJA**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET 2024**	**REALISASI 2024**	**CAPAIAN (%)**	**REALISASI 2023**	***PERUBAHAN 2024-2023***
2	**Meningkatnya daya saing ekonomi yang merata dan berkualitas**	Meningkatnya Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	7,37	5,20	**70,56 %**	7,61	*2,41* ↓

	Indikator : Persentase Pertumbuhan Ekonomi Target : 5,50 % Realisasi : 5,94 % Capaian : 108 %		Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	Persen	5,58	7,93	**142,11 %**	4,99	*2,94* ↑
		Meningkatnya Daya Saing Usaha Pariwisata Daerah	Jumlah wisatawan	Orang	400.010	790.424	**197,60 %**	620.855	*389.267* ↑
		Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai investasi	Rupiah	559.570. 070.397	656.632 116.292	**117,35 %**	651.234. 944.128	5.397. 172.164 ↑
		Meningkatnya Pemerataan Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	5,09	6,06	**119,06 %**	5,13	*0,93* ↑
MISI 3 : Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas Serta Berwawasan Lingkungan									
NO	**TUJUAN**	**SASARAN KINERJA**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET 2024**	**REALISASI 2024**	**CAPAIAN (%)**	**REALISASI 2023**	***PERUBAHAN 2024-2023***
3	**Meningkatnya kualitas infrastruktur** ***Indikator : Indeks Infrastruktur*** Target : 91,52% Realisasi : % Capaian : %	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan sistem transportasi	Angka kecelakaan lalu Lintas	Kejadian	90	312	**346,66%**	311	1 ↑
		Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	76,91	52,43	**68,17 %**	58,95	*6,52* ↓
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur jaringan Irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	69,22	69,89	**100,97 %**	80,43	*10,54* ↓
		Meningkatnya kualitas infrastruktur pemukiman	Indeks infrastruktur Pemukiman	Persen	91,14	86,61	**95,03 %**	84,72	*1,89* ↑
4	**Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup**	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	68,19	68,36	**100,24 %**	71,40	*3,04* ↓
MISI 4 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern									
NO	**TUJUAN**	**SASARAN KINERJA**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET 2024**	**REALISASI 2024**	**CAPAIAN (%)**	**REALISASI 2023**	***PERUBAHAN 2024-2023***
5	**Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern**	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat	BB (75,18)	BB (70,73)	**94,08 %**	BB (72,04)	BB (*1,31* ↓)

	Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi Target : 71,92 Realisasi : 71,36 Capaian : 99,22 %		Opini Pengelolaan Keuangan	Opini	WTP	WDP	**WDP**	WTP	↓
			Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Angka	3,780	3,450	**91,27**	3,450	↔
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,70	3,88	**104,86 %**	3,86	*0,02* ↑
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik (93,66)	**Sangat Baik**	Sangat Baik (80,68)	Sangat Baik *(12.98* ↑*)*

Sumber Data : Balitbangren, dan Bagian Organisasi Polewali Mandar, 2025

Tabel 2.11.
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

VISI : POLEWALI MANDAR MAJU, RAKYAT SEJAHTERA												
MISI 1 : Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Lebih Baik dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Religius												
NO	**TUJUAN**	**SASARAN KINERJA**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET 2019**	**TARGET 2020**	**TARGET 2021**	**TARGET 2022**	**TARGET 2023**	**TARGET 2024**	**REALISASI 2024**	**CAPAIAN 2024**
1	**Meningkatnya Taraf Hidup dan Kualitas Sumber Daya Masyarakat** ***Indikator : Angka kemiskinan*** Target : 15,71 % Realisasi : 15,66 % Capaian : 100,31 %	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Persen	15,00	15,26	15,68	16,39	16,05	15,71	15,66	**100,31 %**
		Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,01	3,15	3,38	2,16	2,10	2,00	3,10	**64,51 %**
		Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal	Persentase Desa Maju dan Mandiri	Persen	5,56	8,33	5,56	31,25	32,64	34,03	56,25	**165,29 %**
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	86,32	86,40	87,87	87,89	88,17	88,53	88,5	**99,97 %**
			Pengeluaran Konsumsi Rata-Rata perkapita	Rupiah	830.977	834.110	804.358	883.870	893.662	919.447	1.029.771	**111,99 %**
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,40	7,41	7,44	7,60	7,69	7,78	7,72	**99,22 %**
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,05	13,06	13,38	13,39	13,48	13,57	13,50	**99,48 %**

	Indikator : Indeks Pembangunan Manusia Target : 65,49 Realisasi : 69,88 Capaian : 106,7 %	Meningkatnya derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	62,17	62,38	62,59	62,79	62,79	63,04	71,08	**112,75 %**
			Prevalensi Stunting	Persen	39,40	-	36,00	39,26	37,14	35,02	21,4	**163,64 %**
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	91,75	90,02	91,56	92,00	92,13	92,26	92,14	**99,87 %**
			Predikat Kabupaten Layak anak (KLA)	Predikat	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Pratama	**Pratama**

MISI 2 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah

NO	TUJUAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
2	**Meningkatnya daya saing ekonomi yangmerata dan berkualitas** ***Indikator : Persentase Pertumbuhan Ekonomi*** Target : 5,50 % Realisasi : 5,94 % Capaian : 108 %	Meningkatnya Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	7,35	0,04	5,54	5,33	6,63	7,37	5,20	**70,56 %**
			Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	Persen	4,80	-2,45	3,65	3,31	4,77	5,58	7,93	**142,11 %**
		Meningkatnya Daya Saing Usaha Pariwisata Daerah	Jumlah wisatawan	Orang	450.968	800.300	223.447	389.047	400.000	400.010	790.424	**197,60 %**
		Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai investasi	Rupiah	494.552. 801.000	78.957. 486.000	79.507. 530.000	186.523. 356.799	373.046. 713.598	559.570. 070.397	656.632 116.292	**117,35 %**
		Meningkatnya Pemerataan Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	6,27	0,84	1,42	4,67	4,84	5,09	6,06	**119,06 %**

MISI 3 : Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas Serta Berwawasan Lingkungan

NO	TUJUAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
3	**Meningkatnya kualitas infrastruktur**	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan sistem transportasi	Angka kecelakaan lalu Lintas	Kejadian	256	168	178	218	120	90	312	**346,66%**
		Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	63,83	73,29	78,95	74,35	75,63	76,91	52,43	**68,17 %**

	Indikator : Indeks Infrastruktur Target : 91,52% Realisasi : % Capaian : %	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur jaringan Irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	78,86	81,50	73,04	64,66	66,94	69,22	69,89	**100,97 %**
		Meningkatnya kualitas infrastruktur pemukiman	Indeks infrastruktur Pemukiman	Persen	80,13	83,67	86,87	88,13	89,65	91,14	86,61	**95,03 %**
4	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	68,55	69,22	66,63	65,58	67,67	68,19	68,36	**100,24 %**
MISI 4 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern												
NO	**TUJUAN**	**SASARAN KINERJA**	**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**TARGET 2019**	**TARGET 2020**	**TARGET 2021**	**TARGET 2022**	**TARGET 2023**	**TARGET 2024**	**REALISASI 2024**	**CAPAIAN 2024**
5	**Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern** ***Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi*** Target : 71,92 Realisasi : 71,36 Capaian : 99,22 %	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat	BB 70,17	BB 70,76	BB 71,95	BB 72,16	BB 73,67	BB (75,18)	BB (70,73)	**94,08 %**
			Opini Pengelolaan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	**WDP**
			Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Angka	3,030	3,040	3,110	3,530	3,650	3,780	3,450	**91,27**
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,57	3,30	2,71	3,58	3,64	3,70	3,88	**104,86 %**
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	Baik	Baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat Baik	93,66 Sangat Baik	**Sangat Baik**

Sumber Data : Balitbangren, dan Bagian Organisasi Polewali Mandar, 2025

2.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Tahun 2024 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024. Dimana dalam pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target di dalam RPJMD masih mengukur di 5 (lima) tahun terakhir yaitu 2019 sampai dengan 2024. Adapun Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah dapat dilihat pada tabel 2.11. di atas dan diuraikan sebagai berikut.

a. Tujuan Meningkatnya Taraf Hidup Dan Kualitas Sumber Daya Masyarakat

a.1. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

- Indikator Kinerja **Angka Kemiskinan**

Selama 5 (lima) tahun terakhir, penurunan kemiskinan di tahun 2020 juga menunjukkan kinerja yang cukup baik, yaitu dengan angka penurunan sebesar 0,34% dari tahun 2019. Namun pada tahun 2021 angka kemiskinan kembali meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dimana pada tahun tersebut angka kemiskinan berada pada 15,68. Pada tahun 2022 kembali meningkat hingga mencapai 16,39%. Kemudian menurun di tahun 2023 hingga tahun 2024 menjadi 15,66%. Pada tahun 2024 garis kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar yaitu 507.347 rupiah/kapita/bulan, jumlah penduduk miskin sebanyak 70,42 ribu orang dengan persentase sebesar 15,66 persen. Sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2024 sebesar 3,09 dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,88.

Chart. 2.1.
Angka Kemisikinan Kab. Polewali Mandar Tahun 2019-2024

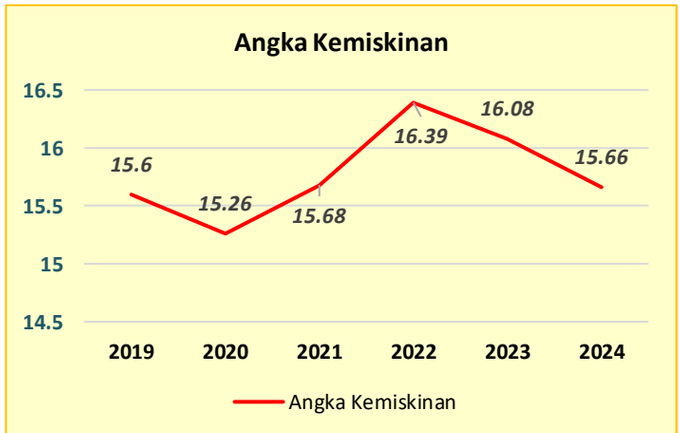

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk Miskin (Ribu)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2019	376.827	68,86	15,6	3	0,84
2020	401.057	68,18	15,26	2,74	0,79
2021	416.443	69,32	15,68	2,52	0,59
2022	452.836	72,87	16,39	3,26	0,94
2023	482.658	71,92	16,08	2,42	0,58
2024	507.347	70,42	15,66	3,09	0,88

a.2. Sasaran Kinerja Berkurangnya Pengangguran

- Indikator Kinerja **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Hal ini disebabkan oleh adanya pertambahan angkatan kerja baru dan hal tersebut tidak diikuti dengan pertumbuhan lapangan kerja secara signifikan. Pada tahun 2024 di Kabupaten Polewali Mandar jumlah angkatan kerja sebesar 259.466, terdiri dari 153.068 laki-laki dan 106.398 orang perempaun. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, 96,90% atau 251.424 orang bekerja dan 3,10% atau 8.042 orang pengangguran terbuka.

Penduduk yang termasuk Bukan Angkatan Kerja sebesar 107.938 orang. Terdiri dari 27,04% atau 29.186 laki-laki dan 72,96% atau 78.752 perempuan. Berdasarkan grafik tren TPT 5 (lima) tahun terakhir di bawah, diketahui bahwa penurunan TPT terendah ada di tahun 2023 dengan capaian 1,95%. Namun Kembali mengalami peningkatan di tahun berikutnya.

Chart. 2.2.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2019-2024

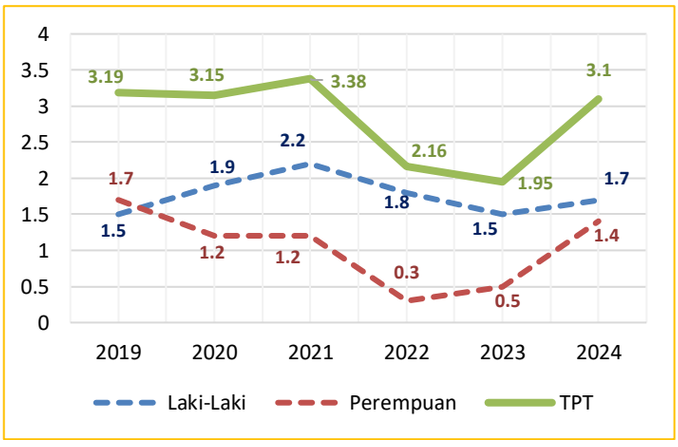

a.3. Sasaran Kinerja Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal

- Indikator Kinerja **Persentase Desa Maju dan Mandiri**

Pembangunan ekonomi suatu wilayah lebih mengarah pada pendekatan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya lokal yang merupakan faktor-faktor endogen wilayah tersebut secara optimal dan maksimal. Adapun Pengembangan Ekonomi Lokal sendiri pada prinsipnya merupakan “Suatu proses ketika aktor-aktor di dalam komunitas baik kota atau desa, pemerintah, swasta dan Masyarakat bekerjasama secara kolektif untuk menciptakan kondisi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan ekonomi lokal juga perlu diarahkan untuk mendukung perkembangan sektor- sektor ekonomi yang mempunyai potensi menciptakan kesempatan kerja yang luas.

Dalam aspek membaiknya ketahanan ekonomi desa, persoalan umum yang dialami adalah aspek kualitas administrasi pemerintahan desa. Hal yang menyangkut administrasi antara lain dokumen perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. Pedoman Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah dan desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa.

Berdasarkan data pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Indeks Desa Membangun (IDM) pada situs Kementrian Desa, pada tahun 2024, tercatat

jumlah desa yang terlah masuk dalam kategori desa Mandiri adalah 33 desa dan Desa Maju adalah 48 desa dari 144 desa se-Kabupaten Polewali Mandar atau 56,25%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun yang sama, yaitu 34,03%, maka capaian kinerja indikator ini adalah 165,29% dengan kategori Sangat Berhasil. Apabila mencermati trend perkembangan status desa selama kurun waktu Tahun 2019-2024, terlihat bahwa sebanyak 5 Desa dengan status Sangat Tertinggal telah dientaskan di tahun 2019.

Berdasarkan tabel di bawah, realisasi kinerja antara 2020 sampai dengan tahun 2024, desa dengan kategori Berkembang semakin berkurang/menurun, begitu juga desa dengan kategori Maju mengalami kenaikan/terus bertambah dari 144 desa se-Kabupaten Polewali Mandar. Secara rinci status desa dapat dicermati pada table …. dibawah:

Tabel 2.12.
Kategori Desa Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal dan Sangat Tertinggal
Kab. Polewali Mandar Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mandiri	-	-	-	16	33
2	Maju	12	8	45	59	48
3	Berkembang	89	94	83	59	55
4	Tertinggal	43	38	16	10	8
5	Sangat Tertinggal	-	-	-	-	-

a.4. Sasaran Kinerja Meningkatnya Ketahanan Pangan

Meningkatnya Ketahanan Pangan yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan tujuan kedua (tanpa kelaparan) dalam pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs). Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2024 yaitu 75,87 dari target 73,87 atau 103% melampaui target dengan kata lain sangat berhasil.

- Indikator Kinerja **Skor Pola Pangan Harapan**

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 adalah sebesar 88,5. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2024 yaitu 88,53, maka kinerja peningkatan ketahanan pangan dari indikator Skor Pola Pangan Harapan adalah sebesar 99,97% dengan kategori capaian Berhasil. Berdasarkan analisis Skor PPH selama 5 (lima) tahun terakhir, capaian Skor PPH Kabupaten Polewali Mandar di tahun 2024 merupakan yang tertinggi.

Chart. 2.3.
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024

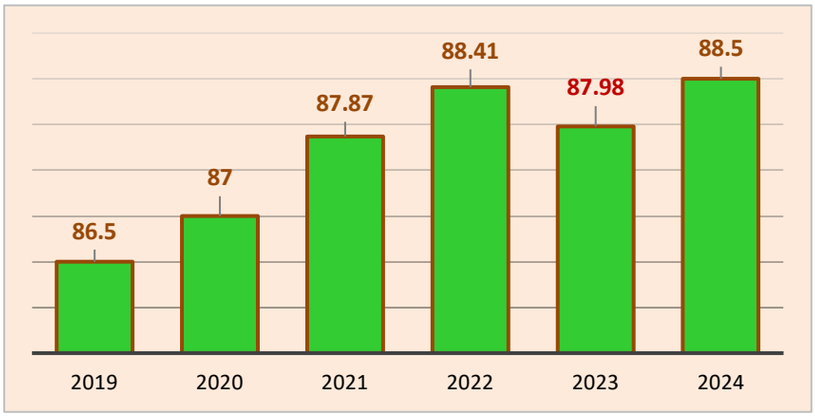

- Indikator Kinerja **Pengeluaran Konsumsi Rata-Rata Perkapita**

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan, baik yang berasal dari pembelian, pemberian, maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran per kapita saat ini masih menjadi indikator favorit yang sering digunakan untuk memprediksi perkembangan perekonomian penduduk.

Pada tahun 2024, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp. 1.029.771. Rata-rata pengeluaran untuk kelompok makanan sebesar Rp. 588.557. Pengeluaran terbesar adalah untuk makanan dan minuman jadi sebesar Rp. 146.154, kemudian padi-padian sebesar R123.058, berikutnya pengeluaruntuk rokok sebesar Rp. 93.430.

Sedangkan untuk kelompok pengeluaran bukan makanan sebesar Rp. 441.214. Pada kelompok ini pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga menduduki urutan terbesar, sebesar Rp. 239.852, kemudian pengeluaran untuk aneka komoditas dan jasa sebesar Rp. 83.192. Jika dirinci menurut golongan pengeluaran, dari total seluruh penduduk Polewali Mandar, paling banyak berada pada golongan pengeluaran Rp. 500.000 – 749.999, yaitu sebanyak 29,81 persen, kemudian golongan pengeluaran antara Rp. 1.000.000-1.499.999, yaitu sebesar 21,05 persen.

Chart. 2.4.
Pengeluaran Konsumsi Rata-Rata Perkapita Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023-2024

a.5. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pendidikan

- Indikator Kinerja **Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)**

Rata-Rata Lama Sekolah adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis Pendidikan yang pernah dijalani. Realisasi Capaian indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Polewali Mandar di tahun 2024 adalah 7,72 tahun. Angka tersebut mendekati target yang telah ditetapkan di tahun sama, yaitu sebesar 7,78 tahun sehingga capaian reaslisasi indikator tersebut adalah sebesar 99,22% atau dikategorikan Berhasil. Dari trend selama 5 (lima) tahun terakhir juga menunjukkan bahwa secara konsisten, indikator kinerja rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 0,32 tahun dari tahun 2019. Capaian di tahun 2024 juga merupakan yang tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dengan demkian diharapkan dalam waktu-waktu mendatang akan terus meningkat seiring keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS pada Polewali Mandar Dalam Angka 2025, trend RLS Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:

Chart. 2.5.
Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Polewali MandarTahun 2019-2024

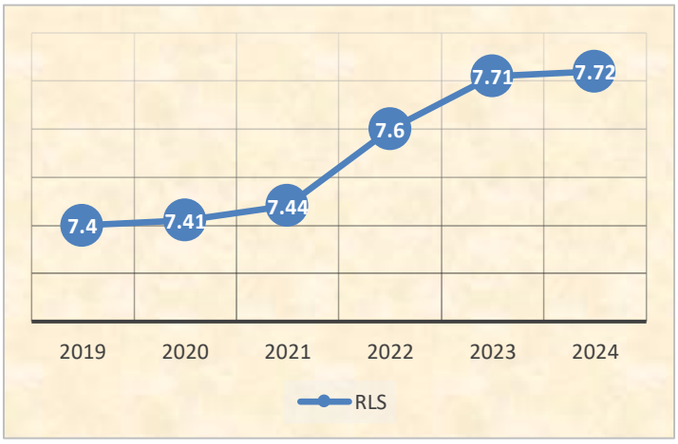

- Indikator Kinerja **Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Indikator ini digunakan untuk mengetahui kondisi Pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Polewali Mandar pada tahun 2024 adalah 13,50 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,50 tahun atau setara dengan Diploma II.

Trend Harapan Lama Sekolah pada Kabupaten Polewali Mandar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, sejak tahun 2019 sampai dengan 2024 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 13,05 pada tahun 2019 menjadi 13,50 di tahun 2024. Peningkatan tersebut hampir mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun yang sama yaitu 13,57 tahun atau dengan capaian 99,48% sehingga berada pada kategori berhasil. Adapun, kondisi HLS Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan data BPS Tahun 2025, sebagai berikut :

Chart. 2.6.
Harapan Lama Sekolah Kab. Polewali MandarTahun 2019-2024

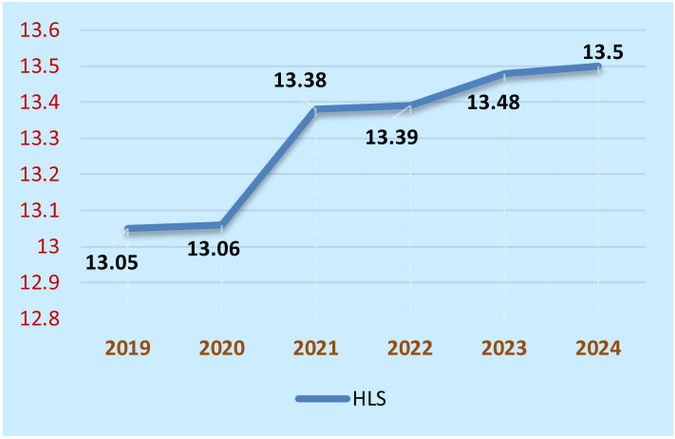

a.6. Sasaran Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan

- Indikator Kinerja **Angka Harapan Hidup (AHH)**

Capaian AHH Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 adalah 71,08 tahun. AHH tersebut melebihi target AHH yang telah ditetapkan yaitu 63,04 tahun sehingga capaian kinerja AHH Polewali Mandar Tahun 2024 adalah 112,75% dengan kategori Sangat Berhasil. Angka Harapan Hidup Kabupaten Polewali Mandar juga secara konsisten meningkat setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2019-2024, meningkat sebesar 8,9 tahun. Capaian di tahun 2024 merupakan yang tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Chart. 2.7.
Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2019-2024

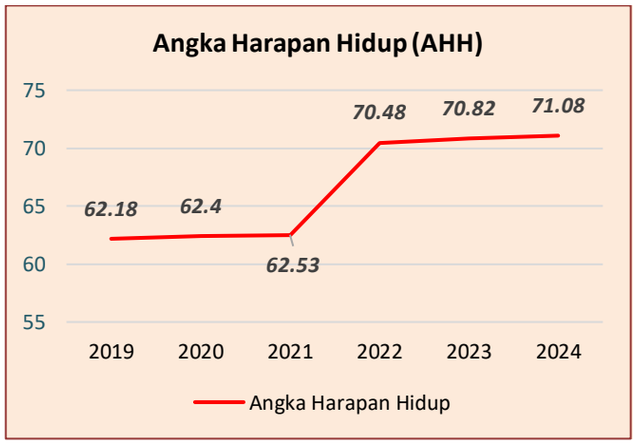

- Indikator Kinerja **Prevalensi Stunting**

Untuk penanganan stunting di kabupaten Polewali Mandar salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah Rembuk Stunting. Kegiatan ini merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kabupaten untuk memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi penurunan stunting secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat. Pemerintah kabupaten secara bersama-sama akan melakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergi hasil analisis situasi dengan rencana kegiatan dari OPD penanggung jawab layanan di kabupaten.

Prevalensi stunting tahun 2024 mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan karena telah melakukan kegiatan yang mendukung percepatan

penurunan stunting, melakukan upaya perbaikan gizi masyarakat, program kegiatan untuk mengintervensi penurunan prevalensi stunting sudah melibatkan lintas sektor. Adapun capaian realisasi prevalensi stunting bersumber dari E-PPBGM di tahun 2024 adalah 21,4%. Pada tahun 2021 persentase prevalensi stunting sempat mengalami kenaikan hingga 23,80, namun di 3 (tiga) tahun terakhir berhasil diturunkan 2,4 poin hingga di tahun 2024.

Chart. 2.8.
Prevalensi Stunting Tahun 2019-2024

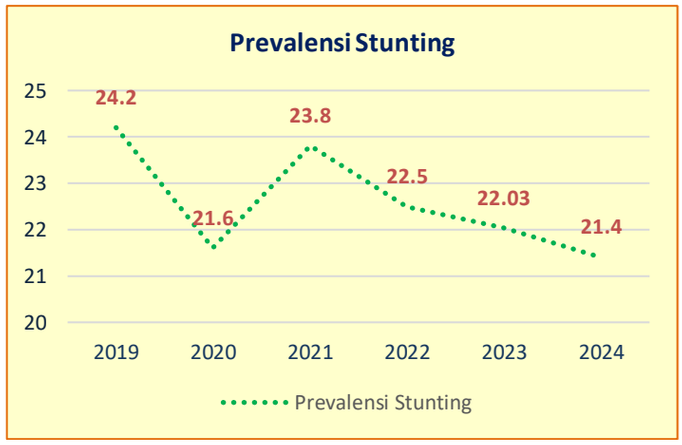

a.7. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

- Indikator Kinerja **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Realisasi kinerja pada indikator Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Polewali Mandar di Tahun 2024 adalah sebesar 92,14 dari target yang ditetapkan sebesar 92,80 pada tahun yang sama sehingga capaian kinerja sebesar 99,87% dengan predikat berhasil. Data di bawah ini juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan Indeks IPG di tahun 2020 dari tahun sebelumnya, namun kembali menurun menjadi 91,56. Sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 92,02 dan di tahun 2023 sedikit menurun menjadi 92,01. Realisasi IPG di tahun 2024 ini juga menjadi yang tertinggi dibanding 5 (lima) tahun sebelumnya. Berikut Trend Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

Chart. 2.9.
Trend Indeks Pembangunan Gender 2019-2024

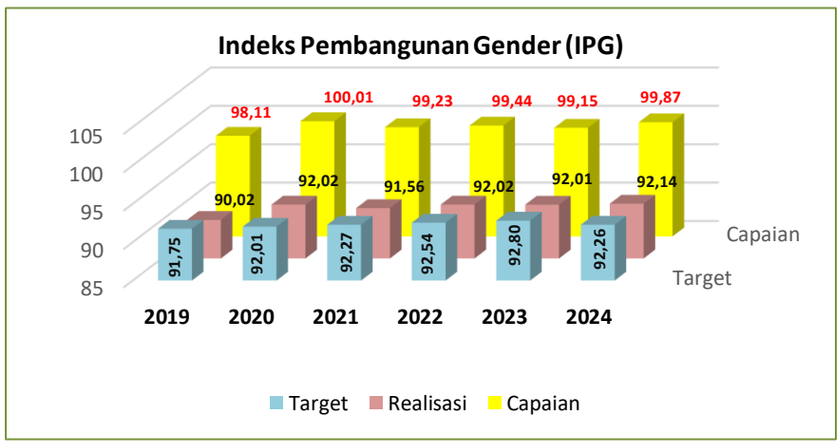

- Indikator Kinerja **Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)**

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Tujuan Secara Umum: Untuk memenuhi hak dan melindungi anak dan tujuan secara khususnya adalah Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota. Prinsip dalam Pengembangan KLA:

- Non diskriminasi
- Kepentingan yang terbaik untuk anak
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- Penghargaan terhadap pendapat anak
- Tata Pemerintahan Yang baik

Pencapaian Indikator Sasaran Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2024 yaitu **PRATAMA** sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jumlah korban kekerasan anak yang mendapat layanan kesehatan di tahun 2024 ini adalah sejumlah 21 kasus menurun 9 kasus dari tahun sebelumnya tahun 2023 sejumlah 30 kasus dan di tahun 2022 yaitu 46 kasus. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa penanganan kasus di tahun 2024 adalah yang terendah dari 5 (lima) tahun terakhir, hal ini menunjukkan adanya penurunan ditingkat kriminalitas terhadap anak. Diharapkan bahwa kasus kekerasan anak ini dapat turun dari tahun ke tahun dengan adanya pendampingan dari Bidang PPPA. Dari semua Kasus Anak yang ada dapat diselesaikan semua tanpa hambatan berkat kerja sama yang baik antar petugas P2TP2A. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut :

Chart. 2.10.
Trend Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024

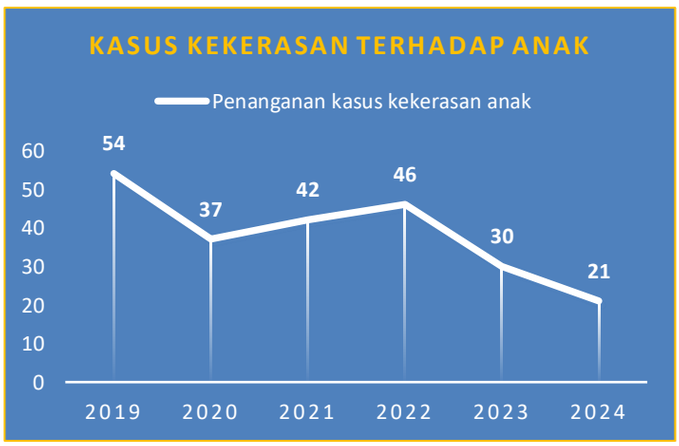

b. Tujuan Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Yang Merata dan Berkualitas

b.1. Sasaran Kinerja Meningkatnya Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan

- Indikator Kinerja **Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan**

Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangansehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Laju pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 adalah 5,2%, sedangkan target yang ditetapkan adalah 7,37% sehingga capaian kinerjanya adalah 70,56% atau dengan kategori belum berhasil. Sedangkan di tahun 2023 yang lalu mencapai 7,64%, sehingga ada penurunan capaian dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Chart. 2.11.
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
Kabupaten Polewali MandarTahun 2019-2023

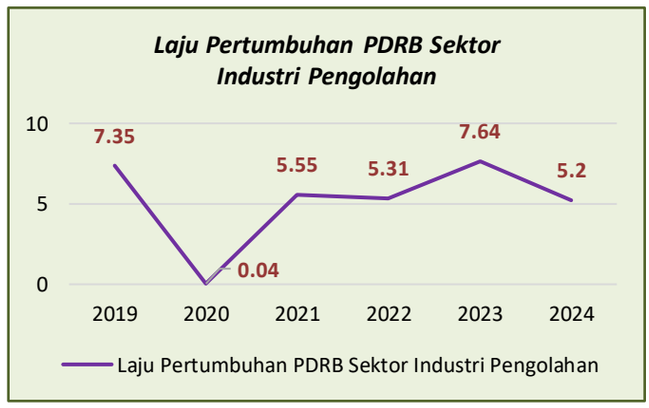

- Indikator Kinerja **Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran**

Pada tahun 2024, Laju Pertumbuhan PDRB terhadap Sektor Perdagangan Besar dan Eceran kabupaten Polewali Mandar tumbuh sebesar 7,93% yang jika dibandingkan dengar target pada tahun yang sama sebesar 5,58%, dengan capaian kinerja indikator 142,11%. Capaian tersebut mengalami perubahan yang yang signifikan meningkat dibanding tahun sebelumnya, bahkan dari 5 (lima) tahun terakhir realisasi capaian tahun 2024 merupakan yang tertinggi. Dari data di bawah menunjukkan bahwa trend kontribusi sektor Perdagangan Terhadap PDRB cukup stabil.

Chart. 2.12.
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran
Kabupaten Polewali MandarTahun 2019-2024

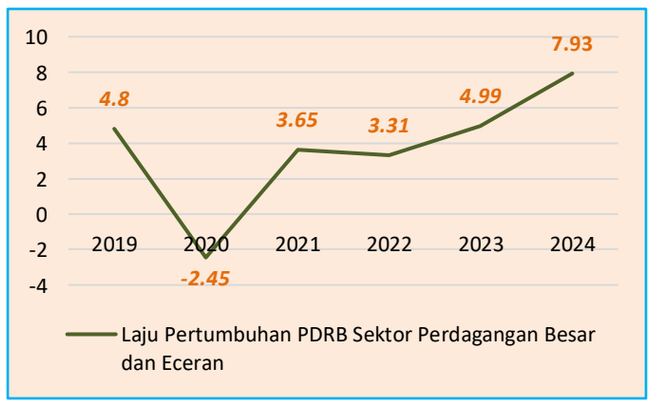

b.2. Sasaran Kinerja Meningkatnya Daya Saing Usaha Pariwisata Daerah

- Indikator Kinerja **Jumlah Wisatawan**

Dengan Tagline “Ayo ke Polewali Mandar”, Kabupaten Polewali Mandar berupaya secara serius mendorong adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan asing, domestik maupun lokal. Untuk peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dengan membandingkan target untuk tahun 2024 telah melewati target yang di tentukan. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara untuk tahun 2024 adalah sebanyak 790.424 dari target yang telah di tentukan sebanyak 410.000 orang dan untuk jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 1169 orang dari terget untuk tahun 2024 sebanyak 50 orang. Begitupun dengan tahun 2023 kunjungan wisatawan melebihi target yang telah di tentukan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Dalam hal ini kabupaten polewali mandar sudah mulai di kenal baik keindahan alam, budaya dan tempat wisata lainnya.

Chart. 2.13.
Jumlah Wisatawan Tahun 2019-2024

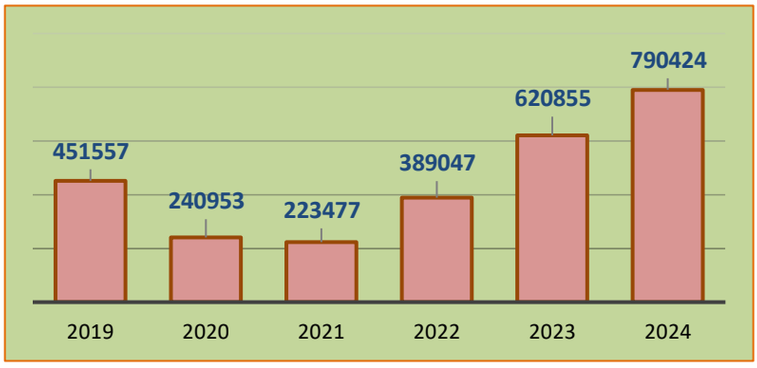

b.3. Sasaran Kinerja Meningkatnya Investasi Daerah

- Indikator Kinerja **Nilai Investasi**

Capaian realisasi Nilai investasi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 656.632.116.292, lebih tinggi dari target yang telah ditentukan pada tahun yang sama, yaitu Rp. 559.570.070.397, atau dengan persentase realisasi sebesar 117,35% sehingga diklasifikasikan dalam kategori Sangat Berhasil. Keseluruhan Investasi tersebut berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Target indikator kinerja Sasaran nilai investasi mengalami kenaikan nilai realisasi investasi dari tahun sebelumnya, tercapainya target indikator ini berkat dukungan dari para pelaku usaha untuk mendaftarkan investasi usahanya dan Para pelaku usaha atau perusahaan untuk melaporkan investasinya yang sesuai dengan hasil pemantauan dari tim Penanaman modal Kabupaten Polewali Mandar yang terjun langsung memantau para pelaku usaha.

Chart. 2.14.
Trend Pertumbuhan Investasi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024

b.4. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemerataan Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan

- Indikator Kinerja **Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah sektor unggulan Kabupaten Polewali Mandar yang memberikan kontribusi sebesar 44,44% terhadap distribusi persentase Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024. Pada Tahun 2024, sektor ini telah menyumbangkan 7.897,55 triliun rupiah dari 17.770,78 triliun rupiah sehingga menjadikannya sebagai barometer perekonomian. Meningkat atau menurunnya sektor ini akan mempengaruhi turun tidaknya perekonomian kabupaten secara menyeluruh. Laju pertumbuhan PDRB dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 mencapai 6.06% dari target 5.09%, sehingga capaian kinerjanya 119,06%. Secara konsisten indikator Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya sejak tahun 2020.

Chart. 2.15.
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024

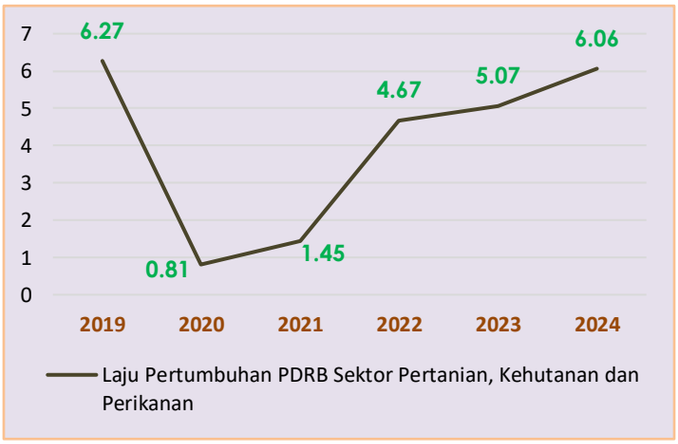

C. Tujuan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

c.1. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi

- Indikator Kinerja **Angka Kecelakaan Lalu Lintas**

Target Angka Kecelakaan Lalu Lintas Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 adalah sebanyak 90 kejadian. Sepanjang tahun 2024, telah terjadi 312 kejadian, sehingga kecelakaan lalu lintas lebih tinggi dari yang telah diprediksi, Dari sisi target kinerja tidak terlampaui. Hal ini disebabkan selama tahun 2024 kondisi alam berupa banjir menyebabkan banyaknya jalan yang rusak Meskipun, Lakalantas tetaplah merupakan kejadian insidentil yang merugikan. Kelalaian manusia, kondisi jalan dan kendaraan merupakan faktor dominan Lakalantas. Namun, keberadaan fasilitas keselamatan jalan, rambu-rambu lalu lintas dan juga penerapan standar keselamatan jalan angkutan serta pengaturan pengamanan lalu lintas juga dianatara upaya yang dilakukan dalam menekan laju Lakalantas di Kabupaten Polewali Mandar.

Chart. 2.16.
Trend Angka Kecelakaan Lalu Lintas di
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024

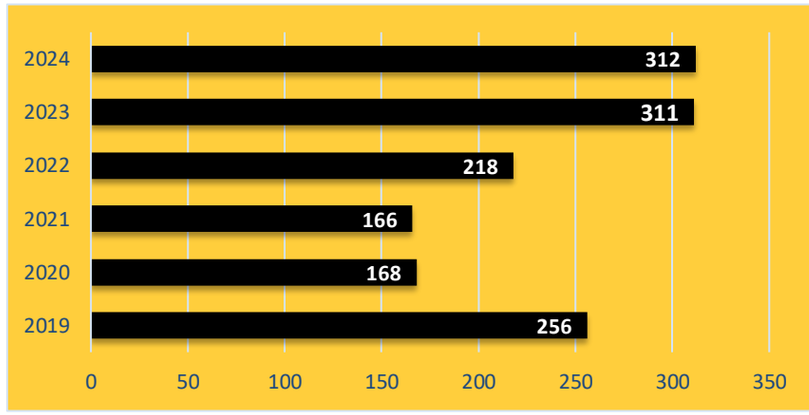

c.2. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

- Indikator Kinerja **Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap**

Realisasi capaian indikator Jalan dalam kondisi Mantap Kabupaten Polewali Mandar pada Tahun 2024 adalah 52,43%, belum melampui target yang telah ditetapkan sebesar 76,91% sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 68,17% atau dengan kategori Belum Berhasil. Selama terdapat peningkatan kualitas jalan secara konsisten panjang jalan dalam kondisi mantap meningkat secara kualitas. Pada tahun 2024, total panjang jalan di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 922.260 km, adapun dengan rinician menurut kondisi jalan sebagai berikut 359.857 Km dalam kondisi baik, 123.641 Km dalam kondisi sedang, 195.750 Km dalam kondisi rusak ringan, dan 243.012 Km dalam kondisi rusak berat.

Chart. 2.17.
Trend Perkembangan Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap Tahun 2019-2024

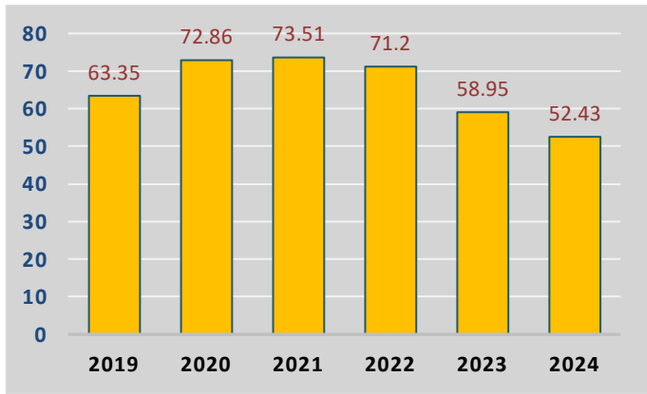

Tabel. 2.13
Persentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Tahun 2024

NO	KONDISI JALAN	PANJANG	PERSENTASE
1	Baik	359,857 Km	39,02
2	Sedang	123,641 Km	13,41
3	Rusak Ringan	195,750 Km	21,23
4	Rusak Berat	243,012 Km	26,35
5	**Total**	**922,260** Km	**100,00**
Persentase Kemantapan Jalan		**52,43 %**	

c.3. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi

- Indikator Kinerja **Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi jaringan irigasi teknis dan semi teknis yang ada agar dapat berfungsi secara maksimal dalam menyuplay kebutuhan air akan tanaman sehingga pola tanam dapat diatur dengan baik dan tanaman dapat tumbuh dengan subur dan menghasilkan produksi yang lebih baik.

Realisasi persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik di tahun 2024 adalah sebesar 69,89%. Sedangkan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 69,22% sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100,97% atau kategori Berhasil. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan capaian dimana pada tahun 2023 kondisi persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik 69,01%. Jumlah DI (Daerah Irigasi) yang tersedia sebanyak 41 Daerah Irigasi dengan panjang saluran irigasi yang direhab pada tahun 2024 yaitu 0,05 Km yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar.

Chart. 2.18.
Trend Perkembangan Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
Tahun 2020-2024

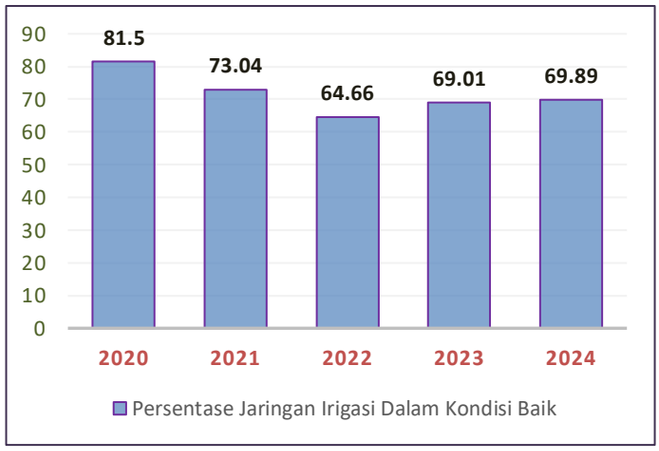

c.4. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman

- Indikator Kinerja **Indeks Infrastruktur Permukiman**

Indeks Infrastruktur Permukiman adalah pendekatan untuk mengukur Tingkat kualitas infrastruktur permukiman. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa Capain Indeks Infrastruktur Pemukiman Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 adalah 86,61% dari target indikator sebesar 91,14% atau dengan capaian kinerja sebesar 95,03%. Upaya penanganan Permukiman kumuh di Kabupaten Polewali Mandar tetap menjadi prioritas pembangunan pemerintah daerah dengan memenuhi standar sarana prasarana permukiman. Prasarana dimaksud adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk memenuhi tempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman. Sedangkan sarana dimaksudkan berupa fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

Chart. 2.19.
Indeks Infrastruktur Permukiman Tahun 2019-2024

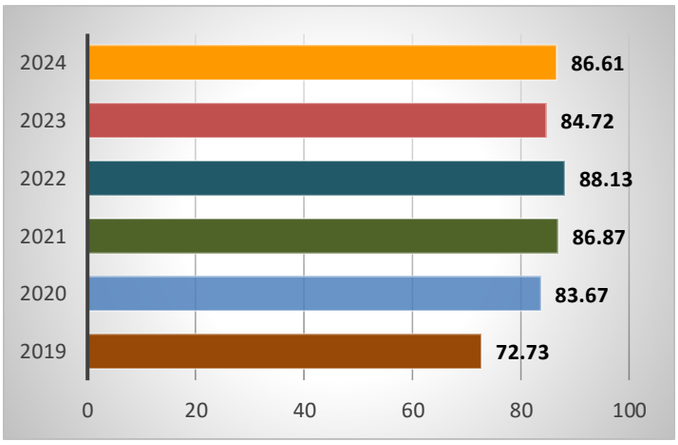

d. Tujuan Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup

d.1. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup

- Indikator Kinerja **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Capaian realisasi pada Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 adalah 68,36 dari taget 68,19 sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100,24% atau dengan kategori sangat berhasil. Jika melihat grafik trend perkembangan IKLH selama 5 (lima) tahun terakhir maka data menunjukkan ada kecenderungan angka indeks yang terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Namun jika dibanding tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2023 mengalami penurunan indeks IKLH, dimana pada tahun 2023 yaitu 71,40.

Untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan tersebut dan menciptakan kondisi perkotaan yang nyaman, sejuk dan segar, pemanfaatan penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi salah satu fokus pembangunan. RTH dimaksudkan agar tersedia ruang yang cukup bagi kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis dan area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan dan berbagai kegunaan lainnya untuk kelestarian lingkungan hidup.

Tabel 2.14.
Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Jenis Komponen	Nilai Indeks
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,91
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,96
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	49,80
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		**68,36**

Chart. 2.20.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2019-2024

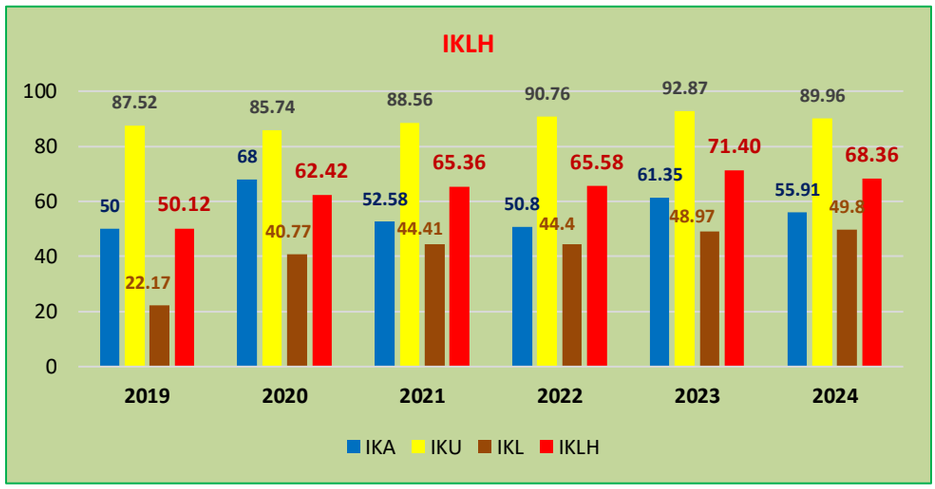

e. Tujuan Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dan Modern

e.1. Sasaran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

- Indikator Kinerja **Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- Menilai tingkat implementasi SAKIP
- Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- Memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 oleh KemenPAN dan RB melalui surat laporan nomor B/513/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024, maka kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa nilai sebesar **70,73** dengan **predikat BB.** Hal terseut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sudah **Sangat Baik**, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi dan telah diimplementasikan pada sebagian besar unit kerja.

Tabel 2.15.
Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	23,54	23,38
b. Pengukuran Kinerja	30	19,46	19,16
c. Pelaporan Kinerja	15	10,74	10,61
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,30	17,58
Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**72,04**	**70,73**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**BB**	**BB**

Chart. 2.21.
Trend Capaian Predikat Kinerja SAKIP Tahun 2019-2024

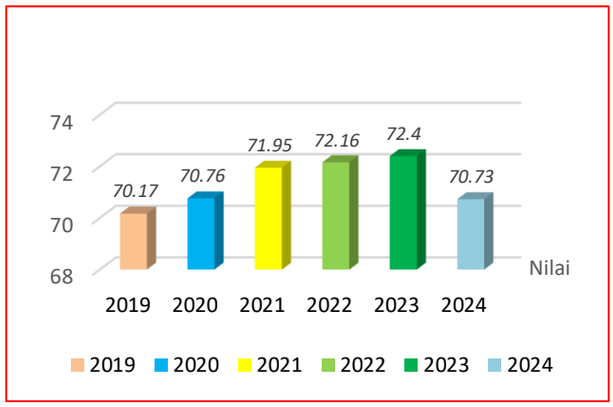

- Indikator Kinerja **Opini Pengelolaan Keuangan Daerah**

Berdasarkan surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat nomor 13.B/LHP/XIX.MAM/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 terkait Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023. Dimana menurut opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**. Pemeriksaan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kecukupan pengungkapan. Sedangkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 belum ada karena masih proses pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan LPPD 2024 ini dilaporkan.

Tabel 2.16.
Opini Laporan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar 10 Tahun Terakhir

No	TAHUN	OPINI LAPORAN KEUANGAN
1	2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

5	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
8	2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
9	2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
10	2024	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

- Indikator Kinerja **Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**

Tingkat Maturitas (Maturity Level) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam bagian ini menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda antara satu tingkat dengan tingkat lainnya. Kriteria Tujuan Penyelenggaraan Penerapan SPIP yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Berdasarkan Penetapan hasil evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dengan nomor surat PE.09.03/S-822/D3/04/2023 tangga 28 Desember 2023 maka penetapan nilai untuk Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah **3,450** atau berada pada **level 3**. Sedangkan Penetapan hasil evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2024 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan belum ada karena masih proses pemeriksaan sampai dengan LPPD 2024 ini dilaporkan.

Tabel 2.17.
Penetapan hasil evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

No	Perwakilan	SPIP-T		MRI		IEPK		Kapabilitas APIP	
		Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
1	**Prov. Sulawesi Barat**	**3.205**	**3**	**2.878**	**2**	**2.850**	**2**	**3.000**	**3**
2	Kab. Majene	3.200	3	2.814	2	2.800	2	3.000	3
3.	Kab. Mamuju	3.461	3	2.994	2	3.010	3	3.000	3
4.	**Kab. Polewali Mandar**	**3.450**	**3**	**3.070**	**3**	**2.710**	**2**	**3.000**	**3**
5.	Kab. Pasangkayu	3.201	3	2.897	2	2.850	2	3.000	3
6.	Kab. Mamasa	3.003	3	2.853	2	2.850	2	3.000	3
7.	Kab. Mamuju Tengah	3.017	3	2.907	2	2.920	2	3.000	3

e.2. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

- Indikator Kinerja **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Seperti yang tertuang di dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018, SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Pada tahun 2024, capaian realisasai indeks SPBE Kabupaten Polewali Mandar adalah sebesar **3,88** dengan predikat **Sangat Baik.** Capaian ini melampaui dari target

yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3,70. Hasil ini juga menjadikan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar meraih predikat dan prestasi sebagai **Kabupaten Terbaik dari 143 Kabupaten di Kawasan Indonesia Timur.** Dasar dari penilaian ini yaitu Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Chart. 2.22.
Indeks SPBE 2019-2024

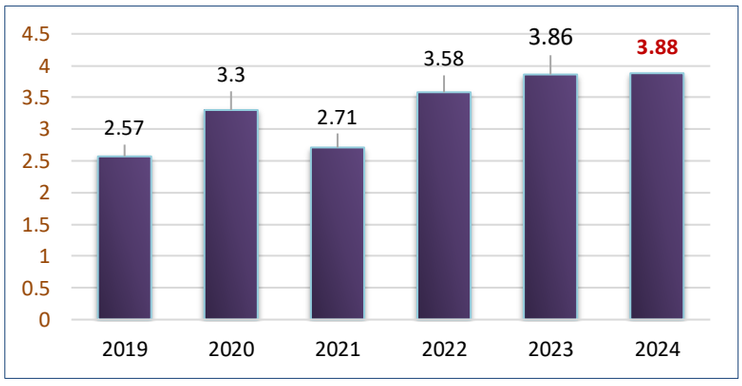

- Indikator Kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Survei Kepuasan Masyarakat tergolong meningkat pada kinerja pelayanan, dengan nilai rata-rata IKM 93,66 dibandingkan pada tahun 2023. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 21 Unit Pelayanan yang telah menyampaikan laporannya SKM pada tahun ini. Dari seluruh Perangkat Daerah yang telah melaporkan hasil SKM, telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat. Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan.

Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Chart. 2.23.
Nilai SKM Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024

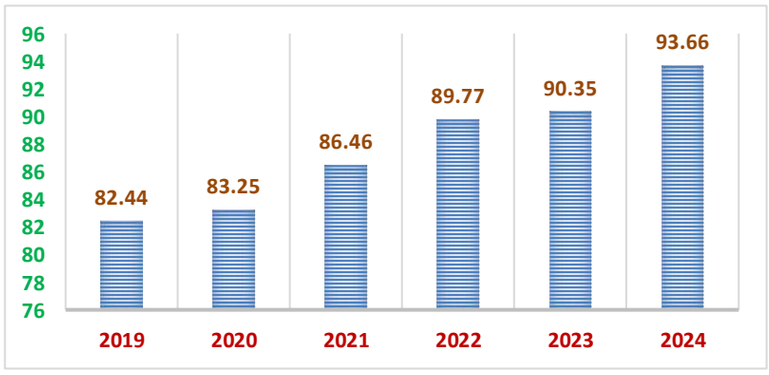

Berdasarkan Grafik diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pada kinerja pelayanan publik di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024. Ini menandakan bahwa tingkat pelayanan pada perangkat daerah semakin membaik.

2.3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia serta dukungan sarana dan prasarana. Berikut diuraikan analisis mengenai efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian setiap tujuan visi misi Kabupaten Polewali Mandar.

a. Tujuan Meningkatnya Taraf Hidup Dan Kualitas Sumber Daya Masyarakat

- **Indikator Kinerja Angka Kemiskinan**

Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 6.568.447.790,- dengan realisasi Rp. 4.528.350.240,- atau 68,94%. Adapun persentase efisiensi serapan anggaran adalah 31,06% atau dengan kata lain secara teori minim dari segi efisiensial. Adapun jumlah pegawai atau sumber daya aparatur pada Dinas Sosial selaku perangkat daerah yang membidangi masalah kemiskinan berjumlah 21 orang.

Program PKH dan BPNT adalah merupakan Program andalan Pemerintah yang diharapkan mampu menahan laju pertambahan angka kemiskinan dan merupakan Program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Sosial, dimasa Pandemi dimana Pemerintah pusat menyalurkan berbagai mode Paket Bantuan yang diharapkan mampu meringankan beban masyarakat terdampak pandemic Program ini menyasar Penduduk Miskin yang Datanya terangkum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 24.685 KK merupakan penerima PKH dan 40.727 KK adalah penerima Bantuan Sembako, Bantuan Sosial dari Program ini diambil dari APBN sedangkan operasionalnya didapat dari sharing Dana APBD Kabupaten Polewali Mandar. Kendala pelaksanaan kegiatan ini biasanya bersifat teknis operasional yang sangat berpengaruh pada pemutakhiran besaran bantuan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Program Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin adalah Program yang menyasar PMKS terkategori Produktif / masih bisa diberdayakan yang mengalami ketidak berdayaan akibat terganggunya fungsi sosial baik oleh lingkungan, keterpencilan wilayah maupun karena yang bersangkutan memang tidak memiliki fasilitas yang mampu mendukung yang bersangkutan untuk bisa menjadi produktif. Contohnya masyarakat terpencil yang akibat wilayahnya jauh dari pusat pemerintahan maupun pusat ekonomi sehingga mengakibatkan kelompok masyarakat ini termarginalkan, meskipun pada dasarnya mereka memiliki potensi yang besar jika difasilitasi.

Kegiatan Pemberdayaan bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Polewali Mandar berada di Desa Puppuring (Kecamatan Alu), Desa Taramanu Tua dan Desa Taloba (Kecamatan Tutar). Tahun 2024 ditargetkan semua jiwa dalam komunitas tersebut memperoleh bantuan kegiatan pemberdayaan. Sedangkan bagi Keluarga Miskin Potensial yang diberdayakan dengan kegiatan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) diharapkan mampu dijalankan dengan metode Bantuan Stimulan sehingga keberlanjutan kegiatan Pemberdayaan tersebut dapat betul betul efektif.

- **Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Untuk mendukung kelancaran program dan kegiatan pada indikator ini, dianggarkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5,656,066,519. Adapun realisasi anggaran yaitu sebesar Rp. 5,508,266,250 atau 97.39%, dengan efisiensi penggunaan

sumber daya 2,61%. Hambatan yang dihadapi adalah Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait aturan ketenaga kerjaan, Lambatnya pertumbuhan lapangan kerja, Kesempatan kerja masih terbatas dan Upah pekerja yang masih cukup rendah. Adapun solusi yang diupayakan adalah Sosialisasi terkait aturan ketenagakerjaan, Membuka Lapangan kerja dan Menaikkan Upah kerja.

- **Indikator Kinerja Persentase Desa Maju dan Mandiri**

  Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 1.421.256.575,- dengan realisasi Rp. 1.384.670.337,- atau 97,43%, sehingga persentase efisiensi serapan anggaran adalah 2,57%. Untuk efisiensi sumber daya manusia dan untuk meningkatkan SDM Pemerintah Desa dan warga masyarakat desa telah dilakukan fasilitasi kegiatan-kegiatan yang bersifat pelatihan, bimtek, dan workshop berkenaan dengan sasaran tersebut.

  Dalam Dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu sasaran strategis Membaiknya Ketahanan Ekonomi Desa dengan indikator kinerja persentase desa Maju dan Mandiri, yang dijalankan oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa dengan jumlah pegawai sebanyak 8 (Delapan) orang dengan menggunakan anggaran Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat dengan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran sebesar Rp.450.000.000.

- **Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan dan Indikator Kinerja Pengeluaran Konsumsi Rata-Rata Perkapita**

  Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 73.508.557,- dengan realisasi Rp. 43.261.643,- atau 58,85%. Sehingga persentase efisiensi serapan anggaran adalah 41,15%. Kabupaten Polewali Mandar saat ini masih memiliki keterbatasan dalam mendukung kinerja subsistem distribusi pangan daerah. Dimana umumnya masih terdapat kekurangan pada fasilitas prasarana jalan dan sarana angkutan, sehingga mahalnya biaya distribusi dari sentra produksi ke sentra konsumsi. Hal ini terutama terdapat di kecamatan Tubbi Taramanu, Limboro, Bulo dan Alu Minimnya sarana dan prasarana ini menyebabkan daerah daerah tertentu menjadi sangat terisolir dan sulit mengakses pangan. Oleh karena itu, dalam perencanaan kedepannya Kabupaten Polewali Mandar diperlukan perubahan dan alokasi anggaran yang cukup untuk sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran distribusi pangan ke seluruh wilayah.

  Salah satu upaya dalam mendorong produksi dan produktivitas pangan adalah tersedianya infrastruktur pertanian yang memadai. Pembangunan infrastruktur yang saat ini diperlukan antara lain berupa perbaikan dan pembangunan infrastruktur pengairan, seperti waduk dan saluran irigasi, serta pembangunan jalan yang menghubungkan sentra produksi kepada konsumen akhir. Untuk mewujudkan ketersediaan infrastruktur tersebut, dukungan dan koordinasi antara instansi yang membidangi pembangunan fisik serta pemerintah daerah melalui dukungan kebijakan yang mempermudah implementasi pembangunan tersebut, mutlak diperlukan. Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian juga memerlukan dukungan penyediaan teknologi dan sarana produksi, serta sumber daya manusia yang baik.

- **Indikator Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS)**

  Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 144.973.906.256,- dengan realisasi Rp. 82.360.369.040,- atau 56,81%, sehingga persentase efisiensi serapan anggaran adalah 43,19%. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pada indikator ini diantaranya adalah ; Orang tua tidak memiliki cukup biaya untuk menyekolahkan anaknya karena keterbatasan income penghasilan orangtua dengan biaya sekolah yang cukup memberatkan seperti buku, seragam, transport, dan uang jajan anak, jarak dari rumah ke sekolah, terutama siswa SMP yang jauh dengan kondisi jalan yang sangat susah untuk dilalui, Kemampuan belajar anak yang rendah dan didukung oleh rendahnya motivasi orang tua terhadap Pendidikan dan Kurangnya anggaran terhadap program yang mendukung pengembalian anak putus sekolah.

  Adapun upaya dan solusi yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersedut adalah Peningkatan sosialisasi dan pencerahan tentang pentingnya pendidikan bagi anak dengan peningkatan peran Guru, Kepala Sekolah, Komite, pemerintah setempat (lurah/kepala desa) serta Peningkatan anggaran untuk melaksanakan program kegiatan yang terkait.

- **Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indikator Kinerja Prevalensi Stunting**

  Ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp. 330,094,304,476 dengan realisasi anggran sebesar Rp. 325,779,562,225 atau 98,69%. Adapun efisiensi penggunaan sumber daya anggaran yaitu 1.31 %. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan pada tahun 2024, dalam proses perjalanannya, beberapa indikator penunjang Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi ini belum maksimal dan masih memiliki hambatan, antara lain : beberapa daerah masih memiliki jarak tempuh yang jauh untuk sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan, kualitas dan kuantitas Antenatal Care masih sangat rendah, penanganan komplikasi obstetri masih sangat rendah, tingginya angka BBLASR, serta Aplikasi MPDN mencatat kematian ibu dan kematian bayi sesuai alamat KTP sehingga ibu dan bayi yang meninggal meskipun tidak mendapat pelayanan di daerah tersebut tetap masuk ke dalam daftar jumlah kematian di tempat tersebut.

  Solusi yang dilakukan antara lain : melakukan edukasi tentang pentingnya Antenatal Care, melakukan advokasi kepada pemerintah desa, agar Alokasi Dana Desa sebagian digunakan untuk mengadakan kendaraan atau sewa kendaraan ibu hamil yang akan ke fasilitas pelayanan Kesehatan, peran petugas kesehatan dalam penanganan persalinan, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan Kesehatan, meningkatkan peran lintas sektor dan lintas program dalam upaya pelayanan kesehatan ibu hamil, melakukan pengawalan sistem pencatatan dan pelaporan.

  Prevalensi stunting tahun 2024 mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan karena telah melakukan kegiatan yang mendukung percepatan penurunan stunting, melakukan upaya perbaikan gizi masyarakat, program kegiatan untuk mengintervensi penurunan prevalensi stunting sudah melibatkan lintas sektor.

- **Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indikator Kinerja Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)**

  Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi perangkat daerah yang berperan dalam peningkatan indikator kinerja ini. Kendala dan hambatan yang dihadapi adalah kurangnya data pendukung dan pengetahuan dalam menghitung, sehingga menunggu data dari BPS. Sehingga Langkah-langkah yang ditempuh DP2KBP3A khususnya bidang Pemberdayaan Perempuan untuk mewujudkan

peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, yaitu menfasilitasi unit layanan terpadu (P2TP2A), melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan, koordinasi dengan stakeholder, sosialisasi dan advokasi. Sedangkan alokasi anggaran yang disediakan untuk mendukung indikator kinerja ini adalah sebesar Rp. 490,000,000 dengan realisasi Rp. 31.001.400 atau 6,33%. Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran yaitu 93,67%.

b. Tujuan Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Yang Merata dan Berkualitas

- **Indikator Kinerja Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Indikator Kinerja Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran**

  Jumlah alokasi anggaran untuk indikator kinerja ini adalah sebesar Rp. 546,184,482 dengan realisasi anggaran Rp. 531,718,022 atau 97,35%. Sedangkan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran yaitu 2,65%. Adapun permasalahan dan tantangan yang dihadapi diantaranya :

  - Penguasaan teknologi industri pelaku industri masih rendah
  - Masih rendahnya jumlah industri pengolahan berbasis bahan baku komoditi pangan yang merupakan unggulan Daerah (27,07%)
  - Skala Industri pengolahan dominan mikro dan kecil (95%)
  - Masih rendahnya daya serap sektor industri pengolahan terhadap angkatan kerja hanya sekitar 10,36%
  - Serapan jumlah tenaga kerja disektor industri sangat kecil (10,36%).

  Alternatif solusi yang diupayakan :

  - Mengembangkan budaya industri guna mendorong kemajuan perekonomian Daerah
  - Mendorong kemandirian dan daya saing industri lokal
  - Meningkatkan daya saing Produk unggulan Daerah
  - Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam melalui proses industri dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat
  - Mengoptimalkan Koordinasi dalam rangka kerjasama peningkatan SDM, penguasaan Teknologi Industri dan Pengolahan berbasis bahan baku unggulan Daerah bagi pelaku Industri dan wirausaha baru.
  - Fasilitas pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memperkuat dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

- **Indikator Kinerja Jumlah Wisatawan**

  Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata Pada tahun 2024 ada satu sub kegiatan yang mengalami refocusing anggaran sebesar Rp. 26.000.000 yang rencana kegiatannnya yaitu pengadaan alat rafting jadi hanya melakukan kegiatan pembenahan prasarana yang ada di Pantai Sappoang dan Pulau Gusung Toraja. Capaian target yang telah di tetapkan sebesar 110 objek wisata dengan realisasi sejumlah 42 objek wisata. Adapun kegiatan lainnya yaitu Pelatihan Bisnis Pengelolaan Kepariwisataan lanjutan yang pesertanya sebanyak 80 orang, pelatihan ini untuk kelompok sadar wisata untuk menambah pengetahuan di bidang pariwisata, bagaimana mengelola objek wisata yang baik sehingga orang banyak datang untuk tinggal berlama lama di polewali mandar dan juga dalam meningkatkan jumlah kunjungan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Kegiatan ini juga dilaksanakan pada tahun 2023 dan diikuti oleh 30 orang peserta.

  Selain itu ada juga kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan SDM tanggap bencana pada Objek Wisata. Kegiatan ini bertujuan agar pengelola objek wisata dapat memahami cara penanganan yang ada di objek wisata jika terdapat kecelakaan atau musibah yang terjadi. Kegiatannya berlangsung selama 2 hari dengan peserta 80 orang. Dengan memahami cara penanganan di objek wisata, dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang ada di Polewali Mandar. Adapun alokasi anggaran yang ditetapkan yatu sebesar Rp. 1,644,639,494 dengan realisasi

anggaran Rp. 1,490,600,688 atau 90.63%. Untuk efisiensi penggunaan sumber daya anggaran yaitu 9,37%.

- **Indikator Kinerja Nilai Investasi**

  Anggaran yang disiapkan untuk mendukung peningkatan investasi daerah yaitu sebesar Rp. 495.434.463 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 486.711.345 atau 98.24 %. Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 1,76%. Secara umum Indikator Kinerja Sasaran Nilai Investasi telah dapat melampau target yang telah ditetapkan di perjanjian kinerja tahun 2024, Secara Analisis Keberhasilan dalam pencapaian target tersebut adalah :

  - Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Langsung terhadap para pelaku Usaha atau perusahaan dalam melaksanakan kegiatan Penanaman Modal.
  - Melakukan Pendampingan bagi para pelaku usaha atau perusahaan dalam pelaporan Online LKPM.
  - Mengikuti Kegiatan Sosialisasi dan Workshop terhadap para pelaku usaha.

  Namun ada beberapa hal yang menjadi yang menjadi permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan pencapaian peningkatan LKPM yang dihadapi yaitu :

  ✓ Masih adanya para pelaku yang belum melaporkan LKPM nya.
  ✓ Masih adanya para pelaku usaha yang mampu melakukan cara pengimputan di Aplikasi LKPM.

  Jadi dalam menghadapi kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam pelaporan LKPM, inI diperlukan sebuah solusi yaitu :

  - Lebih Meningkatkan selalu SDM aparatur Penanaman Modal dan PTSP dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan OSS RBA dan LKPM.
  - Lebih meningkatkan Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Para P[elaku Usaha atau Perusahaan dalam meningkatkan Laporan Kegiatan Penanaman Modalnya melalui Pelaporan OSS RB

- **Indikator Kinerja Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**

  Alokasi anggaran yang mendukung indikator kinerja ini adalah sebesar Rp. 14,373,289,603 dengan realisasi anggaran Rp. 11,792,678,568 atau 82,05%. Sedangkan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran adalah 100% - 82,05% = 17,95%. Pada sektor perikanan, peningkatan produksi perikanan tangkap tidak hanya berdampak positif bagi kesejahteraan nelayan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Hal ini membuka peluang lebih besar untuk ekspor hasil perikanan dan memperkuat ketahanan pangan. Ke depannya, penting untuk terus mempertahankan momentum ini dengan memastikan praktik penangkapan yang berkelanjutan, menjaga kelestarian sumber daya laut, dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah, komunitas nelayan, dan pemangku kepentingan lainnya.

  Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Perubahan iklim global telah memengaruhi suhu dan kualitas air, yang berdampak negatif pada kesehatan dan pertumbuhan ikan budidaya. Peningkatan suhu air dapat memicu stres pada ikan, sementara kualitas air yang menurun akibat polusi dapat menyebabkan penyakit dan kematian massal. Selain faktor lingkungan, keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia juga menjadi hambatan signifikan. Banyak pembudidaya yang masih menggunakan metode tradisional dan belum mengadopsi teknologi modern yang lebih efisien.

  Untuk mengatasi kegagalan dan meningkatkan kinerja di masa depan, diperlukan sejumlah solusi strategis. Pada sektor perikanan budidaya, peningkatan investasi pada teknologi budidaya yang ramah lingkungan dan modern sangat penting. Program pelatihan dan pemberdayaan bagi pembudidaya perlu ditingkatkan untuk meningkatkan keterampilan dan

pengetahuan mereka. Pemerintah juga harus memfasilitasi akses terhadap benih dan pakan berkualitas serta menyederhanakan proses perizinan dan pendanaan. Dalam hal tata kelola pemerintahan, penguatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, penerapan e-government secara menyeluruh, serta simplifikasi birokrasi harus menjadi prioritas. Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga keuangan dapat membuka peluang pendanaan dan investasi yang lebih luas.

Dengan penerapan solusi-solusi tersebut, diharapkan target kinerja yang belum tercapai dapat direalisasikan pada periode berikutnya. Sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program-program yang telah direncanakan. Melalui komitmen bersama dan adaptasi terhadap perubahan, sektor perikanan dan tata kelola pemerintahan daerah diharapkan mampu berkontribusi lebih signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Adapun pada sektor pertanian, penurunan persentase pertumbuhan produksi padi di akibatkan luas tanam yang lebih rendah dari tahun sebelumnya sehingga mempengaruhi luas panen dan jumlah produksi padi. Selain luas tanam yang mengalami penurunan, luas tanaman yang mengalami kerusakan atau gagal panen lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, hal tersebut diakibatkan terjadinya cuaca ekstrem pada tahun 2024 yang mengakibatkan tanaman mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan penurunan luas panen. Namun meskipun luas panen dan produksi mengalami penurunan tapi dari segi produktivitas mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu dari 6.95 ton/ha menjadi 6.98 ton/ha.

Begitupun luas tanam komoditi padi ladang mengalami penurunan dari tahun 2022 yang mengakibatkan penurunan luas panen dan jumlah produksi, namun pada tahun 2024 tidak terdapat tanaman yang rusak, hal tersebut dikarenakan padi ladang lebih toleran terhadap serangan OPT dan cuaca ekstrem. Selain itu untuk produktivitas padi ladang tahun 2024 mengalami peningkatan yang tidak signifikan yaitu dari 3.95 menjadi 3.96.

Jumlah produksi dan produktivitas tanaman jagung dari enam belas kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar yang menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terjadi penurunan jumlah produksi jagung dari tahun 2023 yang cukup signifikan yaitu dari 28 ton menjadi 16 ton, hal tersebut dikarenakan terdapat penurunan luas tanam di beberapa wilayah bagian pegunungan dikarenakan sulitnya air di saat musim kemarau dan beralihnya petani menanam nilam yang hasilnya lebih menjanjikan.

c. Tujuan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

- **Indikator Kinerja Angka Kecelakaan Lalu Lintas**

Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 268.067.594,- dengan realisasi Rp. 261.449.447,- atau 97,53%, sehingga persentase efisiensi serapan anggaran adalah 2,47%. Persentase sarana prasarana dan kelengkapan perhubungan dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian kierja dari tahun 2018-2012 meningkat 5.40%, meskipun pada tahun 2022 belum sesuai target. Target kinerja 92.04% dan realisasi 89.67%, dalam artian capaian kinerja mencapai 89.67%. Capaian tahun 2022, bila disandingkan dengan target akhir Renstra mencapai 93%.

Kendala terkait pemenuhan indikator sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik pada tahun 2024 sebagai berikut :

- Kebutuhan sarana prasarana dan perlengkapan perhubungan terkait keselamatan jalan yang tidak sebanding dengan alokasi anggaran

- Kewenangan penanganan terkait status jalan;
- Minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga sarana prasarana dan perlengkapan perhubungan;
- Pemanfaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap sarana prasarana dan perlengkapan perhubungan masih minim;
- Belum tersedianya masterplan transportasi

Adapun solusi yang diupayakan :

- Melakukan sosialisasi dan juga melakukan pemeliharaan sapras dan perlengkapan perhubungan;
- Berupaya meningkatkan pemanfaatan terminal dan pengujian kendaraan;
- Menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan sapras perhubungan.

- **Indikator Kinerja Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap**

Salah satu faktor keberhasilan pemerintah kabupaten Polewali Mandar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya adalah dengan melalui penyediaan fasilitas atau infrastruktur yang memadai diantaranya adalah menyediakan akses jalan dan jembatan sebagai mobilitas masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2024 dialokasikan anggaran pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 28.510.357.849,- dengan realisasi Rp. 20.007.991.649,- atau 70,18% sehingga persentase efisiensi serapan anggaran adalah 29,82%. Untuk mengefisiensikan anggaran maka penanganan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan peningkatan kapasitas/ kualitas jalan dan pembangunan/ penggantian jalan disesuaikan dengan prioritas dan anggaran yang tersedia.

Permasalahan antara lain :

- Perlunya peningkatan kualitas jalan pada beberapa titik.
- Tingkat kerusakan jalan lebih besar dibandingkan perbaikan/pemeliharaan jalan
- Data dasar kondisi infrastruktur jalan belum akurat
- Anggaran pembangunan/ peningkatan/ pemeliharaan jalan terbatas
- Pembebasan lahan untuk pembangunan/perintisan jalan masih terkendala

Solusi yang dapat di tempuh agar beberapa permasalahan tersebut dapat diatasi antara lain :

- Penanganan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan peningkatan kapasitas/ kualitas jalan dan pembangunan/penggantian jalan sesuai dengan prioritas dan anggaran yang tersedia
- Update data/ inventarisasi kondisi jalan Penambahan anggaran dalam penanganan infrastruktur jalan dan jembatan
- Berkoordinasi dengan instansi/ pihak yang terkait dengan pembebasan lahan.

- **Indikator Kinerja Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi jaringan irigasi teknis dan semi teknis yang ada agar dapat berfungsi secara maksimal dalam menyuplay kebutuhan air akan tanaman sehingga pola tanam dapat diatur dengan baik dan tanaman dapat tumbuh dengan subur dan menghasilkan produksi yang lebih baik. Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 1.995.624.654,- dengan realisasi Rp. 1.516.094.640,- atau 75,97% sehingga persentase efisiensi serapan anggaran adalah 24,03%.

Permasalahan antara lain :

- Rendahnya anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan / pemeliharaan jaringan irigasi
- Tingkat kerusakan pada jaringan irigasi lebih besar dibandingkan perbaikan/pemeliharaan, di sebabkan beberapa faktor seperti bencana longsor
- Tingginya target pada awal penyusunan Renja
- Lemahnya pengawasan terhadap penegakan perda irigasi

Solusi yang dapat di tempuh agar permasalahan tersebut dapat diatasi antara lain :

- Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk membiayai pemeliharaan jaringan irigasi.
- Pada saat pengurangan anggaran kegiatan seharusnya penentuan target di turunkan juga
- Meningkatkan frekuensi pengawasan terhadap penegakan perda pengairan dan polisi pengairan

- **Indikator Kinerja Indeks Infrastruktur Permukiman**

Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 35.585.511.785,- dengan realisasi Rp. 32.799.885.107,- atau 92,17% sehingga persentase efisiensi serapan anggaran adalah 7,83%. Luas kawasan kumuh yang telah ditangani sampai tahun 2024 seluas 35,49 Hekter, maka luas kawasan kumuh dibawah 10 Hekter sebesar 22,1 Hekter yang tersebar di Empat (4) Kecamatan yaitu Polewali, Wonomulyo, Campalagian dan Tinambung.

Adapun faktor penunjang dan penghambat keberhasilan dan kegagalan dalam peningkatan kawasan permukiman yang layak adalah masih kurangnya Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman khususnya PERDA KUMUH , yang menjadi Persyaratan/ RC (Readness Criteria) dalam pengusulan Program dan Kegiatan penangan kawasan kumuh ke Pusat. Alternatif / Solusi yang diupayakan yaitu embentuk Kelompok Kerja (POKJA) Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga program dan kegiatan penanganan kawasan permukiman dan perumahan kumuh dapat lebih terpantau dan terstruktur sesuai dengan aspek kekumuhan disetiap kawasan kumuh.dan Melakukan Rapat Evaluasi bersama Pokja PKP untuk mengetahui progres penanganan kawasan kumuh.

d. Tujuan Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup

- **Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 12,164,738,682 dengan realisasi Rp. 10,927,382,086 atau 89,83% sehingga persentase efisiensi serapan anggaran adalah 100% - 89,83% = 10,17%. Berbagai solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan dan kendala diantaranya, Sosialisasi kebijakan perlindungan lingkungan hidup kepada para pengusaha dan investor industri yang berpotensi mengancam kualitas lingkungan hidup, meningkatkan intensitas pemantauan kualitas air, tanah dan udara serta memperketat penerapan kebijakan-kebijakan perlindungan lingkungan hidup, misalnya dalam hal rencana tata ruang, alih fungsi lahan pertanian, ijin mendirikan bangunan, kebijakan limbah usaha dan sebagainya. Adapun analisis keberhasilan dan kegagalan sebagai berikut :

Faktor Penunjang :

- Keterlibatan masyarakat : Keterlibatan masyarakat dalam program Proklim sangat penting untuk kesuksesan program ini. Masyarakat harus memahami manfaat dan tujuan dari program ini, serta berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan.
- Sumber daya manusia yang terlatih : Sumber daya manusia yang terlatih, seperti kader lingkungan, penggiat lingkungan, dan petugas desa, dapat membantu memfasilitasi program Proklim di daerah. Mereka dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, serta membantu dalam pelaksanaan program.
- Dukungan dari pemerintah daerah : Dukungan dari pemerintah daerah, seperti bantuan dana dan fasilitas, sangat penting untuk kesuksesan program Proklim. Pemerintah daerah dapat membantu dalam memfasilitasi program, mengoordinasikan pelaksanaan program, dan memantau kemajuan program.

- Kerjasama antar lembaga : Kerjasama antar lembaga, seperti antara pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, dapat membantu dalam mengoptimalkan program Proklim. Dalam kerjasama ini, setiap pihak dapat memberikan kontribusi dan keahlian masing-masing untuk mencapai tujuan bersama.
- Kesadaran akan pentingnya lingkungan : Kesadaran akan pentingnya lingkungan dan keberlanjutan lingkungan merupakan faktor penting yang dapat membantu terlaksananya program Proklim. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan, semakin mudah pelaksanaan program Proklim dilakukan.

Faktor Penghambat :

- Terbatasnya SDM baik kualitas maupun kuantitas dalam menindak lanjut sengketa lingkungan hidup.
- Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan pengaduan khususnya kendaraan operasional.
- Kurangnya SDM dan fasilitas pendukung dalam pengoperasian aplikasi proklim di beberapa lokasi binaan.

Alternatif Solusi yang telah diupayakan :

- Penambahan personil/staf pengelola pengaduan yang kemudian diikutikan mengikuti diklat/bimtek peningkatan kapasitas terkait penanganan sengketa lingkungan hidup.
- Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan pengaduan khususnya kendaraan operasional
- Perlu dukungan pendanaan dari Pemerintah Desa dalam peningkatan kualitas SDM dan fasilitas pendukung pengoperasian aplikasi Proklim.

e. Tujuan Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dan Modern

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. dengan indikator kinerja sebanyak 5 (lima) indikator, yaitu Predikat SAKIP, Opini Pengelolaan Keuangan daerah, Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal (SPIP), Indeks system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Jumlah anggaran dialokasikan pada sasaran tersebut yang terdiri dari berbagai program dan kegiatan yaitu sebesar Rp. 1.054.725.240.667 dengan realisasi Rp. 972.580.801.797 atau 92.21% sehingga persentase efisiensi serapan anggaran adalah 100% - 92,21 = 7,79%.

Dalam mengoptimalkan sistem pengelolaan keuangan dilakukan meningkatkan pelaksanaan pendampingan, fasilitasi serta monitoring dan evaluasi manajemen aset dan manajemen keuangan, menyelenggarakan pelatihan pengelolaan keuangan dan akuntansi berbasis akrual, dan melakukan pendampingan dan fasilitasi terhadap SKPD dan Pendampingngan intensif dari BPKP dalam proses pengintegrasian SIMDa Keu dan Simda Perencanaan tersebut. Dalam pengelolaan Aset Daerah, dilakukan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

Sedangkan untuk mengoptimalkan membangun SAKIP di perangkat daerah dilakukan pendampingan secara berkelanjutan pada Perangkat Daerah untuk membangun SAKIP di lingkungan kerja perangkat daerah. Selain itu dilakukan juga pendampingan dan fasilitasi pelaksanaan survey kepuasan serta pendampingan pengembangan sistem informasi pelayanan publik agar sistem informasi pelayanan publik memadai di seluruh unit pelayanan publik.

2.3.6. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Untuk mengoptimalkan pencapaian implementasi visi dan misi, maka dirumuskan sejumlah tujuan, sasaran dan indikator. Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan yang didasarkan pada isu-isu stratejik. Tedapat beberapa program dan kegiatan dalam mendorong pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Adapun analisis dari program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini:

a. Tujuan Meningkatnya Taraf Hidup Dan Kualitas Sumber Daya Masyarakat

Tujuan ini memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja. Untuk mendukung Tujuan dan sasaran strategis ini, beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk menjamin pencapaian target kinerja sasaran. Program dan Kegiatan dijelaskan sebagai berikut :

- **Sasaran Kinerja Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat,** dengan Indikator Kinerja Angka Kemiskinan melaksanakan sebanyak 4 (empat) program dan 5 (lima) kegiatan. Serangkaian program dan kegiatan tersebut adalah Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Dan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh.

Tabel 2.18.
Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**471,299,454**	**453,880,254**	**96.30**
1.1.	**Rehsos dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gepeng di luar panti sosial**	**382,560,386**	**365,151,186**	**95.45**
-	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	382,560,386	365,151,186	95.45
1.2.	**Rehsos dasar penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial**	**88,739,068**	**88,729,068**	**99.99**
-	Pemberian bimbingan sosial kepada kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	88,739,068	88,729,068	99.99
2	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**444,786,208**	**312,324,408**	**70.22**
2.1.	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**444,786,208**	**312,324,408**	**70.22**
-	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	444,786,208	312,324,408	70.22

3	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**2,362,362,277**	**472,429,127**	**20.00**
3.1.	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**2,362,362,277**	**472,429,127**	**20.00**
-	Penyediaan Makanan	2,362,362,277	472,429,127	20.00
4	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**3,289,999,851**	**3,289,716,451**	**99.99**
4.1.	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**3,289,999,851**	**3,289,716,451**	**99.99**
-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	3,289,999,851	3,289,716,451	99.99
TOTAL		**6,568,447,790**	**4,528,350,240**	**68.94**

- **Sasaran Kinerja Berkurangya Pengangguran,** Sasaran strategis berkurangnya pengangguran dengan Indikator kinerja Tingkat Partisipasi angkatan kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka telah melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan. Program tersebut adalah Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan capaian realisasi anggaran 90,61% dengan kegiatan Penyadaran,pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kab/kota wirausaha muda pemula dan pemuda kader kab/kota dan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan realisasi anggaran mencapai 99,12%. dengan kegiatan adalah Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi.

Tabel 2.19.
Program Kegiatan Sasaran Strategis Berkurangnya Pengangguran

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**4,506,065,216**	**4,466,239,959**	**99.12**
1.1.	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**4,506,065,216**	**4,466,239,959**	**99.12**
-	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	4,006,068,201	3,966,822,844	99.02
-	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	499,997,015	499,417,115	99.88
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**1,150,001,303**	**1,042,026,291**	**90.61**

2.1.	**Penyadaran,pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kab/kota wirausaha muda pemula dan pemuda kader kab/kota**	**750,001,278**	**642,026,291**	**85.60**
-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	250,000,385	222,407,827	88.96
-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	400,000,309	319,619,180	79.90
-	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	100,000,584	99,999,284	100.00
2.2.	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**400,000,025**	**400,000,000**	**100.00**
-	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/kota	400,000,025	400,000,000	100.00
TOTAL		**5,656,066,519**	**5,508,266,250**	**97.39**

- **Sasaran Kinerja Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal** Sasaran strategis Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal, dengan Indikator Kinerja Persentase desa maju dan mandiri telah melaksanakan sebanyak 3 (tiga) program dan 2 (dua) kegiatan. Program dan kegiatan tersebut adalah Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan realisasi anggaran mencapai 94,83%, Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan realisasi anggaran mencapai 97,25%, serta Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi dengan realisasi anggaran 99,93% dengan kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian.

Tabel 2.20
Program Kegiatan Sasaran strategis Berkembangnya Usaha Ekonomi Lokal

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**450,000,000**	**426,712,706**	**94.83**
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	450,000,000	426,712,706	94.83
2	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**471,256,728**	**458,310,760**	**97.25**

2.1.	**Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**471,256,728**	**458,310,760**	**97.25**
	Penyuluhan Transmigrasi	455,310,228	442,397,260	97.16
	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	15,946,500	15,913,500	99.79
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**499,999,847**	**499,646,871**	**99.93**
3.1.	**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian**	**499,999,847**	**499,646,871**	**99.93**
	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	499,999,847	499,646,871	99.93
TOTAL		**1,421,256,575**	**1,384,670,337**	**97.43**

- **Sasaran Kinerja Meningkatnya Ketahanan Pangan** Sasaran strategis Meningkatnya Ketahanan Pangan, dengan Indikator Kinerja Skor Pola Pangan Harapan dan Pengeluaran konsumsi rata-rata perkapita telah melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan. Program dan kegiatan tersebut adalah Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan realisasi anggaran mencapai 61,43%. Kegiatan dari program ini adalah Kegatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Kegiatan **Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota** dan Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan realisasi anggaran mencapai 99,31%. Adapun Kegiatan pada program tersebut adalah Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan.

Tabel 2.21.
Program Kegiatan Sasaran Strategis Meningkatnya Ketahanan Pangan

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**78,508,899**	**48,227,445**	**61.43**
1.1.	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**38,516,541**	**38,328,377**	**99.51**
-	Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	33,000,141	33,000,141	100.00
-	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	5,516,400	5,328,236	96.59
1.2.	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**29,992,200**	**0**	**0.00**

-	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	29,992,200		0.00
1.3.	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**10,000,158**	**9,899,068**	**98.99**
-	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	10,000,158	9,899,068	**98.99**
2	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**5,000,342**	**4,965,802**	**99.31**
2.1.	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**5,000,342**	**4,965,802**	**99.31**
-	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	5,000,342	4,965,802	99.31
TOTAL		**73,508,557**	**43,261,643**	**58.85**

- **Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pendidikan** Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pendidikan, dengan Indikator Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) telah melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan. Program dan kegiatan tersebut adalah Program Pengelolaan Pendidikan dengan realisasi anggaran sebesar 56,84%, dengan Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dengan realisasi anggaran sebesar 30,28%, dengan Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Tabel 2.22.
Program Kegiatan Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pendidikan

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**144,837,114,376**	**82,318,945,580**	**56.84**
1.1.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**84,757,884,783**	**49,481,853,371**	**58.38**
-	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu	3,574,846,749	2,632,991,171	73.65
-	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1,797,134,542	1,308,630,296	72.82
-	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	545,854,350	508,449,011	93.15
-	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	3,816,749,887	2,961,865,038	77.60
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu	429,509,200	189,559,038	44.13
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	577,433,400	375,078,512	64.96
-	Pengadaan Mebel Sekolah	4,194,253,400	4,160,270,000	99.19
-	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	6,152,750,000	5,921,417,500	96.24
-	Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa	299,999,620	262,745,802	87.58

-	Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	30,231,810	0	0.00
-	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	464,610,686	294,698,356	63.43
-	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	199,995,350	8,128,000	4.06
-	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	41,615,095,834	16,273,004,202	39.10
-	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	4,822,705,000	3,331,623,404	69.08
-	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (Tik) Untuk Pendidikan	1,094,697,256	354,172,456	32.35
-	Pengembangan Konten Digital Untuk Pendidikan	254,931,156	245,998,356	96.50
-	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	335,268,758	0	0.00
-	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3,936,354,640	2,482,358,561	63.06
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	431,881,750	369,724,198	85.61
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	10,183,581,395	7,801,139,470	76.61
1.2.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**32,162,593,399**	**18,698,173,036**	**58.14**
-	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu	390,000,000	239,135,527	61.32
-	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	391,813,300	323,001,318	82.44
-	Pembangunan Laboratorium	673,635,146	548,348,022	81.40
-	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	2,162,792,700	1,598,061,451	73.89
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1,841,134,664	1,513,643,160	82.21
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	410,863,200	380,838,009	92.69
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	657,683,150	510,663,802	77.65
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	223,577,244	210,049,214	93.95
-	Pengadaan Mebel Sekolah	1,600,181,000	1,583,650,000	98.97
-	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2,313,700,000	2,199,130,000	95.05
-	Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa	519,348,830	333,188,470	64.16
-	Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	34,870,110	0	0.00
-	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	410,929,647	234,221,407	57.00

-	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	140,933,920	50,220,044	35.63
-	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	18,487,593,442	7,782,193,300	42.09
-	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (Tik) Untuk Pendidikan	848,145,540	481,345,320	56.75
-	Pengembangan Konten Digital Untuk Pendidikan	267,875,918	187,925,018	70.15
-	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	269,206,614	4,250,000	1.58
-	Pembangunan Ruang Kelas Baru	139,749,500	139,749,500	100.00
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu	378,559,474	378,559,474	100.00
1.3.	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**21,594,984,920**	**10,867,497,828**	**50.32**
-	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Paud	1,102,478,100	803,812,235	72.91
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Paud	678,652,800	493,952,306	72.78
-	Pengadaan Perlengkapan Paud	1,909,512,691	59,287,500	3.10
-	Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Paud	3,040,044,360	2,184,150,000	71.85
-	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Paud	411,802,450	25,286,885	6.14
-	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Paud	238,030,755	4,031,511	1.69
-	Pengelolaan Dana Bop Paud	11,953,656,400	6,012,166,315	50.30
-	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	41,924,306	0	0.00
-	Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	69,955,975	0	0.00
-	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2,148,927,083	1,284,811,076	59.79
1.4.	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**6,321,651,274**	**3,271,421,345**	**51.75**
-	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	219,472,610	0	0.00
-	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	118,101,839	69,816,420	59.12
-	Pengelolaan Dana Bop Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	5,666,617,890	2,919,615,140	51.52
-	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	317,458,935	281,989,785	88.83
-	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	0	0	0.00
2	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**136,791,880**	**41,423,460**	**30.28**

2.1.	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**136,791,880**	**41,423,460**	**30.28**
-	Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	73,100,820	0	0.00
-	Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, Paud, Dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	63,691,060	41,423,460	65.04
TOTAL		**144,973,906,256**	**82,360,369,040**	**56.81**

- **Sasaran Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan** Sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan, dengan Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup (AHH) telah melaksanakan sebanyak 11 (sebelas) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar 85,35% terdiri dari 3 kegiatan. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan dengan realisasi anggaran sebesar 85,41% terdiri dari 2 kegiatan. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Dan Makanan Minuman dengan realisasi anggaran sebesar 87,08% terdiri dari 1 kegiatan. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan realisasi anggaran sebesar 76,99% terdiri dari 2 kegiatan. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan realisasi anggaran sebesar 88,09% terdiri dari 4 kegiatan. PROGRAM Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan realisasi anggaran sebesar 100% terdiri dari 1 kegiatan. Program Pengendalian Penduduk dengan realisasi anggaran sebesar 12,27% terdiri dari 2 kegiatan. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan realisasi anggaran sebesar 10,93% terdiri dari 4 kegiatan. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan realisasi anggaran sebesar 20,93% terdiri dari 1 kegiatan.

Tabel 2.23.
Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**152,127,598,218**	**129,835,220,089**	**85.35**
1.1.	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**20,820,088,583**	**16,551,460,921**	**79.50**
-	Pengembangan Puskesmas	10,285,877,800	10,201,616,046	99.18
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	231,563,568	228,063,568	98.49
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3,246,020,000	2,479,072,734	76.37
-	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	831,265,760	815,804,000	98.14

-	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	62,549,000	0	0.00
-	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6,099,175,255	2,792,717,373	45.79
-	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai,Bahan Medis Habis Pakai,Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	63,637,200	34,187,200	53.72
1.2.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**131,062,333,217**	**113,179,754,003**	**86.36**
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	211,027,000	129,396,200	61.32
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	226,001,000	116,812,400	51.69
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	276,444,000	243,936,000	88.24
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100,000,500	82,056,600	82.06
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	99,999,680	76,991,000	76.99
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100,024,100	85,644,400	85.62
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	149,463,490	35,932,300	24.04
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	99,999,800	98,169,336	98.17
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	473,445,460	81,676,096	17.25
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	99,999,800	52,870,402	52.87
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	570,628,990	68,234,773	11.96
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	99,999,966	87,350,186	87.35
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	231,256,384	128,279,460	55.47
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	201,793,526	30,933,600	15.33
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	570,068,466	429,989,200	75.43
-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	320,413,000	206,956,494	64.59
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	97,783,140	96,626,140	98.82
-	Pengelolaan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1,053,121,316	500,155,052	47.49
-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	103,978,349,934	93,538,746,524	89.96
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	19,708,631,648	15,907,490,389	80.71
-	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,545,280,000	867,843,375	56.16
-	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	209,823,566	13,335,000	6.36

-	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	89,129,100	63,647,600	71.41
-	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	49,999,765	45,659,713	91.32
-	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	313,227,606	149,025,490	47.58
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	111,623,980	41,996,273	37.62
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	74,798,000	0	0.00
1.3.	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**245,176,418**	**104,005,165**	**42.42**
-	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49,823,480	36,413,365	73.08
-	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	117,048,738	42,575,300	36.37
-	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	78,304,200	25,016,500	31.95
2	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan**	**4,596,980,470**	**3,926,129,781**	**85.41**
2.1.	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**3,365,009,400**	**2,777,684,569**	**82.55**
-	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	3,365,009,400	2,777,684,569	82.55
2.2.	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1,231,971,070**	**1,148,445,212**	**93.22**
-	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,231,971,070	1,148,445,212	93.22
3	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**423,053,750**	**368,392,695**	**87.08**
3.1.	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**423,053,750**	**368,392,695**	**87.08**
-	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	423,053,750	368,392,695	87.08
4	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**708,028,740**	**545,076,630**	**76.99**

4.1.	**Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**214,516,040**	**175,936,660**	**82.02**
-	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	164,954,840	140,041,660	84.90
-	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	49,561,200	35,895,000	72.43
4.2.	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**493,512,700**	**369,139,970**	**74.80**
-	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	493,512,700	369,139,970	74.80
5	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**506,000,000**	**62,090,893**	**12.27**
5.1.	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**265,000,000**	**49,592,600**	**18.71**
-	Advokasi, Sosialisasi danFasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI danSLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	265,000,000	49,592,600	18.71
5.2.	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**241,000,000**	**12,498,293**	**5.19**
-	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60,000,000		0.00
-	Pengolahan dan PelaporanData Pengendalian Lapangandan Pelayanan KB	181,000,000	12,498,293	6.91
6	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**6,436,971,000**	**703,469,600**	**10.93**
6.1.	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**2,695,400,000**	**448,954,800**	**16.66**
-	Pengendalian Program KKBPK	840,000,000	91,866,800	10.94
-	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	1,014,400,000	37,850,000	3.73
-	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program BanggaKencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	240,000,000	118,838,000	49.52
-	Promosi dan KIE ProgramBangga Kencana Melalui MediaMassa Cetak dan Elektronikserta Media Luar Ruang	601,000,000	200,400,000	33.34

6.2.	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**150,200,000**	**10,895,000**	**7.25**
-	Penggerakan Kader InstitusiMasyarakat Pedesaan (IMP)	150,200,000	10,895,000	7.25
6.3.	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**2,812,121,000**	**184,391,800**	**6.56**
-	Pengendalian PendistribusianAlat dan Obat Kontrasepsi danSarana Penunjang PelayananKB ke Fasilitas KesehatanTermasuk Jaringan danJejaringnya	123,400,000	5,356,800	4.34
-	Peningkatan KesertaanPenggunaan MetodeKontrasepsi Jangka Panjang(MKJP)	803,064,000	179,035,000	22.29
-	Penyediaan Sarana PenunjangPelayanan KB	1,764,957,000		0.00
-	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringandan Jejaringnya	120,700,000		0.00
6.4.	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**779,250,000**	**59,228,000**	**7.60**
-	Pelaksanaan dan PengelolaanProgram Bangga Kencana diKampung Keluarga Berkualitas	779,250,000	59,228,000	7.60
7	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**1,864,800,000**	**390,270,000**	**20.93**
7.1.	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga**	**1,864,800,000**	**390,270,000**	**20.93**
-	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1,864,800,000	390,270,000	20.93
8	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**3,479,999,844**	**3,065,439,158**	**88.09**
8.1.	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**349,999,095**	**325,320,478**	**92.95**
-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	349,999,095	325,320,478	92.95
8.2.	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2,050,000,348**	**1,944,537,022**	**94.86**

-	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1,050,000,348	944,537,022	89.96
-	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1,000,000,000	1,000,000,000	100.00
8.3.	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**150,000,000**	**2,225,390**	**1.48**
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	150,000,000	2,225,390	1.48
8.4.	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**930,000,401**	**793,356,268**	**85.31**
-	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	580,000,261	469,354,438	80.92
-	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	350,000,140	324,001,830	92.57
9	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**142,220,000**	**142,220,000**	**100.00**
9.1.	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**142,220,000**	**142,220,000**	**100.00**
-	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	142,220,000	142,220,000	100.00
10	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**145,839,403,454**	**173,129,708,605**	**118.71**
10.1.	**Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**15,339,403,454**	**14,811,823,706**	**96.56**
	sub kegiatan : pengembangan rumah sakit	8,974,000,000	8,522,530,013	94.97
	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6,365,403,454	6,289,293,693	98.80
10.2.	**Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Dearah Kabupaten/Kota**	**130,500,000,000**	**158,317,884,899**	121.32
	sub kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit	130,500,000,000	158,317,884,899	121.32
11	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**13,969,249,000**	**13,611,544,774**	97.44
11.1.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**13,969,249,000**	**13,611,544,774**	97.44
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	13,969,249,000	13,611,544,774	97.44
TOTAL		**330,094,304,476**	**325,779,562,225**	**98.69**

- **Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak** dengan Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Predikat Kabupaten Layak anak (KLA) telah melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan dengan tidak terealisasi. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan realisasi anggaran mencapai 16,32%. Sedangkan kegiatan yang mendukung program-program tersebut adalah Kegiatan Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, Kegiatan Penguatan dan Pengembagan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota serta Kegiatan Penguatan dan Pengembagan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

Tabel 2.24.
Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**300,000,000**	**0**	**0.00**
1.1.	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga PemerintahKewenangan Kabupaten/Kota**	**50,000,000**	**0**	**0.00**
-	Koordinasi dan SinkronisasiPerumusan KebijakanPelaksanaan PUG	25,000,000		0.00
-	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	25,000,000		0.00
1.2.	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia LayananPemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**250,000,000**	**0**	**0.00**
-	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia LayananPemberdayaan PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota	250,000,000		0.00
2	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**190,000,000**	**31,001,400**	**16.32**
2.1.	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan PeningkatanKualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**190,000,000**	**31,001,400**	**16.32**
-	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	120,000,000	23,898,200	19.92
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas HidupAnak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70,000,000	7,103,200	10.15
TOTAL		**490,000,000**	**31,001,400**	**6.33**

b. Tujuan Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Yang Merata dan Berkualitas

Tujuan ini memiliki 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja. Untuk mendukung Tujuan dan sasaran strategis ini, beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk menjamin pencapaian target kinerja sasaran. Program dan Kegiatan dijelaskan sebagai berikut :

- **Sasaran Kinerja Meningkatnya Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan** dengan Indikator Kinerja Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan Indikator Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) program dan 5 (lima) kegiatan. Program tersebut adalah Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi dengan realisasi anggaran sebesar 99,98% yang terdiri dari 1 kegiatan. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan realisasi anggaran sebesar 99,85% yang terdiri dari 1 kegiatan. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan realisasi anggaran sebesar 98,31% yang terdiri dari 1 kegiatan. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan realisasi anggaran sebesar 81,56% yang terdiri dari 1 kegiatan. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dengan realisasi anggaran sebesar 99,93% yang terdiri dari 1 kegiatan.

Tabel 2.25.
Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**10,000,182**	**9,998,020**	**99.98**
1.1.	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**10,000,182**	**9,998,020**	**99.98**
-	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	10,000,182	9,998,020	**99.98**
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**10,000,567**	**9,985,340**	**99.85**
2.1.	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**10,000,567**	**9,985,340**	**99.85**
-	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	10,000,567	9,985,340	99.85
3	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**32,979,408**	**32,957,562**	**99.93**
3.1.	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**32,979,408**	**32,957,562**	**99.93**
-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	18,422,936	18,401,090	99.88

-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	14,556,472	14,556,472	100.00
4	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**456,866,592**	**449,139,600**	**98.31**
4.1.	**Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**456,866,592**	**449,139,600**	**98.31**
-	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	456,866,592	449,139,600	98.31
5	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**36,337,733**	**29,637,500**	**81.56**
5.1.	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan**	**36,337,733**	**29,637,500**	**81.56**
-	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	20,002,390	14,588,890	72.94
-	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	16,335,343	15,048,610	92.12
TOTAL		**546,184,482**	**531,718,022**	**97.35**

- **Sasaran Kinerja Meningkatnya Daya Saing Usaha Pariwisata Daerah** dengan Indikator Kinerja Jumlah Wisatawan telah melaksanakan 5 (lima) program dan 6 (enam) kegiatan. Program tersebut adalah Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan capaian realisasi anggaran 95,86% dengan Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Program Pemasaran Pariwisata dengan capaian realisasi anggaran 100% dengan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota. Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan capaian realisasi anggaran sebesar 88,36% dengan Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan capaian realisasi anggaran sebesar 91,63% dengan Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. Serta Program Pengembangan Kebudayaan dengan realisasi anggaran sebesar 98,53% dengan Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 2.26.
Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**2,925,825**	**2,804,625**	**95.86**
1.1.	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**2,925,825**	**2,804,625**	**95.86**
-	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2,925,825	2,804,625	95.86
1.2.	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**0**	**0**	**0.00**
-	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			0.00

2	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**47,661,960**	**47,661,960**	**100.00**
2.1.	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**47,661,960**	**47,661,960**	**100.00**
-	Fasilitasi kegiatan pemasaran baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata kabupaten/kota	47,661,960	47,661,960	100.00
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**850,000,854**	**778,882,868**	**91.63**
3.1.	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**850,000,854**	**778,882,868**	**91.63**
-	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	400,000,380	350,116,270	87.53
-	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	450,000,474	428,766,598	95.28
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**37,610,700**	**37,058,900**	**98.53**
4.1.	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**37,610,700**	**37,058,900**	**98.53**
-	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	37,610,700	37,058,900	98.53
5	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**706,440,155**	**624,192,335**	**88.36**
5.1.	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**706,440,155**	**624,192,335**	**88.36**
-	Peningkatan Pendidikandan Pelatihan Sumber Daya Manusia KesenianTradisional	51,439,000	50,889,000	98.93
-	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	655,001,155	573,303,335	87.53
TOTAL		**1,644,639,494**	**1,490,600,688**	**90.63**

- **Sasaran Kinerja Meningkatnya Investasi Daerah** dengan Indikator Kinerja Nilai realisasi investasi daerah telah melaksanakan sebanyak 3 (tiga) program dan 3 (tiga) kegiatan. Program dan kegiatan tersebut adalah Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan realisasi anggaran mencapai 99,21% dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Program Promosi Penanaman Modal dengan realisasi anggaran mencapai 16,84% dengan Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan realisasi anggaran mencapai 99,80% dengan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Tabel 2.27.
Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Investasi Daerah

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	**PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**6,400,080**	**1,077,600**	**16.84**
1.1.	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**6,400,080**	**1,077,600**	**16.84**
-	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	6,400,080	1,077,600	16.84
2	**PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**79,429,383**	**79,270,105**	**99.80**
2.1.	**Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**79,429,383**	**79,270,105**	**99.80**
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	25,340,168	25,309,565	99.88
-	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	27,778,817	27,760,950	99.94
-	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	26,310,398	26,199,590	99.58
3	**PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**409,605,000**	**406,363,640**	**99.21**
3.1.	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**409,605,000**	**406,363,640**	**99.21**
-	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	32,974,874	29,982,550	90.93
-	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	253,744,490	253,623,610	99.95
-	Pengawasan Penanaman Modal	122,885,636	122,757,480	99.90
TOTAL		**495,434,463**	**486,711,345**	**98.24**

- **Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemerataan Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan** dengan Indikator Kinerja Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan telah melaksanakan sebanyak 8 (delapan) program dan 12 (dua belas) kegiatan. Program tersebut adalah Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Perizinan Usaha Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya serta Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28.
Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Pemerataan Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**134,325,006**	**134,316,725**	**99.99**
1.1.	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**34,324,201**	**34,315,920**	**99.98**
-	Peningkatan pascapanen danpengolahan hasil perkebunan	10,850,000	10,850,000	100.00
-	Penyusunan Peta Kawasan, Lahandan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan diKabupaten/Kota	23,474,201	23,465,920	99.96
1.2.	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**70,000,000**	**70,000,000**	**100.00**
-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	70,000,000	70,000,000	100.00
1.3.	**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalamDaerah Kabupaten/ Kota**	**30,000,805**	**30,000,805**	**100.00**
-	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak danRumpun/Galur Ternak	30,000,805	30,000,805	100.00
2	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**32,791,196**	**31,552,834**	**96.22**
2.1.	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**18,516,903**	**18,516,903**	**100.00**
-	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	18,516,903	18,516,903	100.00
2.2.	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**14,274,293**	**13,035,931**	**91.32**
-	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	14,274,293	13,035,931	91.32
3	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**10,611,770**	**8,121,726**	**76.54**
3.1.	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**10,611,770**	**8,121,726**	**76.54**
-	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	10,611,770	8,121,726	76.54
4	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**21,680,008**	**21,430,242**	**98.85**

4.1.	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**6,781,256**	**6,541,610**	**96.47**
-	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	6,781,256	6,541,610	96.47
4.2.	**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	**14,898,752**	**14,888,632**	**99.93**
-	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	14,898,752	14,888,632	99.93
5	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**9,970,809,591**	**7,532,807,830**	**75.55**
5.1.	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**9,970,809,591**	**7,532,807,830**	**75.55**
-	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatandan Desa	36,004,123	26,142,040	72.61
-	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	245,174,450	245,174,450	100.00
-	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	391,749,018	271,643,880	69.34
-	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	9,297,882,000	6,989,847,460	75.18
6	**PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**1,126,999,953**	**1,121,039,070**	**99.47**
6.1.	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1,126,999,953**	**1,121,039,070**	**99.47**
-	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1,126,999,953	1,121,039,070	99.47
7	**PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**2,844,708,891**	**2,712,046,953**	**95.34**
7.1.	**Pemberdayaan Pembudi daya Ikan kecil**	**2,844,708,891**	**2,712,046,953**	**95.34**
-	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	1,151,271,390	1,148,292,410	99.74
-	Pemberian pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1,693,437,501	1,563,754,543	92.34
8	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**231,363,188**	**231,363,188**	**100.00**
8.1.	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**231,363,188**	**231,363,188**	**100.00**
-	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	231,363,188	231,363,188	100.00
TOTAL		**14,373,289,603**	**11,792,678,568**	**82.05**

c. Tujuan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

Tujuan ini memiliki 4 (empat) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja. Untuk mendukung Tujuan dan sasaran strategis ini, beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk menjamin pencapaian target kinerja sasaran. Program dan Kegiatan dijelaskan sebagai berikut :

- **Sasaran kinerja Meningkatnya kinerja penyelenggaraan sistem transportasi** dengan Indikator Kinerja Angka kecelakaan lalu lintas telah melaksanakan sebanyak 1 (satu) program dan 7 (tujuh) kegiatan. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan capaian realisasi anggaran sebesar 97,53%. Sedangkan kegiatan yang mendukung diantaranya adalah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaran Angkutan Orang dalam trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten/Kota dan beberapa kegiatan lainnya.

Tabel 2.29.
Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	**Program Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**268,067,594**	**261,449,447**	**97.53**
1.1.	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jlan Kabupaten/Kota**	**103,953,792**	**103,840,422**	**99.89**
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	103,953,792	103,840,422	99.89
1.2.	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**6,538,830**	**6,533,500**	**99.92**
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	6,538,830	6,533,500	99.92
1.3.	**Penerbitan Izin Penyelenggaran dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**30,283,121**	**30,202,464**	**99.73**
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	30,283,121	30,202,464	99.73
1.4.	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**88,018,088**	**81,599,298**	**92.71**
-	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	19,116,320	14,016,320	73.32
-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	68,901,768	67,582,978	98.09
1.5.	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**27,015,277**	**27,015,277**	**100.00**

-	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/Kota	27,015,277	27,015,277	100.00
1.6.	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**2,245,111**	**2,245,111**	**100.00**
-	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	2,245,111	2,245,111	100.00
1.7.	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**10,013,375**	**10,013,375**	**100.00**
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	10,013,375	10,013,375	100.00
TOTAL		**268,067,594**	**261,449,447**	**97.53**

- **Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan** dengan Indikator Kinerja Persentase jalan dalam kondisi mantap telah melaksanakan sebanyak 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan. Dimana Program tersebut adalah Program Penyelenggaraan Jalan dengan realisasi anggaran 70,18%, terdiri dari Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.

Tabel 2.30.
Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**28,510,357,849**	**20,007,991,649**	**70.18**
1.1.	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**28,510,357,849**	**20,007,991,649**	**70.18**
-	Pembangunan Jalan	487,806,100	516,782,151	105.94
-	Rehabilitasi Jembatan	19,857,000	0	0
-	Pembangunan Jembatan	1,325,276,297	541,809,877	40.88
-	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	249,555,770	207,055,551	82.97
-	Rehabilitasi Jalan	26,127,882,232	18,456,763,620	70.64
-	Pemeliharaan Rutin Jalan	299,980,450	285,580,450	95.20
TOTAL		**28,510,357,849**	**20,007,991,649**	**70.18**

- **Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jaringan Irigasi** dengan Indikator Kinerja Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik telah melaksanakan 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan. Program dimaksud adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan realisasi anggaran mencapai 55,70%. Adapun Kegiatan yang mendukung adalah Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota dan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya diBawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 2.31.
Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Infrastruktur Jaringan Irigasi

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**4,032,262,304**	**2,245,893,941**	**55.70**
1.1.	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota**	**2,036,637,650**	**729,799,301**	**35.83**
-	Normalisasi/Restorasi Sungai	604,894,050	405,514,851	**67.04**
-	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1,431,743,600	324,284,450	**22.65**
1.2.	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya diBawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**1,995,624,654**	**1,516,094,640**	**75.97**
-	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	355,680,700	329,286,200	92.58
-	Peningkatan Bendung Irigasi	68,700,000		0.00
-	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	957,021,950	763,030,354	79.73
-	Rehabilitasi Bendung Irigasi	426,542,000	366,298,000	85.88
-	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	63,560,086	57,480,086	90.43
-	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	42,060,600	0	0.00
-	Operasional Unit Pengelola Irigasi	82,059,318	0	0.00
TOTAL		**1,995,624,654**	**1,516,094,640**	**75.97**

- **Indikator Kinerja Indeks Infrastruktur Permukiman** dengan Indikator Kinerja Indeks infrastruktur pemukiman telah melaksanakan sebanyak 9 (sembilan) program dan 12 (dua belas) kegiatan. Program tersebut adalah Program Kawasan Permukiman, Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh, Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) dan Program Pengembangan Perumahan, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Diantara kegiatannya adalah Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota, Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota dan Kegiatan Urusan Penyelenggararaan PSU Perumahan.

Tabel 2.32.
Program Kegiatan Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pemukiman

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**182,897,933**	**182,897,333**	**100.00**

1.1.	**Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**9,996,809**	**9,996,209**	**99.99**
-	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	9,996,809	9,996,209	99.99
1.2.	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**0**	**0**	**0.00**
-	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			0.00
1.3.	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**172,901,124**	**172,901,124**	**100.00**
-	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	172,901,124	172,901,124	100.00
2	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**116,997,555**	**116,895,455**	**99.91**
2.1.	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**78,745,035**	**78,645,335**	**99.87**
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	78,745,035	78,645,335	99.87
2.2.	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**38,252,520**	**38,250,120**	**99.99**
-	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	38,252,520	38,250,120	99.99
3	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**3,289,999,851**	**3,289,716,451**	**99.99**
3.1.	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**3,289,999,851**	**3,289,716,451**	**99.99**
-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	3,289,999,851	3,289,716,451	99.99
4	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**35,000,436**	**33,597,636**	**95.99**
4.1.	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**35,000,436**	**33,597,636**	**95.99**
-	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	35,000,436	33,597,636	95.99
5	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**17,260,710,707**	**15,374,645,149**	**89.07**
5.1.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**17,260,710,707**	**15,374,645,149**	**89.07**

-	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Rp127,900,049	0	0.00
-	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Rp75,000,000	74,999,370	100.00
-	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	17,057,810,658	15,299,645,779	89.69
6	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**402,705,070**	**4,198,800**	**1.04**
6.1.	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**402,705,070**	**4,198,800**	**1.04**
-	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	402,705,070	4,198,800	1.04
7	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**12,096,496,300**	**11,992,074,129**	**99.14**
7.1.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**12,096,496,300**	**11,992,074,129**	**99.14**
-	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1,879,784,300	1,859,951,400	98.94
-	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	9,184,152,000	9,174,245,000	99.89
-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1,032,560,000	957,877,729	92.77
8	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**734,758,428**	**458,800,123**	**62.44**
8.1.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**734,758,428**	**458,800,123**	**62.44**
-	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	418,537,580	326,240,513	77.95
-	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	316,220,848	132,559,610	41.92
9	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**1,465,945,505**	**1,347,060,031**	**91.89**
9.1.	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**1,465,945,505**	**1,347,060,031**	**91.89**

-	Pengubahsuaian Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1,442,126,903	1,344,387,379	93.22
-	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	23,818,602	2,672,652	11.22
TOTAL		**35,585,511,785**	**32,799,885,107**	**92.17**

d. Tujuan Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup

- **Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** dengan indikator kinerja Indeks kualitas lingkungan hidup. Untuk mendukung Tujuan dan sasaran strategis ini, sebanyak 4 (empat) program dengan masing-masing 1 (satu) kegiatan yang telah dilaksanakan serta sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk menjamin pencapaian target kinerja sasaran. Adapun Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan capaian realisasi anggaran 66,27% dengan Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) dengan capaian realisasi anggaran 86,39% dengan Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan capaian realisasi anggaran 90,84% dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan capaian realisasi anggaran 77,11% dengan Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota.

Tabel 2.33.
Program Kegiatan Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**330,023,463**	**218,717,443**	**66.27**
1.1.	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**330,023,463**	**218,717,443**	**66.27**
-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	150,003,070	87,818,958	58.54
-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	180,020,393	130,898,485	72.71

2	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**50,020,480**	**43,212,840**	**86.39**
2.1.	**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**50,020,480**	**43,212,840**	**86.39**
-	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	50,020,480	43,212,840	86.39
3	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**11,498,380,784**	**10,444,662,633**	**90.84**
3.1.	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**11,498,380,784**	**10,444,662,633**	**90.84**
-	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	11,381,917,856	10,334,219,894	90.80
-	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	116,462,928	110,442,739	94.83
4	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**286,313,955**	**220,789,170**	**77.11**
4.1.	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**286,313,955**	**220,789,170**	**77.11**
-	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	286,313,955	220,789,170	77.11
TOTAL		**12,164,738,682**	**10,927,382,086**	**89.83**

e. Tujuan Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dan Modern

Tujuan ini memiliki sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. dengan indikator kinerja sebanyak 5 (lima) indikator, yaitu Predikat SAKIP, Opini Pengelolaan Keuangan daerah, Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal (SPIP), Indeks system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Untuk mendukung Tujuan dan sasaran strategis ini, beberapa program yang telah dilaksanakan dengan sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk menjamin pencapaian target kinerja sasaran. Adapun diantara programnya adalah Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Penyelenggaraan Pengawasan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta beberapa program di bidang perencanaan, keuangan, pengawasan dan pelayanan. Ada beberapa permasalahan dan kendala yang sering dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya adalah sarana dan prasarana pelayanan belum menyediakan tingkat kenyamanan ekstra, belum optimalnya sistem pengendalian internal oleh pejabat pengelola keuangan pada satuan kerja, dan belum optimalnya pengelolaan data kinerja di tingkat Perangkat Daerah, sehingga data-data sektor belum dapat dimanfaatkan secara memadai untuk mengukur pencapaian kinerja sasaran strategis.

Tabel 2.34.
Program Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	687,444,018,319	630,194,750,473	91.67
2	Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	335,797,221	306,695,555	91.33
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	554,752,435	449,504,457	81.03
4	Program Penelitian Dan Pengembangan	1,069,999,343	896,123,987	83.75
5	Pengelolaan Keuangan Daerah	239,536,439,538	230,504,721,161	96.23
6	Pengelolaan Barang Milik Daerah	471,887,469	468,880,624	99.36
7	Pengelolaan Pendapatan Daerah	4,403,706,531	913,262,700	20.74
8	Kepegawaian Daerah	521,531,923	498,553,830	95.59
9	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,522,006,020	1,497,061,950	98.36
10	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	5,164,800	4,413,900	85.46
11	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	48,080,250	48,075,250	99.99
12	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	9,957,283	9,882,153	99.25
13	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	818,000,555	818,000,555	100.00
14	Program Pembinaaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	4,257,600	4,257,600	100.00
15	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	59,013,769,390	58,508,920,471	99.14
16	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	14,683,796,821	14,088,497,266	95.95
17	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	25,828,834,981	17,271,520,139	66.87
18	Program Perekonomian Dan Pembangunan	746,157,250	674,755,343	90.43
19	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9,562,440,623	8,008,569,926	83.75
20	Program Pembinaan Perpustakaan	1,444,482,197	920,592,544	63.73
21	Program Pengelolaan Arsip	99,651,991	95,514,091	95.85
22	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	62,762,385	54,547,382	86.91
23	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,263,985,236	1,244,069,136	98.42

24	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	58,404,382	35,517,982	60.81
25	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	14,946,330	8,584,600	57.44
26	Program Penatagunaan Tanah	106,800,126	106,778,326	99.98
27	Program Pendaftaran Penduduk	237,871,075	237,838,012	99.99
28	Program Pencatatan Sipil	446,368,776	446,368,776	100.00
29	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	91,576,455	91,575,854	100.00
30	Program : Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	122,095,412	122,080,140	99.99
31	Program : Pencegahan , Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	3,730,000,000	3,729,435,226	99.98
32	Penanggulangan Bencana	284,346,304	284,332,428	100.00
33	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	181,351,646	37,119,960	20.47
TOTAL		**1,054,725,240,667**	**972,580,801,797**	**92.21**

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyerahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah diselenggarakan melalui asas desentralisasi, sedangkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didistribusikan dengan menggunakan asas desentralisasi.

Asas desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pemerintah pusat kemudian menjadi milik pemerintah daerah. Sedangkan dalam asas dekonsentrasi, terjadi pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Pada asas Tugas Pembantuan, terjadi penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Terkait dengan urusan pemerintahan, urusan yang ditugas pembantuankan adalah urusan konkuren, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Adapun tujuan asas Tugas pembantuan ini adalah untuk lebih mempercepat pencapaian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah serta untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum baik dilingkup daerah maupun secara agregat di tingkat nasional, karena rentang kendalinya lebih pendek. Secara pendanaan, Tugas Pembantuan dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dimana Tugas Pembantuan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika pemberi penugasan adalah Pemerintah Pusat, namun jika pemberi penugasan adalah Pemerintah Daerah Provinsi maka pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi).

Pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 juga disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun sampai dengan saat ini Peraturan Pemerintah dimaksud belum terbit, sehingga pelaksanaanya masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pola pertanggungjawaban dalam Tugas Pembantuan ini pada prinsipnya adalah penerima tugas pembantuan harus bertanggungjawab kepada pemberi penugasan, namun pada kondisi dimana Tugas Pembantuan berasal dari Pemerintah kepada Bupati/Walikota, maka selain Bupati/Walikota bertanggungjawab kepada pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga, juga harus melaporkan kepada Gubernur selaku wakil dari Pemerintah Pusat di daerah. Sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota hanya melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan saja, sedangkan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Dekonsentrasi menjadi kewajiban Gubernur dalam penyampaian pertanggungjawabannya.

Berkaitan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017, pada pasal 15 ayat 2 dinyatakan bahwa Hasil Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan menjadi bagian dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pelaporan Tugas Pembantuan merupakan program / kegiatan kementerian, Pemerintah Provinsi atau lembaga yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di daerah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kepentingan daerah untuk memberikan pelaporan kepada Pemerintah disamping sebagai bagian strategis dari dokumentasi capaian kegiatan yang menjadi potret ketercapaian program/kegiatan tersebut pada daerah yang secara simultan dihajatkan berkontribusi pada masyarakat.

3.2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DI KABUPATEN

Tugas pembantuan di kabupaten adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Tugas pembantuan ini disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan di kabupaten:

- Pemerintah kabupaten menerima tugas pembantuan dari pemerintah pusat
- Pemerintah kabupaten melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan penugasan yang diberikan
- Pemerintah kabupaten melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pembantuan kepada pemerintah pusat
- Pemerintah kabupaten menggunakan dana tugas pembantuan untuk membiayai kegiatan fisik
- Pemerintah kabupaten meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum

Berkenaan dengan tugas pembantuan, pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Pemerintah provinsi, juga dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi, serta, Pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten/kota.

Tujuan tugas pembantuan: Meningkatkan pencapaian kinerja, Meningkatkan efisiensi, Meningkatkan efektivitas, Menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program tugas pembantuan dengan program kegiatan APBD. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota.

Adapun Tugas Pembantuan yang telah diterima Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

a. Tahun 2019
   - Instansi Pemberian Tugas Pembantuan : Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Pelaksana Tugas Pembantuan : Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar
   - nstansi Pemberian Tugas Pembantuan : Kementerian Sosial. Pelaksana Tugas Pembantuan : Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar

b. Tahun 2020
   - Instansi Pemberian Tugas Pembantuan : Kementerian Sosial. Pelaksana Tugas Pembantuan : Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar
   - Instansi Pemberian Tugas Pembantuan : Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Pelaksana Tugas Pembantuan : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar.
   - Instansi Pemberian Tugas Pembantuan : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pelaksana Tugas Pembantuan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar.
   - Instansi Pemberian Tugas Pembantuan : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat. Pelaksana Tugas Pembantuan : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar.
   - Instansi Pemberian Tugas Pembantuan : Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat. Pelaksana Tugas Pembantuan : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar.

c. Tahun 2021
   - Instansi Pemberian Tugas Pembantuan : Kementerian Pertanian. Pelaksana Tugas Pembantuan : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar.
   - Instansi Pemberian Tugas Pembantuan : Kementerian Perdagangan. Pelaksana Tugas Pembantuan : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar.
   - Instansi Pemberian Tugas Pembantuan : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pelaksana Tugas Pembantuan : Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar.

d. Tahun 2022
   - Instansi Pemberian Tugas Pembantuan : Kementerian Pertanian. Pelaksana Tugas Pembantuan : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar.
   - Instansi Pemberian Tugas Pembantuan : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pelaksana Tugas Pembantuan : Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar.

e. Tahun 2023
   - Instansi Pemberian Tugas Pembantuan : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pelaksana Tugas Pembantuan : Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar.

3.3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten

Kegiatan-kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar merupakan pelaksanaan dari program/kegiatan dari Pemerintah Pusat yaitu :

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Kementerian Keuangan

Penjabaran pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian tersebut kepada Kabupaten Polewali Mandar diimplementasikan dan dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar di Tahun Anggaran 2024. Adapun Program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembantuan ini adalah :

1) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

OPD Pelaksana : Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM

- ✓ Dasar pelaksanaan tugas pembantuan Petikan DIPA Nomor : DIPA-067.07.4.419109/2024 Keputusan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Tanggal 28 November 2023. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi dengan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Output Kegiatan yaitu terbangunnya pemukiman baru, pemerataan penduduk, serta meningkatkan kesejahteran warga transmigrasi dan warga sekitarnya. Rincian Kegiatan yaitu koordinasi kegiatan, fasilitasi dan pembinaan lembaga, fasilitasi dan pembinaan masyarakat, bantuan peralatan dan prasaranan bidang konektivitas darat. Lokasi kegiatan berada di Satuan Pemukiman Ratte Desa Ratte, Satuan Pemukiman Pirian Tapiko Desa Pirian Tapiko dan Desa Taramanu Tua Kecamatan Tubbi Taramanu. Alokasi anggaran sebesar Rp. 1,859,601,000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1,838.365.004 atau 98,86%.
- ✓ Dasar pelaksanaan tugas pembantuan Petikan DIPA Nomor : DIPA-067.07.4.419109/2024 Keputusan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Tanggal 28 November 2023. Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Output Kegiatan yaitu Tersedianya Layanan Perkantoran. Rincian Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal. Lokasi kegiatan berada di Kantor Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM. Alokasi anggaran sebesar Rp. 59.859.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 56.460.000 atau 94,32%.

2) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

OPD Pelaksana : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- ✓ Dasar pelaksanaan tugas pembantuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Perpres Nomor 15 Tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 17/SE/M/2023. Program DAK Fisik Infrastruktur Bidang Sanitasi dengan Kegiatan DAK Fisik Infrastruktur Bidang Sanitasi. Output kegiatan terbangunnya sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik skala komunal dan skala individual berbasis kepada masyarakat, prasarana sanitasi publik, dan peningkatan kinerja sistem pengelolaan air limbah terpusat serta air limbah setempat. Rincian Kegiatan Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK) yang berlokasi di 5 (lima) Desa dan Kelurahan. Rincian kegiatan Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan minimal 50 KK yang berlokasi di 8 (delapan) Desa.
- ✓ Dasar pelaksanaan tugas pembantuan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 03/SE/DC/2024. Program Hibah Air Limbah Setempat dengan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S). Output kegiatan untuk mendorong pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah domestik. Rincian Kegiatan Pembangunan sub-sistem pengolahan setempat berupa tangki septik yang dilengkapi resapan yang berlokasi di 9 (sembilan) Desa.

3) Kementerian Keuangan

OPD Pelaksana : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- ✓ Dasar pelaksanaan tugas pembantuan PP Nomor 29/ORT/M/2018.

Program Hibah Air Limbah Setempat dengan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S). Output kegiatan untuk mendorong pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah domestik. Rincian Kegiatan Pembangunan sub-sistem pengolahan setempat berupa tangki septik yang dilengkapi resapan yang berlokasi di 9 (sembilan) Desa.

3.3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat tidak dapat memberikan penugasan kepada pemerintah daerah kabupaten termasuk Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan asas tugas pembantuan pada Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fiskal daerah yang mengakibatkan Belanja Bantuan Keuangan tidak direncanakan dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024. Selain itu, alokasi anggaran yang terbatas tersebut difokuskan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Sulawesi Barat.

3.3.3. Permasalahan dan Kendala

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat atau dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi sebagai berikut :

a) Sangat terbatasnya Sumber Daya Manusia Aparatur (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap) pada Bidang Ketransmigrasian Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar.
b) Pengangkutan material ke lokasi kegiatan SP Ratte terkendala pada infrastruktur jalan dan jembatan.

3.3.4. Saran dan Tindaklanjut

Adapun upaya penyelesaian permasalahan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a) Telah bermohon kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Polewali Mandar untuk penambahan personil teknis pada Bidang Ketransmigrasian Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar.
b) Mengusulkan adanya penambahan kendaraan dinas khususnya kendaraan yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil atau sulit terjangkau.
c) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Selalu Mengacu Pada JUKNIS Kegiatan

Tabel 3.1.
Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Tahun 2024

No	KEMENTERIAN / LPNK	DASAR PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA	TARGET		REALISASI			KET
						TARGET KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	***Kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi***	***PETIKAN DIPA NOMOR : DIPA-067.07.4.419109/2024 Keputusan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Tanggal 28 November 2023***	***Program :*** *Daerah Tertinggal Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi.* ***Kegiatan :*** *Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi* ***Output :*** *Terbangunnya pemukiman baru, pemerataan penduduk, serta meningkatkan kesejahteran warga transmigrasi dan warga sekitarnya.* ***Rincian Kegiatan :*** *koordinasi kegiatan, fasilitasi dan pembinaan lembaga, fasilitasi dan pembinaan masyarakat, bantuan peralatan dan prasaranan bidang konektivitas darat*	1. *SP. Ratte, Desa Ratte Kecamatan Tubbi Taramanu* 2. *SP. Piriang Tapiko, Desa Piriang Tapiko Kecamatan Tubbi Taramanu* 3. *Desa Taramanu Tua Kecamatan Tubbi Taramanu*	*Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan ESDM*	*2 SP*	*1.859.601.000*	*2 SP*	*1.838.365.004*	*98,86%*	

			Program : *Dukungan Manajemen* ***Kegiatan :*** *Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi* ***Output :*** *Tersedianya Layanan Perkantoran* ***Rincian Kegiatan :*** *Layanan Dukungan Manajemen Internal*	*Kantor Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan ESDM di Kecamatan Polewali*	*Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan ESDM*	*1 SKP*	*59.859.000*	*1 SKP*	*56.460.000*	*94,32%*	
2	***Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat***	***- UU No. 23 Tahun 2014*** ***- Perpres Nomor 15 Tahun 2023*** ***- SE Menteri PUPR Nomor 17/SE/M/2023***	***Program :*** *DAK Fisik Infrastruktur Bidang Sanitasi* ***Kegiatan :*** *DAK Fisik Infrastruktur Bidang Sanitasi* ***Output :*** *Terbangunnya sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik skala komunal dan skala individual berbasis kepada masyarakat, prasarana sanitasi publik, dan peningkatan kinerja sistem pengelolaan air limbah terpusat serta air limbah setempat*								
			Rincian Kegiatan : *Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK)*	Desa Botto Kec. Campalagian	DPUPR	35 SR	Rp. 350,000,000	35 SR	Rp. 350,000,000	100%	
				Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo	DPUPR	35 SR	Rp. 350,000,000	35 SR	Rp. 350,000,000	100%	
				Kelurahan Darma Kecamatan Polewali	DPUPR	35 SR	Rp. 350,000,000	35 SR	Rp. 350,000,000	100%	
				Kel. Takatidung Kecamatan Polewali	DPUPR	35 SR	Rp. 350,000,000	35 SR	Rp. 350,000,000	100%	
				Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali	DPUPR	35 SR	Rp. 350,000,000	35 SR	Rp. 350,000,000	100%	
			Rincian Kegiatan : *Pembangunan Tangki Septik*	Desa Karama Kec. Tinambung	DPUPR	50 SR	Rp. 649,150,000	50 SR	Rp 649,150,000	100%	

			Individu Perdesaan minimal 50 KK	Desa Lembang-Lembang Kecamatan Limboro	DPUPR	50 SR	Rp. 649,161,000	50 SR	Rp 649,161,000	100%	
				Desa Laliko Kec. Campalagian	DPUPR	50 SR	Rp. 649,150,000	50 SR	Rp. 649,150,000	100%	
				Desa Panyampa Kec. Campalagian	DPUPR	50 SR	Rp. 649,150,000	50 SR	Rp. 649,150,000	100%	
				Desa Katumbangan Lemo Kec. Campalagian	DPUPR	50 SR	Rp. 649,150,000	50 SR	Rp. 649,150,000	100%	
				Desa Lampoko Kec. Campalagian	DPUPR	50 SR	Rp. 649,150,000	50 SR	Rp. 649,150,000	100%	
				Desa Batupanga Daala Kec. Luyo	DPUPR	50 SR	Rp. 649,150,000	50 SR	Rp. 649,150,000	100%	
				Desa Rappang Barat Kecamatan Mapilli	DPUPR	50 SR	Rp. 649,150,000	50 SR	Rp. 649,150,000	100%	
3	***- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*** ***- Kementerian Keuangan***	***- SE NO: 03/SE/DC/2024*** ***- PP NO: 29/ORT/M/2018***	***Program :*** *Hibah Air Limbah Setempat* ***Kegiatan :*** *Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Lombah Domestik Setempat (SPALD-S)* ***Output :*** *untuk mendorong pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah domestik*								
			Rincian Kegiatan : *Pembangunan sub-sistem pengolahan setempat berupa tangki septik yang dilengkapi resapan*	Desa Katumbangan Lemo Kecamatan Campalagian	DPUPR	29 SR	Rp. 174,000,000	29 SR	Rp. 174,000,000	100%	
				Desa Lapeo Kec. Campalagian	DPUPR	38 SR	Rp. 228,000,000	38 SR	Rp. 228,000,000	100%	
				Desa Sumarang Kec. Campalagian	DPUPR	137 SR	Rp. 822,000,000	137 SR	Rp. 822,000,000	100%	
				Desa Napo Kecamatan Limboro	DPUPR	96 SR	Rp. 576,000,000	96 SR	Rp. 576,000,000	100%	
				Desa Tenggelang Kecamatan Luyo	DPUPR	42 SR	Rp. 252,000,000	42 SR	Rp. 252,000,000	100%	

				Desa Mapilli Barat Kecamatan Luyo	DPUPR	25 SR	Rp. 150,000,000	25 SR	Rp. 150,000,000	100%	
				Desa Puccadi Kecamatan Luyo	DPUPR	50 SR	Rp. 300,000,000	50 SR	Rp. 300,000,000	100%	
				Desa Piriang Tapiko Kec. Tubbi Taramanu	DPUPR	51 SR	Rp. 306,000,000	51 SR	Rp. 306,000,000	100%	
				Desa Takatidung Kecamatan Polewali	DPUPR	216 SR	Rp. 1,296,000,000	216 SR	Rp. 1,296,000,000	100%	

Tabel 3.2.
Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Tahun 2024

No	PERANGKAT DAERAH PROVINSI / INSTANSI VERTIKAL LAINNYA	DASAR PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA	TARGET		REALISASI			KET
						TARGET KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Bersadarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, adalah :

- ✓ Pendidikan anak usia dini
- ✓ Pendidikan dasar
- ✓ Pendidikan kesetaraan

4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar dalam mencapai SPM Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2024 termasuk perhitungan pembiayaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Target Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET		PEMBIAYAAN / PAGU (Rp)
			KINERJA	%	
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	17.760	100	145.000.906.256
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	82.270	100	
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan	5.392	100	

4.1.3. Realisasi

Target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar sebagai pelaksana SPM Urusan Pendidikan selama Tahun Anggaran 2024 dengan membandingkan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya adalah sebagai berikut :

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : 12.765, Kantor Kemenag : 3.352, Total : 16.117
- Pendidikan Dasar
  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SD) : 40.519, Kantor Kemenag (MI) : 9.207,
  Total : 49.726.
  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SMP) : 14.758, Kantor Kemenag (MTS) : 8.453,
  Total : 23.211
  Jumlah keseluruhan Realisasi Pendidikan Dasar: 72.937

Tabel 4.2.
Realisasi Peencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Persentase capaian Penerima (Jiwa) Layanan Dasar				Persentase capaian mutu Barang/Jasa (%)	INDEKS PENCAPAIAN SPM
		Target	Realisasi	Belum terlayani	Capaian (%)		
1	Pendidikan Anak UsiaDini (PAUD)	17,760	16,117	1,643	**90.75**	**43.44**	**82.09**
2	Pendidikan Dasar	82,270	72,937	9,333	**88.66**	**65.85**	**84.09**
3	Pendidikan Kesetaraan	5,392	1,729	0	**32.07**	**62.46**	**38.14**
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN							**68.11**
							TUNTAS MUDA

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber dana lain yang sah. Adapun besaran anggaran dalam rangka penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 4.3.
Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN	ALOKASI ANGGARAN & SUMBER DANA (Rp)			REALISASI (Rp)	%	KET
		DAK	DAU	JUMLAH			
1	Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)		21.594.984.920	**21.594.984.920**	**10,867,497,828**	**50,32**	
2	Pendidikan Dasar						
-	Pendidikan Sekolah Dasar		84.757.884.783	**84.757.884.783**	**49,481,853,371**	**59,61**	
-	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		32.189.593.399	**32.189.593.399**	**18,698,173,036**	**55,09**	
3	Pendidikan Kesetaraan		6.321.651.274	**6.321.651.274**	**3.271.421.345**	**97.87**	
Total Program Pengelolaan Pendidikan				**144.864.114.376**	**82,318,945,580**	**56,82**	
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan				**136.791.880**	**41.423.460**	**30,28**	
TOTAL SPM PENDIDIKAN				**145.000.906.256**	**82.360.369.040**	**56,80**	

4.1.5. Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Urusan Pendidikan pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.4.
Dukungan Personil atau Jumlah Pegawai Lingkup
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kemenag Tahun 2024

No	KECAMATAN	JUMLAH GURU DAN KEPALA SEKOLAH								
		Guru PAUD	Guru RA	Kasek PAUD	Guru SD	Guru MI	Kasek SD	Guru SMP	Guru MTs.	Kasek SMP
1	TINAMBUNG	34	30	24	228	68	20	82	99	4
2	BALANIPA	35	13	29	247	23	22	56	54	2
3	LIMBORO	37	23	13	235	38	23	75	55	6
4	TUTAR	14	9	31	226	20	24	141	47	13
5	ALU	25	2	15	215	12	22	84	14	6
6	CAMPALAGIAN	109	28	69	535	117	43	199	154	10
7	LUYO	28	12	50	233	87	21	93	140	5
8	WONOMULYO	81	25	46	375	73	31	169	92	6
9	MAPILLI	11	21	30	199	76	18	65	90	4
10	TAPANGO	24	14	32	160	73	14	84	15	4
11	MATAKALI	47	13	37	186	38	13	50	60	3
12	BULO	7	4	20	118	29	11	62	18	5
13	POLEWALI	100	11	56	454	83	29	223	80	8
14	BINUANG	8	51	26	244	237	23	67	186	5
15	ANREAPI	16	3	16	114	18	11	35	36	2
16	MATANGNGA	5	-	15	70	27	7	34	-	3
TOTAL		**581**	**259**	**509**	**3.839**	**1.019**	**332**	**1.519**	**1.140**	**86**

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Kurangnya anggaran terhadap program yang mendukung pengembalian anak putus sekolah
- Untuk program pengembalian anak putus sekolah hanya mampu melakukan pada batas pengadministrasi/ pendataan dikarenakan faktor biaya yang terbatas.
- Masih adanya sekolah dengan sarana dan prasarana yang kurang mendukung khususnya di daerah terpencil.
- Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar;
- Belum optimalnya Mutu dan kualitas tenaga kependidikan.

b. Solusi

- Peningkatan sosialisasi dan pencerahan tentang pentingnya pendidikan bagi anak dengan peningkatan peran Guru, Kepala Sekolah, Komite, pemerintah setempat (lurah/kepala desa).
- Peningkatan anggaran untuk melaksanakan program kegiatan yang terkait.
- Memperbaiki infrastruktur jalan desa, sarana prasarana pendidikan serta rasio guru-murid dan rasio kelas-murid.

4.1.7. Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Urusan Pendidikan sebagai berikut :

Tabel 4.5.
Program dan Kegiatan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		CAPAIAN (%)
			PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
A	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		**144,864,114,376**	**82,318,945,580**	**56.82**
A.1.	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**		**84,757,884,783**	**49,481,853,371**	**58.38**
A.1.1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu	Ruang	3,574,846,749	2,632,991,171	73.65
A.1.2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	1,797,134,542	1,308,630,296	72.82
A.1.3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	545,854,350	508,449,011	93.15
A.1.4	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Unit	3,816,749,887	2,961,865,038	77.60
A.1.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu	Ruang	429,509,200	189,559,038	44.13
A.1.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	577,433,400	375,078,512	64.96
A.1.7	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	4,194,253,400	4,160,270,000	99.19
A.1.8	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	6,152,750,000	5,921,417,500	96.24
A.1.9	Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik	299,999,620	262,745,802	87.58
A.1.10	Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	30,231,810	0	0.00
A.1.11	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	464,610,686	294,698,356	63.43
A.1.12	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	199,995,350	8,128,000	4.06
A.1.13	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	41,615,095,834	16,273,004,202	39.10
A.1.14	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	4,822,705,000	3,331,623,404	69.08
A.1.15	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (Tik) Untuk Pendidikan	Orang	1,094,697,256	354,172,456	32.35
A.1.16	Pengembangan Konten Digital Untuk Pendidikan	Konten Digital	254,931,156	245,998,356	96.50
A.1.17	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	Dokumen	335,268,758	0	0.00
A.1.18	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	3,936,354,640	2,482,358,561	63.06
A.1.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Unit	431,881,750	369,724,198	85.61
A.1.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	10,183,581,395	7,801,139,470	76.61
A.2.	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**		**32,189,593,399**	**18,698,173,036**	**58.09**
A.2.1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	390,000,000	239,135,527	61.32
A.2.2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	391,813,300	323,001,318	82.44
A.2.3	Pembangunan Laboratorium	Ruang	673,635,146	548,348,022	81.40
A.2.4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ruang	2,162,792,700	1,598,061,451	73.89
A.2.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1,841,134,664	1,513,643,160	82.21
A.2.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	410,863,200	380,838,009	92.69
A.2.7	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	657,683,150	510,663,802	77.65
A.2.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Ruang	223,577,244	210,049,214	93.95
A.2.9	Pengadaan Mebel Sekolah		1,600,181,000	1,583,650,000	98.97
A.2.10	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Ruang	2,313,700,000	2,199,130,000	95.05

A.2.11	Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa	Ruang	519,348,830	333,188,470	64.16
A.2.12	Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Ruang	34,870,110	0	0.00
A.2.13	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	410,929,647	234,221,407	57.00
A.2.14	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Ruang	140,933,920	50,220,044	35.63
A.2.15	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	18,487,593,442	7,782,193,300	42.09
A.2.16	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (Tik) Untuk Pendidikan	Satuan Pendidikan	848,145,540	481,345,320	56.75
A.2.17	Pengembangan Konten Digital Untuk Pendidikan	Orang	267,875,918	187,925,018	70.15
A.2.18	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	Orang	296,206,614	4,250,000	1.43
A.2.19	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dokumen	139,749,500	139,749,500	100.00
A.2.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/Tu	Ruang	378,559,474	378,559,474	100.00
A.3.	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**		**21,594,984,920**	**10,867,497,828**	**50.32**
A.3.1	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas PAUD	Paket	1,102,478,100	803,812,235	72.91
A.3.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Paket	678,652,800	493,952,306	72.78
A.3.3	Pengadaan Perlengkapan PAUD		1,909,512,691	59,287,500	3.10
A.3.4	Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	Paket	3,040,044,360	2,184,150,000	71.85
A.3.5	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	411,802,450	25,286,885	6.14
A.3.6	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen PAUD	Orang	238,030,755	4,031,511	1.69
A.3.7	Pengelolaan Dana Bop PAUD	Lembaga	11,953,656,400	6,012,166,315	50.30
A.3.8	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	Lembaga	41,924,306	0	0.00
A.3.9	Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	69,955,975	0	0.00
A.3.10	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dokumen	2,148,927,083	1,284,811,076	59.79
A.4.	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**		**6,321,651,274**	**3,271,421,345**	**51.75**
A.4.1	Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Lembaga	219,472,610	0	0.00
A.4.2	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	118,101,839	69,816,420	59.12
A.4.3	Pengelolaan Dana Bop Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Satuan Pendidikan	5,666,617,890	2,919,615,140	51.52
A.4.4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	Dokumen	317,458,935	281,989,785	88.83
A.4.5	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Orang			
B	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**		**136,791,880**	**41,423,460**	**30.28**
B.1.	**Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**		**136,791,880**	**41,423,460**	**30.28**
B.1.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan	Dokumen	73,100,820	0	0.00

	Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
B.1.2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	63,691,060	41,423,460	65.04
TOTAL SPM PENDIDIKAN			**145,000,906,256**	**82,360,369,040**	**56.80**

4.2. URUSAN KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Bersadarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, adalah :

- ✓ Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4)
- ✓ Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- ✓ Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir umur 0 - 28 hari
- ✓ Pelayanan Kesehatan Balita umur 0 - 59 bulan
- ✓ Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Kelas 1 dan Kelas 7)
- ✓ Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif umur 15 - 59 Tahun
- ✓ Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut umur 60 Tahun ke atas
- ✓ Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- ✓ Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus (DM)
- ✓ Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
- ✓ Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)
- ✓ Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV

4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar dalam mencapai SPM Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2024 termasuk perhitungan pembiayaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6.
Target Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET		PEMBIAYAAN / PAGU (Rp)
			KINERJA	%	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	8.067	100	211,027,000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	8.067	100	226,001,000
3	Pelayanan kesehatanbayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	7.997	100	276,444,000
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	40.399	100	100,000,500
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	78.318	100	99,999,680
6	Pelayanan kesehatan	Jumlah warga negara usia	312987	100	100,024,100

	pada usia produktif	produktifyang mendapatkan layanan kesehatan			
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	47.458	100	149,463,490
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	22.754	100	99,999,800
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	4.288	100	473,445,460
10	Pelayanan kesehatan orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan	991	100	99,999,800
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tubercolusis yang mendapatkan layanan kesehatan	9.686	100	570,628,990
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan Layanan Kesehatan	11.312	100	99,999,966
Total Anggaran SPM Kesehatan					**2,507,033,786**

4.2.3. Realisasi

Target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar sebagai pelaksana SPM Urusan Kesehatan selama Tahun Anggaran 2024 dengan membandingkan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7.
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Persentase capaian Penerima (Jiwa) Layanan Dasar				Persentase capaian mutu Barang/Jasa (%)	INDEKS PENCAPAIAN SPM
		Target	Realisasi	Belum terlayani	Capaian (%)		
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	8.067	5.170	2.897	**64.09**	**87,24**	**68,72**
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.067	6.710	1.357	**83.18**	**93,89**	**85,32**
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	7.997	6.551	1.446	**81.92**	**91,92**	**83,92**
4	Pelayanan kesehatan balita	40.399	31.914	8.485	**79,00**	**78,00**	**78,80**
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	78.318	40.096	38.222	**51.20**	**79,54**	**56,86**
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	312987	162165	150,822	**51.81**	**79,14**	**57,28**
7	Pelayanan kesehatanpada usia lanjut	47.458	33.080	14.378	**69,70**	**97,67**	**75,30**
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	22.754	19.329	3.425	**84,95**	**100**	**87,96**
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	4.288	4.091	197	**95,41**	**99,62**	**96,25**

10	Pelayanan kesehatan orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	991	855	136	**86,28**	**65,28**	**82,08**
11	Pelayanan kesehatanorang terduga tuberkulosis	9.686	9.686	0	**100,00**	**88,49**	**97,70**
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahantubuh manusia (HIV)	11.312	6.772	4.540	**59,87**	**91,97**	**66,29**
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KESEHATAN							**78,04**
							TUNTAS PRATAMA

4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber dana lain yang sah. Adapun besaran anggaran dalam rangka penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 4.8.
Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN	ALOKASI ANGGARAN & SUMBER DANA (Rp)			REALISASI (Rp)	%	KET
		DAK	DAU	JUMLAH			
1	Pelayanan KesehatanIbu Hamil		211,027,000	**211,027,000**	**129,396,200**	**61.32**	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		226,001,000	**226,001,000**	**116,812,400**	**51.69**	
3	Pelayanan kesehatanbayi baru lahir		276,444,000	**276,444,000**	**243,936,000**	**88.24**	
4	Pelayanan kesehatanbalita		100,000,500	**100,000,500**	**82,056,600**	**82.06**	
5	Pelayanan kesehatanpada usia pendidikandasar		99,999,680	**99,999,680**	**76,991,000**	**76.99**	
6	Pelayanan kesehatanpada usia produktif		100,024,100	**100,024,100**	**85,644,400**	**85.62**	
7	Pelayanan kesehatanpada usia lanjut		149,463,490	**149,463,490**	**35,932,300**	**24.04**	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi		99,999,800	**99,999,800**	**98,169,336**	**98.17**	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus		473,445,460	**473,445,460**	**81,676,096**	**17.25**	
10	Pelayanan kesehatan orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat		99,999,800	**99,999,800**	**52,870,402**	**52.87**	
11	Pelayanan kesehatanorang terduga tuberkulosis		570,628,990	**570,628,990**	**68,234,773**	**11.96**	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)		99,999,966	**99,999,966**	**87,350,186**	**87.35**	
TOTAL SPM KESEHATAN				**2,507,033,786**	**1,159,069,693**	**46.23**	

4.2.5. Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.9.
Jumlah Personil / Pegawai Lingkup Dinas Kesehatan Berdasarkan Kecamatan, Instansi/Puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar Tahun 2024

No	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH TENAGA KESEHATAN								
			Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Promosi Kesehatan	Tenaga Sanitasi Lingkungan	Nutrisionis	Apoteker	Ahli Teknologi Laboratorium
1	BINUANG	Puskesmas Binuang	5	2	41	68	13	4	4	5	2
		Puskesmas Polewali									
2	POLEWALI	Puskesmas Massenga	6	4	65	98	27	4	6	4	4
		Puskesmas Pekkabata									
3	ANREAPI	Puskesmas Anreapi	2	1	28	19	6	1	2	3	2
4	MATAKALI	Puskesmas Matakali	3	2	31	45	7	2	2	3	2
5	TAPANGO	Puskesmas Tapango	2	1	36	40	7	2	4	2	1
6	WONOMULYO	Puskesmas Wonomulyo	8	2	78	81	13	3	4	3	2
		Puskesmas Kebunsari									
7	MAPILLI	Puskesmas Mapilli	2	1	31	57	10	2	2	1	1
8	LUYO	Puskesmas Luyo	3	1	28	43	9	2	2	2	1
9	CAMPALAGIAN	Puskesmas Campalagian	5	2	84	107	16	3	5	4	1
		Puskesmas Katumbangan									
10	BALANIPA	Puskesmas Balanipa	2	1	26	51	5	2	2	2	1
11	TINAMBUNG	Puskesmas Tinambung	2	1	37	69	9	2	2	2	1
12	LIMBORO	Puskesmas Limboro	2	1	26	37	4	1	3	2	1
13	ALU	Puskesmas Alu	1	1	14	12	6	1	2	2	1
14	TUBBI TARAMANU	Puskesmas Tutar	2	1	33	40	7	2	1	2	1
15	MATANGNGA	Puskesmas Matangnga	2	0	21	29	6	1	1	1	1
16	BULO	Puskesmas Bulo	2	1	22	21	6	2	1	3	1

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Tenaga (Sumber Daya Manusia) yang masih kurang.
- Keterbatasan dana dan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan.
- Masih Kurangnya pemahaman tentang operasioanal Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

b. Solusi

- Pengajuan tambahan tenaga (Sumber Daya Manusia)
- Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan
- Mengadakan pelatihan dan workshop

4.2.7. Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Urusan Kesehatan sebagai berikut :

Tabel 4.10.
Program dan Kegiatan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024.

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		CAPAIAN (%)
			PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
A	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**2,507,033,786**	**1,159,069,693**	**46.23**
A.1.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**2,507,033,786**	**1,159,069,693**	**46.23**
A.1.1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	211,027,000	129,396,200	61.32
A.1.2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	226,001,000	116,812,400	51.69
A.1.3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	276,444,000	243,936,000	88.24
A.1.4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	100,000,500	82,056,600	82.06
A.1.5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	99,999,680	76,991,000	76.99
A.1.6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	100,024,100	85,644,400	85.62
A.1.7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	149,463,490	35,932,300	24.04
A.1.8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	99,999,800	98,169,336	98.17
A.1.9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	473,445,460	81,676,096	17.25
A.1.10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	99,999,800	52,870,402	52.87
A.1.11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	570,628,990	68,234,773	11.96
A.1.12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risikon Terinfeksi HIV	Orang	99,999,966	87,350,186	87.35

4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Bersadarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, adalah :

- ✓ Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
- ✓ Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar dalam mencapai SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2024 termasuk perhitungan pembiayaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11.
Target Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANANDASAR	INDIKATOR	TARGET		PEMBIAYAAN / PAGU (Rp)
			KINERJA	%	
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok AirMinum Sehari Hari	8,415	100	17,260,710,707
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	5,985	100	12,096,496,300
Total Anggaran SPM Pekerjaan Umum					**29,357,207,007**

4.3.3. Realisasi

Target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar sebagai pelaksana SPM Urusan Pekerjaan Umum selama Tahun Anggaran 2024 dengan membandingkan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12.
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	JENIS PELAYANANDASAR	Persentase capaian Penerima (Jiwa) Layanan Dasar				Persentase capaian mutu Barang/Jasa (%)	INDEKS PENCAPAIAN SPM
		Target	Realisasi	Belum terlayani	Capaian (%)		
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	8.415	7.345	1.070	**87.28**	**93,64**	**88.56**
2	Penyediaan PelayananPengolahan Air limbahdomestik	5.985	5.985	0	**100.00**	**100,00**	**100,00**
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM PEKERJAAN UMUM							**94,28** **TUNTAS UTAMA**

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber dana lain yang sah. Adapun besaran anggaran dalam rangka penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 4.13.
Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN	ALOKASI ANGGARAN & SUMBER DANA (Rp)			REALISASI (Rp)	%	KET
		DAK	DAU	JUMLAH			
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari		17,260,710,707	**17,260,710,707**	**16,220,343,838**	**93.97**	
2	Penyediaan PelayananPengolahan Air limbahdomestik		12,096,496,300	**12,096,496,300**	**12,064,526,300**	**99.74**	
TOTAL SPM PEKERJAAN UMUM				**29,357,207,007**	**27,366,719,278**	**93.22**	

4.3.5. Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar dengan rincian sebagai berikut :

- Kepala Dinas PUPR : 1 orang
- Sekretaris Dinas PUPR : 1 orang
- Kepala Bidang Cipta Karya : 1 orang
- Kepala Seksi : 1 orang
- Kepala UPTD : 1 orang
- Kasubag UPTD : 1 orang
- Staf : 3 orang
- PTT : 4 orang

Total : 13 orang

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Minimnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
- Kurangnya pengawasan/monitoring terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.
- Masih sulitnya mendapatkan sumber air baku yang akan memenuhi kebutuhan air bersihdan air minum masyarakat.
- Belum optimalnya akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi yang layak terutama pada daerah terpencil dan masyarakat miskin.

b. Solusi

- Penambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
- Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan / monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan dimulai dari proses perencanaan, pelakasanaan, hingga pelaporan dilingkup interen maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk meminimialisir terjadinya kesalahan sehingga bias mencapai hasil yang maksimal.
- Menyiapkan master plan sumber air baku jaringan pipa untuk kawasan perkotaan, wilayah perdesaan dan pesisir.

- Mengendalikan penebangan pohon atau meningkatkan penghijauan di sekitar sumber air baku.

4.3.7. Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum sebagai berikut :

Tabel 4.14.
Program dan Kegiatan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		CAPAIAN (%)
			PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
A.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**		**17,260,710,707**	**15,374,645,149**	**89.07**
A.1.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**		**17,260,710,707**	**15,374,645,149**	**89.07**
A.1.1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	127,900,049	0	0.00
A.1.2	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	75,000,000	74,999,370	100.00
A.1.3	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	17,057,810,658	15,299,645,779	89.69
B.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**		**12,096,496,300**	**11,992,074,129**	**99.13**
B.1.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**12,096,496,300**	**11,992,074,129**	**99.13**
B.1.1	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	1,879,784,300	1,859,951,400	98.94
B.1.2	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Orang	9,184,152,000	9,174,245,000	99.89
B.1.3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman Berbasis Masyarakat	Orang	1,032,560,000	957,877,729	92.77
TOTAL SPM PEKERJAAN UMUM			**29,357,207,007**	**27,366,719,278**	**93.22**

4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Bersadarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah :

- ✓ Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan;
- ✓ Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar dalam mencapai SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2024 termasuk perhitungan pembiayaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15.
Target Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET		PEMBIAYAAN / PAGU (Rp)
			KINERJA	%	
1	Penyediaan dan rehabiitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Berhak memperoleh rumah Layak Huni	0	0	9,996,809
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten / kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-	-
Total Anggaran SPM Perumahan Rakyat					**118.139.100**

**Pada tahun anggaran 2024 tidak ada program relokasi oleh Pemerintah Daerah.*
**Alokasi anggaran untuk Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota*

4.4.3. Realisasi

Target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar sebagai pelaksana SPM Urusan Perumahan Rakyat selama Tahun Anggaran 2024 dengan membandingkan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.16.
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Persentase capaian Penerima (Jiwa) Layanan Dasar				Persentase capaian mutu Barang/Jasa (%)	INDEKS PENCAPAIAN SPM
		Target	Realisasi	Belum terlayani	Capaian (%)		
1	Penyediaan dan rehabiitasi rumah yanglayak huni bagi korbanbencana Kab/kota	0	0	0	**0**	**0**	**0**
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	-	-	-	-	-	-
KATEGORI INDEKS CAPAIAN SPM PERUMAHAN RAKYAT							**100**
							TUNTAS PARIPURNA

Keterangan :

a. *Pada tahun anggaran 2024 tidak terjadi bencana yang menyebabkan perlunya Rehabilitasi / Pembangunan kembali rumah layak huni bagi korban bencana. Kegiatan yang dilakukan hanya Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana.*
b. *Pada tahun 2024 tidak ada program Pemerintah Daerah kabupaten untuk merelokasi masyarakat / warga, sehingga jenis layanan penyediaan atau fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat tidak terlaksana.*

4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber dana lain yang sah. Adapun besaran anggaran dalam rangka penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 4.17.
Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN	ALOKASI ANGGARAN & SUMBER DANA (Rp)			REALISASI (Rp)	%	KET
		DAK	DAU	JUMLAH			
1	Penyediaan dan rehabiitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/kota		9,996,809	**9,996,809**	**9,996,809**	**100.00**	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	-	-	-	-	-	-
TOTAL SPM PERUMAHAN RAKYAT				**9,996,809**	**9,996,809**	**100.00**	

** Pada tahun anggaran 2024 tidak ada program relokasi oleh Pemerintah Daerah.*
**Alokasi anggaran untuk Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota*

4.4.5. Dukungan Personil

a. Jika terjadi bencana yang menyebabkan rehabilitasi / pembangunan kembali rumah layak huni bagi korban bencana maka dilaksanakan secara terpadu maupun berjenjang tingkat kabupaten/desa.
b. Penyediaan dan rehabiitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten / Kota difasilitasi oleh Bidang Perumahan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan dengan rincian personil sebagai berikut :
   Kepala Dinas : 1 orang
   Sekretaris Dinas : 1 orang
   Kepala Bidang Perumahan : 1 orang
   Jabatan Fungsional : 5 orang
c. Tenaga fasilitator lapangan sebanyak 1 (Satu) orang yang melakukan pendampingan teknis kepada penerima bantuan.
d. Tim OPD teknis (BPBD 3 orang dan Dinas Sosial 2 orang) dengan melibatkan pemerintah setempat dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Tokoh Adat dan unsur Polsek dan Koramil setempat melakukan monitoring secara berkala dengandi buatkan berita acara.

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Sulit melakukan pendataan terkait bencana
- Belum ada skema lokasi aman untuk Rumah Layak Huni
- Belum adanya Standar Besaran Bantuan yang diterima oleh Penerima Bantuan
- Belum adanya regulasi yang mengatur berapa Persentase dari Pagu setiap tahunya yang diberikan dalam pemenuhan SPM
- Belum tersedianya aturan dalam menghitung besaran bantuan yang diberikan kepada

warga penerima pelayanan dasar Baik itu Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Bupati (PERBUB)
- Pada tahun 2024 tidak ada program Pemerintah Daerah kabupaten untuk merelokasi masyarakat / warga, sehingga jenis layanan penyediaan atau fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat tidak ada
- Pada tahun anggaran 2024 tidak terjadi bencana yang menyebabkan Rehabilitasi / Pembangunan kembali rumah layak huni bagi korban bencana

b. Solusi

- Memastikan pemenuhan SPM menjadi program prioritas dalam perencanaan daerah.
- Penguatan Tim Penerapan SPM se Kabupaten Polewali Mandar, didukung dengan alokasi pendanaan untuk kegiatan penunjangnya yang sudah tertera pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.
- Penguatan Tim Penerapan terutama dalam hal fungsi Binwas sehingga capaian SPM dapat tercapai Sesuai target dan merata
- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPM

4.4.7. Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat khususnya Jenis Layanan Penyediaan dan rehabiitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten / kota sebagai berikut :

Tabel 4.18.
Program dan Kegiatan SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		CAPAIAN (%)
			PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
A.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**		**9,996,809**	**9,996,809**	**100.00**
A.1.	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**9,996,809**	**9,996,809**	**100.00**
A.1.1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	9,996,809	9,996,809	100.00
B.1.	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**		**-**	-	-
TOTAL SPM PERUMAHAN RAKYAT			**9,996,809**	**9,996,809**	**100.00**

4.5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, serta Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, adalah :

- ✓ Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- ✓ Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- ✓ Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- ✓ Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana
- ✓ Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar dalam mencapai SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2024 termasuk perhitungan pembiayaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.19.
Target Capaian SPM Urusan Trantibum dan Linmas Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET		PEMBIAYAAN / PAGU (Rp)
			KINERJA	%	
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100 %	100	122,095,412
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	100	284,346,304
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatandan evakuasi korban bencana	100 %	100	
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	100	3,730,000,000
Total Anggaran SPM Trantibumlinmas					**4,136,441,716**

4.5.3. Realisasi

Target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar sebagai pelaksana SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat selama Tahun Anggaran 2024 dengan membandingkan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.20.
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Trantibum dan Linmas Tahun 2024

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Persentase capaian Penerima (Jiwa) Layanan Dasar				Persentase capaian mutu Barang/Jasa (%)	INDEKS PENCAPAIAN SPM
		Target	Realisasi	Belum terlayani	Capaian (%)		
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6	6	0	**100.00**	**83,33**	**96,97**

2	Pelayanan informasi rawan bencana	30	30	0	**100.00**	**75,00**	**95,00**
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	30	30	0	**100.00**	**93,67**	**98,73**
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	86	86	0	**100.00**	**80,00**	**96,00**
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	68	68	0	**100.00**	**98,21**	**99,64**
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUMLINMAS							**97,63**
							TUNTAS UTAMA

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber dana lain yang sah. Adapun besaran anggaran dalam rangka penerapan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 4.21.
Alokasi Anggaran SPM Urusan Trantibum dan Linmas Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	ALOKASI ANGGARAN & SUMBER DANA (Rp)			REALISASI (Rp)	%	KET
		DAK	DAU	JUMLAH			
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum		122,095,412	**122,095,412**	**122,080,140**	**99.99**	
2	Pelayanan informasi rawan bencana		284,346,304	**284,346,304**	**284,332,428**	**100.00**	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana						
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		3,730,000,000	**3,730,000,000**	**3,729,435,226**	**99.98**	
TOTAL SPM TRANTIBUMLINMAS				**4,136,441,716**	**4,135,847,794**	**99,99**	

4.5.5. Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar dengan rincian sebagai berikut :

- ***Satuan Polisi Pamong Praja***

  Rincian Jumlah Tenaga Satpol PP

  - PNS : 112 orang (5 orang PPNS)
  - Non PNS : 121 orang
  - Satlinmas : 2.454 orang

  Rincian Jumlah Tenaga UPTD Damkar

- PNS : 4 Orang
- Non PNS : 93 Orang

➢ ***Badan Penanggulangan Bencana Daerah***

Jumlah personil atau pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar adalah 16 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 22 Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang terurai sebagai berikut :

- Kepala Dinas : 1 orang
- Sekretaris : 1 orang
- Kepala Bidang : 2 orang
- Analis : 5 orang
- Perencana : 1 orang
- Kasubag : 1 orang
- Staf PNS : 5 orang
- SATGAS (Satuan Tugas) atau TRC (Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana) : 17 orang
- Tenaga administrasi : 5 orang

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Belum lengkapnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang sesuai dengan standar operasional;
- Masih kurangnya masyarakat yang mengenali bahaya dan rawan bencana disekitarnya, terutama dilereng yang curam yang sewaktu-waktu dapat mengancam
- Belum ada penempatan Unit Damkar di setiap kecamatan dikarenakan keterbatasan personil damkar
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan kebencanaan dan Peralatan dan logistik kebencanaan masih sangat minim
- Permasalahan dalam pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah kurangnya biaya Operasional Patroli dan Penertiban Satpol PP
- Permasalahan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Unit Damkar) adalah kurangnya armada kendaraan mobil damkar dan peralatan perlengkapan damkar
- Minimnya anggaran yang dikelola oleh unit pemadam kebakaran Kab. Polewali Mandar
- Masih terbatasnya anggaran tersedia dalam penanganan kawasan rawan bencana
- Adanya lokasi atau wilayah kerja damkar yang susah dijangkau oleh unit pemadam kebakaran Kab. Polewali Mandar
- Masih kurangnya penilaian kerusakan dan kerugian setelah terjadi bencana
- Perlunya pelatihan-pelatihan terkait dengan kebencanaan
- Masih terbatasnya anggaran tersedia dalam penanganan kawasan rawan bencana

b. Solusi

- Diharapkan agar Unit Pemadam Kebakaran dapat dibantu atau difasilitasi membentuk relawan damkar yang bisa ditempatkan di wilayah Kecamatan yang belum terjangkau di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
- Diharapkan agar adanya penambahan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional Satpol PP
- Diharapkan agar adanya penambahan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Pemadaman Kebakaran yang sesuai standar operasional.
- Perlu untuk perekrutan dan pelatihan untuk personil Pemadam Kebakaran.
- Perlunya pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya bencana misalnya tidak mendirikan bangunan di tebing, tidak menebang pohon di lereng dan tidak mendirikan bangunan di tepi sungai.

- Mendorong program-program yang berkaitan tentang penanganan bencana baik ditingkat daerah maupun pusat.
- Penambahan anggaran dalam penanganan bencana baik sebelum, sesudah, setelah, dan sesudah bencana baik anggaran pusat maupun daerah.
- Perlunya meningkatkan pemantauan di daerah-daerah terjadinya bencana sehingga data penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana tersedia serta diperlukannya pelatihan / bimtek secara berkala.
- Perlunya penambahan dan pemeliharaan peralatan yang terkait dengan kebencanaan.
- Mengusulkan penetapan dokumen rencana penanggulangan bencana sebagai peraturan daerah.
- Mengalokasikan anggaran pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenis pelayanan dasar terkait pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana dalam Belanja Tidak Terduga sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun2018.
- Menyusun peraturan dan pedoman terkait pembentukan forum PRB (Pengurangan Risiko Bencana) yang meliputi unsir dari pemerintah, non pemerintah, masyarakat, lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai PP 21 Tahun 2008.
- Penambahan anggaran untuk membuat jalur dan rambu evakuasi, tempat kumpul (shelter) untuk evakuasi, sosialisasi (gladi) tentang Rencana Kontinjensi dan rencana evakuasi kepada masyarakat.
- Menetapkan SK tentang Pembentukan TRC yang melibatkan instansi terkait (Dinas Sosial, BPBD, Kodim, Polres, Satpol PP, Dinas PU, Dinas Kesehatan, PMI, dan Instansi terkait lainnya).
- Melakukan pemetaan dan pengkajian risiko bencana di Kabupaten Polewali Mandar untuk seluruh jenis bencana.
- Mengusulkan pembuatan peraturan tentang rencana kontinjensi dan rencana evaluasi.
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar untuk membuat perencanaan terkait dengan kegiatan penyelenggaraan sekolah aman bencana dan membentuk tim gabungan dengan OPD/Instansi terkait.
- Makin meningkatkan penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Bencana dan dan penyebaran informasi kebencanaan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
- Melakukan pembentukan/penyusunan personil Pusdalops (Manajer, Supervisor, Operator, Koordinator Administrasi dan Keuangan), serta mengusulkan anggaran dan menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung fungsi Pusdalops sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB No.15 Tahun 2012.
- Meningkatkan koordinasi antar OPD dan instansi terkait mengenai strategi dan operasi penyelamatan dan pertolongankorban bencana serta perbaikan darurat saat tanggap darurat bencana.

4.5.7. Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

Tabel 4.22.
Program dan Kegiatan SPM Urusan Trantibumlinmas (Satpol PP dan BPBD) Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		CAPAIAN (%)
			PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
SATPOL PP					
A.	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**122,095,412**	**122,080,140**	**99.99**
A.1.	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**115,457,012**	**115,446,740**	**99.99**
A.1.1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus			
A.1.2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	85,072,012	85,061,740	99.99
A.1.3	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	7,900,000	7,900,000	100.00
A.1.4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	5,715,000	5,715,000	100.00
A.1.5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	8,910,000	8,910,000	100.00
A.1.6	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	7,860,000	7,860,000	100.00
A.2.	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota**		**3,680,000**	**3,675,000**	**99.86**
A.2.1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	3,680,000	3,675,000	99.86
A.3.	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**		**2,958,400**	**2,958,400**	**100.00**
	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	2,958,400	2,958,400	100.00
B.	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**		**3,730,000,000**	**3,729,435,226**	**99.98**
B.4.	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**		**3,730,000,000**	**3,729,435,226**	**99.98**
B.4.1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	3,730,000,000	3,729,435,226	99.98
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)					
A	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**		**284,346,304**	**284,332,428**	**100.00**
A.1.	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**		**16,242,844**	**16,242,844**	**100.00**

A.1.1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen			
A.1.2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	16,242,844	16,242,844	100.00
A.2.	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**				
A.2.2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota				
A.3.	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		**230,274,305**	**230,274,305**	**100.00**
A.3.5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	230,274,305	230,274,305	100.00
A.4.	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		**37,829,155**	**37,815,279**	**99.96**
A.4.4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	10,250,610	10,250,610	100.00
A.4.6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	27,578,545	27564669	99.95
Total Anggaran SPM Trantibumlinmas			**4,136,441,716**	**4,135,847,794**	**99,99**

4.6. URUSAN SOSIAL

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota, adalah:

- ✓ Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- ✓ Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- ✓ Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- ✓ Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- ✓ Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota.

4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar dalam mencapai SPM Urusan Sosial Tahun Anggaran 2024 termasuk perhitungan pembiayaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.23.
Target Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET		PEMBIAYAAN / PAGU (Rp)
			KINERJA	%	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	183	100	471.299.454
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	136	100	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar	Jumlah Warga Negara lanjut usia	87	100	

	Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara / Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di Luar Panti	-	100	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saatdan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	79	100	2.362.362.277
Total Anggaran SPM Sosial					**2,833,661,731**

**Tidak ada Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial*

4.6.3. Realisasi

Target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar sebagai pelaksana SPM Urusan Sosial selama Tahun Anggaran 2024 dengan membandingkan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.24.
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2024

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Persentase capaian Penerima (Jiwa) Layanan Dasar				Persentase capaian mutu Barang/Jasa (%)	INDEKS PENCAPAIAN SPM
		Target	Realisasi	Belum terlayani	Capaian (%)		
1	Rehabilitasi Sosial DasarPenyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	183	183	0	**100**	**76,92**	**95,38**
2	Rehabilitasi Sosial DasarAnak Terlantar di Luar Panti Sosial	136	136	0	**100**	**75,00**	**95,00**
3	Rehabilitasi Sosial DasarLanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	87	87	0	**100**	**46,15**	**89,23**
4	Rehabilitasi Sosial DasarTuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-	-	**-**	**-**	**100**
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saatdan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	79	79	0	**100**	**60,00**	**92,00**
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM SOSIAL							**94,32**
							TUNTAS UTAMA

**Tidak ada Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial*

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber dana lain yang sah. Adapun besaran anggaran dalam rangka penerapan SPM Urusan Sosial Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 4.25.
Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	ALOKASI ANGGARAN & SUMBER DANA (Rp)			REALISASI (Rp)	%	KET
		DAK	DAU	JUMLAH			
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		471,299,454	**471,299,454**	**453,880,254**	**96.30**	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial						
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial						
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial						
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota		2,362,362,277	**2,362,362,277**	**472,429,127**	**20.00**	
TOTAL SPM SOSIAL				**2,833,661,731**	**926,309,381**	**32.69**	

4.6.5. Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Urusan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar dengan rincian sebagai berikut :

a. Personil ASN yang ada di Dinas Sosial : 21 orang
b. Pekerja Sosial (Peksos) : 30 orang
c. PKSAI : 4 orang
d. TKSK : 16 orang
e. TAGANA : 30 orang

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Lambatnya proses validasi verifikasi Data khususnya data yang berasal dari desa/kelurahan sebagai akibat lambatnya respon pemerintah setempat untuk segera melaksanakan proses Musyawarah desa/Kelurahan yang menjadi satu-satunya pintu untuk dilakukannya pemutakhiran/updating Data Masyarakat yang masuk kategory layak namun belum dilakukan tahap penginputan, begitupun sebaliknya data Masyarakat yg masuk DTKS dan menerima bantuan namun dinilai tidak layak.
- Dinas Sosial di setiap tahunnya sudah melaksanakan targeting Program khususnya program, kegiatan, Sub kegiatan prioritas khsususnya prioritas dalam hal capaian SPM, keterbatasan Pagu Anggaran dengan trend menurun pada setiap tahunnya adalah kendala pokok dalam pencapaian target disetiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Salah satu faktor yang ikut berpengaruh pada kualitas layanan bagi PPKS pasca penanganan adalah ketiadaan Pusat Rehabilitasi, dimana diharapkan layanan ini mampu menjadi bagian dari trauma healing(pemulihan) bagi PPKS Tuna Sosial agar

yang bersangkutan setelah ditangani tidak lagi kembali menjadi Tuna Sosial.
- Untuk Korban Bencana direncanakan dan dianggarkan pagu itu (sub kegiatan Penyediaan Makanan) sebesar Rp. 2.362.362.277 untuk 150 jiwa. Namun sepanjang tahun anggaran 2024 jumlah korban bencana hanya sebesar 79 jiwa.

b. Solusi

- Anggaran yg bersumber dari APBN, APBD Provinsi senantiasa diusulkan agar mampu menutupi kekurangan pagu pendukung penanganan layanan kesejahteraan sosial bagi PPKS.
- Proposal Pembangunan Pusat Layanan Rehabilitasi dibuat.

4.6.7. Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Urusan Urusan Sosial sebagai berikut :

Tabel 4.26.
Program dan Kegiatan SPM Urusan Sosial Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		CAPAIAN (%)
			PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	
A.	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**471,299,454**	**453,880,254**	**96.30**
A.1.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		**471,299,454**	**453,880,254**	**96.30**
A.1.6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	88,739,068	88,729,068	99.99
A.1.8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	382,560,386	365,151,186	95.45
B.	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		**2,362,362,277**	**472,429,127**	**20.00**
B.1.	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**2,362,362,277**	**472,429,127**	**20.00**
B.1.1	Penyediaan makanan	Orang	2,362,362,277	472,429,127	**20.00**
Total Anggaran SPM Sosal			**2,833,661,731**	**926,309,381**	**32.69**

BAB V
PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 telah diupayakan semaksimal mungkin untuk mampu mengakomodir seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar. LPPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah.

Uraian yang disampaikan secara sistematis mulai dari bab pendahuluan yang memuat penjelasan umum seperti dasar hukum pembentukan daerah, kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, jumlah kecamatan dan desa, jumlah pegawai pemerintah berdasarkan perangkat daerah dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu pada bab ini juga memuat mengenai perencanaan pembangunan daerah (permasalahan strategis pemerintah daerah, visi misi kepala daerah, program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah, dan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan) serta penerapan standar pelayanan minimal.

Selanjutnya pada bab capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah memuat informasi mengenai capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Pada bab capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan memberikan informasi mengenai capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar baik yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Kemudian pada bab penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal menjelaskan mengenai target, realisasi, alokasi anggaran, dukungan personil, permasalahan dan solusi serta program kegiatan yang berkaitan dengan urusan pelayanan dasar.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan antara lain hal-hal sebagai berikut :

1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 69 ayat (1) yang merupakan salah satu tugas konstitusional Kepala Daerah.
2) Berdasarkan substansi dan muatan materinya, LPPD Tahun 2024 yang dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah memuat :
   a. Capaian kinerja makro, yaitu capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Adapun capaian kinerja makro Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2024 yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69,88%, angka kemiskinan 15,66%, angka pengangguran 3,10%, pertumbuhan ekonomi 5,94%, pendapatan per kapita 35.450.000, dan ketimpangan pendapatan 0,303.
   b. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, capaian ini merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Terdapat 24 urusan wajib yang terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, 8 urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Dimana data indikator kinerja kunci yang disampaikan oleh OPD sesuai dengan urusan masing-masing telah menampilkan capaian kinerja yang cukup baik. Namun ada beberapa indikator urusan pemerintahan yang perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi bagi kami pemerintah daerah.
   c. Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, akuntabilitas kinerja dimaksudkan untuk menilai, menganalisa, dan menginformasikan mengenai hasil pencapaian tujuan serta

sasaran, juga untuk menjelaskan tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja yang dicapai instansi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Beberapa indikator kinerja sasaran telah mencapai target bahkan ada yang melebihi target atau cukup berhasil, berhasil, sangat berhasil dan ada indikator kinerja yang belum mencapai target atau tidak berhasil.

d. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan pusat yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berasal dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Keuangan. Pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah menunjukaan hasil yang optimal, dimana baik capaian fisik maupun capaian realisasi anggaran keseluruhannya mencapai 100%.
e. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, diperlukan pemetaan kondisi awal SPM di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada Perangkat Daerah terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Langkah-langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

Berbagai pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara keseluruhan berjalan sangat baik, atas sinergitas, komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur, masyarakat, dunia usaha dan civil society. Meskipun demikian, keberhasilan yang dicapai tersebut tidak terlepas dari hambatan dan kendala baik bersifat internal maupun eksternal yang memerlukan pembenahan, perhatian dan penanganan untuk diselesaikan. Permasalahan tersebut tidak lain disebabkan oleh berbagai keterbatasan, termasuk keterbatasan sumber daya dan dana. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terus melakukan langkah-langkah dalam penguatan kinerja diantaranya melakukan pembinaan kinerja pada semua entitas akuntabilitas dan mensinergikan dalam semua tahapan pembangunan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Akhirnya pemerintah dan segenap elemen masyarakat Kabupaten Polewali Mandar berharap semoga laporan ini dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengenai wujud penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar, untuk selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi demi pengembangan daerah khususnya Kabupaten Polewali Mandar ke depan. Sehingga LPPD diharapkan dapat menjadi instrumen peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dari tahun ke tahun.

Semoga ALLAH Subhanahuwata'ala senantiasa melimpahkan Rahmat dan Rahim-Nya serta menjaga agar kita senantiasa diberikan kekuatan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

Polewali, 25 Maret 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR,

H. SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN 1
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

LPPD POLEWALI MANDAR
TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

No	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		RUMUS	PEMBILANG / PENYEBUT	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	**PENDIDIKAN**	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	*Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD* ---------- *x 100%* *Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan*	16.117 ---------- x100% 17.760	**90,75 %**	- Dinas Pendidikan danKebudayaan - Kemenag - Disdukcapil	Data Terlampir
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	*Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disekolah dasar* ---------- *x 100%* *Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan*	49.726 ---------- x100% 54.128	**91,87 %**	- Dinas Pendidikan danKebudayaan - Kemenag - Disdukcapil	Data Terlampir
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	*Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama* ---------- *x 100%* *Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan*	23.211 ---------- x100% 28.142	**82,48 %**	- Dinas Pendidikan danKebudayaan - Kemenag - Disdukcapil	Data Terlampir
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasardan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	*Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan* ---------- *x 100%* *Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten yang bersangkutan*	1.729 ---------- x100% 5.392	**32,07 %**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir

2	**KESEHATAN**	1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	*Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan* ---------- *x 1.000* *Jumlah Penduduk di kabupaten/kota*	547 ---------- x1.000 492.339	**1,11 %**	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	*Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi* ---------- *x 100%* *Jumlah RS di kabupaten/kota*	4 ---------- x100% 4	**100 %**	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	*Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan* ---------- *x 100%* *Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota*	5.170 ---------- x100% 8.067	**64,09 %**	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	*Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan* ---------- *x 100%* *Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota*	6.710 ---------- x100% 8.067	**83,18 %**	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	*Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar* ---------- *x 100%* *Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota*	6.551 ---------- x100% 7.997	**81,92 %**	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	*Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar* ---------- *x 100%* *Jumlah balita di kabupaten/kota*	31.914 ---------- x100% 40.399	**79,00 %**	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar* ---------- *x 100%* *Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota*	40.096 ---------- x100% 78.318	**51,20 %**	Dinas Kesehatan	Data Terlampir

		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar* ---------- *x 100%* *Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota*	162.165 ---------- x100% 312.987	**51,81 %**	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	*Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar* ---------- x 100% *Jumlah warga negara usia 60 ke atas di kabupaten/kota*	33.080 ---------- x100% 47.458	**69,70 %**	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
		10	Persentase penderita hipertensiyang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* ---------- *x 100%* *Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota*	19.329 ---------- x100% 22.754	**84,95 %**	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* ---------- *x 100%* *Jumlah penderita DM di kabupaten/kota*	4.091 ---------- x100% 4.288	**95,41 %**	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	*Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* ---------- *x 100%* *Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota*	855 ---------- x100% 991	**86,28 %**	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	*Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* ---------- *x 100%* *Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota*	9.686 ---------- x100% 9.686	**100 %**	Dinas Kesehatan	Data Terlampir

		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	*Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar* ---------- *x 100%* *Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota*	6.772 ---------- x100% 11.312	**59,86 %**	Dinas Kesehatan	Data Terlampir
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	*Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)* ---------- *x 100%* *Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)*	0 ---------- x100% 1	**0 %**	Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR	Bukan kewenangan Kabupaten. Surat Keterangan Terlampir
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungioleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	*Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m)* ---------- *x 100%* *Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m)*	0 ---------- x100% 1	**0 %**	Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR	Bukan kewenangan Kabupaten. Surat Keterangan Terlampir
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	*Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha),ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting* ---------- *x 100%* *luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota*	44.635,25 ---------- x100% 63.865	**69,89 %**	Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR	Data Dukung Terlampir

		4	Persentase jumlah rumah tanggayang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAMjaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	*Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.* ---------- *x 100%* *Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota bersangkutan*	91.479 ---------- x100% 103.666	**88,24 %**	Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	Data Dukung Terlampir
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	*Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD* ---------- *x 100%* *Jumlah rumah di Kabupaten*	99.805 ---------- x100% 104.445	**95,56 %**	Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	Data Dukung Terlampir
		6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	*Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya* ---------- *x 100%* *Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku*	361 ---------- x100% 361	**100 %**	Bidang Penataan Ruang DinasPUPR	Data Dukung Terlampir
		7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	*Panjang jalan kewenangan Kabupaten / Kota yang mantap* ---------- *x 100%* *Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten / Kota*	483.498 ---------- x100% 922.260	**52,43 %**	Bidang Bina Marga Dinas PUPR	Kondisi Mantap = Baik + Sedang (359.857 + 123.641 = 483.498) Data Dukung Terlampir
		8	Rasio tenaga operator / teknisi / analisis yangmemiliki sertifikat kompetensi	*Jumlah tenaga kerja konstruksi yangterlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis* ---------- *x 100%* *Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten/Kota*	684 ---------- x100% 1.000	**68,4 %**	Bidang Bina Konstruksi dan Balai Bina Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar	Data terlampir

		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	*Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang tanpa terjadi kecelakaan konstruksi* ---------- *x 100%* *Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya*	164 ---------- x100% 164	**100 %**	Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR	Data terlampir
4	**PERUMAHAN RAKYAT**	1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	*Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n* ---------- *x 100%* *Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n*	0 ---------- x100% 1	**0 %**	Bidang Perumahan Disrumkimtan	Tidak ada rumah korban bencana yang termasuk kriteria fasilitasi pembangunan / rehab Kembali. **Surat Keterangan Terlampir**
		2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	*Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni* ---------- *x 100%* *Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan*	0 ---------- x100% 1	**0 %**	Bidang Perumahan Disrumkimtan	Tidak ada program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten terkait relokasi masyarakat. **Surat Keterangan Terlampir**
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	*Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)* ---------- *x 100%* *Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha*	35,5 ---------- x100% 57,6	**61,63 %**	Bidang Permukiman Disrumkimtan	2019 : 12,54 2020 : 2,19 2021 : 12,54 2022 : 7,73 2023 : 0,50 2024 : 0,00 Total yang tertangani : 35,5 Data Terlampir
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	*Jumlah unit rumah tidak layak huni* ---------- *x 100%* *Jumlah total unit rumah kabupaten/kota*	17.908 ---------- x100% 101.058	**17,72 %**	Bidang Perumahan Disrumkimtan	Data Terlampir

		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	*Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU* ---------- *x 100%* *Jumlah unit rumah kab/kota*	2.205 ---------- x100% 6.630	**33,26 %**	Bidang Perumahan Disrumkimtan	PSU berupa pembangunan jalan (pavin blok). Data Terlampir
5	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	*Jumlah pengaduan yang diselesaikan* ---------- *x 100%* *Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk*	6 ---------- x100% 6	**100 %**	Satpol PP	6 Pengaduan telah ditangani dan ditindaklanjuti. Data Terlampir
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	*Jumlah keseluruhan Perda atau Perkada yang memuat sanksi* ---------- *x 100%* *Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi*	6 ---------- x100% 6	**100 %**	Satpol PP	6 Perda/Perkada masih berlaku, Upaya penindakan berupa Sosialisasi, Pengawasan dan Penindakan berupa pemberian Peringatan Lisan Peringatan Tertulis. Data Terlampir.
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	*Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana* ---------- *x 100%* *Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana di daerah rawan bencana berdasarkan dokumen Kajian Rawan Bencana.*	421.427 ---------- x100% 421.427	**100 %**	BPBD	Layanan informasi berupa Papan Informasi Rawan Bencana yang ditempatkandi 18 Desa / Kelurahan, Sosialisasi serta Layanan Informasi juga disampaikan melalui Surat Himbauan oleh Bupati. Data Terlampir

		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	*Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahandan kesiapsiagaan terhadap bencana* ---------- *x 100%* *Jumlah warga negara yang berada di kawasan bencana*	30 ---------- x100% 4.913	**0,61 %**	BPBD	Berupa kegiatan Sosialisasi pencegahan dan mitigasi bencana alam tsunami di Kecamatan Tinambung. Data Terlampir
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	*Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana* ---------- *x 100%* *Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana*	86 ---------- x100% 86	**100 %**	Data verifikasi korban bencana alamBPBD	Data Terlampir
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasikorban kebakaran	*Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota* ***dalam tingkat waktu tanggap*** *oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah* ---------- *x 100%* *Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota*	47 ---------- x100% 55	**85,45 %**	UPTD Pemadam Kebakaran Satpol PP	Terdapat kejadian kebakaran yang tidak tertangani disebabkan informasi yang diterima terlambat dan lokasi kebakaran yang sulit dijangkau. Data Terlampir
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	*Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran*	Jumlah kejadian = 55 Total waktu tanggap = 620 Rata-rata waktu tanggap : 620 / 55 = 11,27 menit	**11,27**	UPTD Pemadam Kebakaran	Data Terlampir

6	**SOSIAL**	1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	*Jumlah korban penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti* ---------- *x 100%* *Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis*	368 ---------- x100% 953	**38,61 %**	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinsos	Jumlah jiwa yang terpenuhi kebutuhan dasarnya : - Anak Terlantar = 117 (388) - Lansia = 68 (291) - Disabilitas = 183 (274). **Total tertangani = 368** **Total Populasi = 953.** Data Terlampir.
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	*Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran* ---------- *x 100%* *Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota*	79 ---------- x100% 79	**100 %**	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos	Data Terlampir
7	**TENAGA KERJA**	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	*Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD* ---------- *x 100%* *Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota*	1 ---------- x100% 1	**100 %**	Bidang Tenaga Kerja Disnakertrans dan ESDM	Program Kegiatan yang mengacu RTKD dan dilaksanakandi tahun 2024 yaitu Program Pelatihan Kerjadan Produktivitas Tenaga Kerja Data Terlampir

		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	*Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi* ---------- *x 100%* *Jumlah tenaga kerja keseluruhan*	72 ---------- x100% 251.424	**0,03 %**	Bidang Tenaga Kerja Disnakertrans dan ESDM	Di tahun 2024 tidak ada kegiatan untuk melakukan pendataan langsung ke perusahaan sehingga data yang tersedia belum lengkap. Data Terlampir.
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	*PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan* ---------- *x 100%* *Jumlah tenaga kerja*	10.803.240. 000.000 ---------- x100% 251.424	**4.296.821. 305,84**	Kab. Polman Dalam Angka 2024 dan Bidang TenagaKerja	Data Terlampir
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit,Struktur Skala Upah, dan terdaftarpeserta BPJS Ketenagakerjaan)	*Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak* ---------- *x 100%* *Jumlah Perusahaan*	45 ---------- x100% 90	**50 %**	Bidang Tenaga Kerja Disnakertrans dan ESDM	Data Terlampir
		5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	*Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan* ---------- *x 100%* *Jumlah pencaker yang terdaftar*	225 ---------- x100% 1.177	**19,12 %**	Bidang Tenaga Kerja Disnakertrans dan ESDM	- Jumlah pencaker terdaftar laki-laki : 893 - Jumlah pencaker terdaftar perempuan : 284 **Total : 1.177** Data Terlampir
8	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	*Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD* ---------- *x 100%* *Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD*	349.803.000 ---------- x100% 3.693.752.749	**9,47 %**	Bidang PPPA Dinas P2KBP3A	Data Terlampir
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	*Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi* ---------- *x 100%* *Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)*	21 ---------- x100% 21	**100 %**	- Bidang PPPA Dinas P2KBP3A.	Data Terlampir

		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	*Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan* ----------*x100.000* *Jumlah penduduk perempuan*	7 ---------x100.000 245.739	**2,85**	- Bidang PPPA Dinas P2KBP3A.	Data Terlampir
9	**PANGAN**	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	*Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota* ---------- *x 100%* *Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan*	203,87 Ton ---------- x100% 7 Ton	**2.912,43 %**	- Bidang Ketahanan Pangan Distanpan - RKPD Polewali Mandar 2024	Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten = 203,87 Ton Sedangkan target cadangan pangan pada RKPD 2024 yaitu 7 Ton. Data terlampir.
10	**PERTANAHAN**	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	*Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)* ---------- *x 100%* *seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)*	3.656.316 m2 ---------- x100% 3.656.316 m2	**100 %**	Bidang Pertanahan Disrumkimtan dan DPMPTSP	Data Terlampir
		2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	*Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum* ---------- *x 100%* *Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum*	1 ---------- x100% 1	**100 %**	Bidang Pertanahan Disrumkimtan	Surat Keterangan Terlampir
		3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka Penanaman modal	*Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)* ---------- *x 100%* *Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan*	3.656.316 m2 ---------- x100% 3.656.316 m2	**100 %**	Bidang Pertanahan Disrumkimtan dan DPMPTSP	Data Terlampir

		4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	*Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 Ha* ---------- *x 100%* *Jumlah penerima tanah obyek landreform*	1 ---------- x100% 1	**100 %**	Bidang Pertanahan Disrumkimtan	Surat Keterangan Terlampir
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	*Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah* ---------- *x 100%* *Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan*	1 ---------- x100% 1	**100 %**	Bidang Pertanahan Disrumkimtan	Surat Keterangan Terlampir
		6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melaluimediasi	*Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani* ---------- *x 100%* *jumlah pengaduan sengketa tanah garapan*	3 ---------- x100% 3	**100 %**	Bidang Pertanahan Disrumkimtan	3 pengaduan sengketa tanah semuanya dilayani / ditangani. Data Terlampir
11	**LINGKUNGAN HIDUP**	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	*IKLH =* *(0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)* *a. Indeks kualitas air (IKA) = 55,91* *b. Indeks Kualitas Udara (IKU) = 89,96* *c. Indeks tutupan hutan (ITH) = 49,80*	(55,91 x 0,376) + (89,96 x 0,405) + (49,80 x 0,219) = **71,40.**	**68,36**	Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran	Data terlampir.
		2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	*Total volume sampah yang ditangani* ---------- *x 100%* *Total volume timbunan sampah kabupaten/kota*	9.915,77 ---------- x100% 72.324,17	**13,71 %**	Bidang Kebersihan dan Pertamanan DLHK	Data terlampir.

		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	*Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota* ---------- *x 100%* *usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan*	13 --------x100% 163	**7,98 %**	Bidang Penataan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup DLHK	Data terlampir.
12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL**	1	Perekaman KTP elektronik	*Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP* ---------- *x 100%* *Jumlah penduduk 17 tahun ke atas*	**323.891** ---------- x100% **344.643**	**93,98 %**	Agregat DKB (Data Konsolidasi Bersih) Semester 2 Tahun 2024	Data terlampir
		2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memilikiKIA	*Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA* ---------- *x 100%* *Jumlah anak usia 0-17 tahun*	31.162 ---------- x100% 147.689	**21,10 %**	Agregat DKB (Data Konsolidasi Bersih) Semester 2 Tahun 2024	Data terlampir
		3	Kepemilikan akta kelahiran	*Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir* ---------- *x 100%* *Jumlah anak usia 0-18 tahun*	152.844 ---------- x100% 157.667	**96,94 %**	Agregat DKB (Data Konsolidasi Bersih) Semester 2 Tahun 2024	Data terlampir
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	*Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang telah memanfaatkandata kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama* ---------- *x 100%* *Jumlah Perangkat Daerah*	16 ---------- x100% 38	**42,11 %**	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil	Data terlampir

13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	*Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun* ---------- *x 100%* *Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)*	2 ---------- x100% 8	**25,00 %**	Indeks Desa Membangun (IDM)	Data terlampir
		2	Persentase peningkatan status desa mandiri	*Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun* ---------- *x 100%* *Jumlah desa berkembang (per- awal tahun n)*	17 ---------- x100% 55	**30,91 %**	Indeks Desa Membangun (IDM)	Data terlampir
14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	*Jumlah anak yang dilahirkan oleh Perempuan usia subur (15-49 tahun)* ---------- *Jumlah Perempuan Usia Subur (15-49 tahun)*	7.997 ---------- 63.401	**0,13**	TFR adalah Data terlampir hasil perhitungan rata - rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa produksinya (15-49 tahun), Sehingga	Jumlah anak yang dilahirkan 7.997 jiwa dan PUS adalah 63.401. Sehingga 7.997 : 63.401 = 0,13. Data terlampir.
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	*Jumlah peserta KB Aktif Modern* ---------- *x 100%* *Jumlah Pasangan Usia Subur*	36.402 ---------- x100% 63.401	**57,42 %**	DP2KBP3A	Data terlampir
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	*Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani* ---------- *x 100%* *Jumlah Pasangan Usia Subur*	14.394 ---------- x100% 63.401	**22,70 %**	DP2KBP3A	Data terlampir

15	**PERHUBUNGAN**	1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio konektvitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobotangkutan sungai, danau dan penyeberangan) • IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut) **Keterangan:** **IK1 (Angkutan Jalan)** ▪ Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek Angkutan Perdesaan Perkotaan ▪ Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktutertentu dan kebutuhan trayek Angkutan Perdesaan Perkotaan dalam kurun waktu tertentu **IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)** • Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambahlintasan komersil • Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik	Rasio Konektivitas = (0,61 x 0,7) + (0,66 x 0,3) = 0,427 + 0,198 = **0,625** **IK1** = (8 x 1) / 13 = 0,61 **IK2** = (10 x 0,8) / 12 = 0,66	**0,625**	Data jumlah trayek dan data jumlah lintas penyeberangan Kabupaten tahun 2024. Dinas Perhubungan	Data terlampir

				lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu **Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:** 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobotangkutan jalan =30); 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30; 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan= 50); 4. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70); 5. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas: a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot =0.8 Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5				

		2	Kinerja lalu lintas Kabupaten	*V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota*	525 / 1.564	**0,34**	Dinas Perhubungan	Data Terlampir
16	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	*Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo* ---------- *x 100%* *Jumlah PD*	39 ---------- x100% 44	**88,64 %**	Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK Diskominfo-SP	Data Terlampir
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	*Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi* ---------- *x 100%* *Jumlah Layanan Publik*	6 ---------- x100% 18	**33,33 %**	Seksi e-Goverment dan Persandian Diskominfo-SP	Data Terlampir
		3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	*Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota* ---------- *x 100%* *Jumlah penduduk (15-64 tahun)*	410.783 ---------- x100% 490.029	**83,83 %**	Seksi Pelayanan Informasi Publik Diskominfo-SP dan Disdukcapil	Data Terlampir
17	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	*Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset* ---------- *x 100%* *Jumlah seluruh koperasi*	35 ---------- x100% 41	**85,37 %**	Bidang Koperasi dan UKM Disperindagkop dan UKM	Data Terlampir
		2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	*Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha* ---------- *x 100%* *Jumlah usaha mikro keseluruhan*	729 ---------- x100% 51.590	**1,41 %**	Bidang Koperasi dan UKM Disperindagkop dan UKM	Data Terlampir

18	**PENANAMAN MODAL**	1	Persentase peningkatan investasidi kabupaten/kota	*(Jumlah investasi tahun n – jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota* ---------- *x 100%* *Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota*	2024 - 2023 = (Rp. 656.632.116.292 – Rp. 651.234.944.128) = **5.397.172.164** ---------- x100% **651.234.944.128**		**0,83 %**	2023 : 651.234.944.128 2024 : 656.632.116.292 Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Data Terlampir
19	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	*Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten* ---------- *x 100%* *Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota*	790 ---------- x100% 134.070	**0,59 %**	Bidang Pemuda Dispop	Data dukung terlampir
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	*Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota* ---------- *x 100%* *jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota*	6.316 ---------- x100% 134.070	**4,71 %**	Bidang Pemuda Dispop	Data dukung terlampir
		3	Peningkatan prestasi olahraga	*Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional*	3	**3**	Bidang Olahraga Dispop	Data terlampir
20	**STATISTIK**	1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalammenyusun perencanaan pembangunan daerah	*Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah* ---------- *x 100%* *jumlah PD*	44 ---------- x100% 44	**100 %**	Seksi pengolahan data sektoral Diskominfo-SP	Data Terlampir
		2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	*Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah* ---------- *x 100%* *jumlah PD*	44 ---------- x100% 44	**100 %**	Seksi pengolahan data sektoral Diskominfo-SP	Data Terlampir

21	**PERSANDIAN**	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	*Jumlah nilai per area keamanan informasi* ---------- *x 100%* *Jumlah area penilaian*	645 ---------- x100% 645	**100 %**	Seksi e-government dan persandian Diskominfo-SP	Data Terlampir
22	**KEBUDAYAAN**	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	*Jumlah cagar budaya yang dilestarikan* ---------- *x 100%* *Jumlah cagar budaya yang ditetapkan*	17 ---------- x100% 69	**24,64 %**	Bidang Kebudayan	17 Situs dan Cagar Budaya yang telah diinvetarisasi. Data Terlampir
23	**PERPUSTAKAAN**	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	Indeks	**60,33**	Laporan Akhir Kajian Kegemaran Membaca Masyarakat Indonesia Tahun 2024	Data Terlampir
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 6 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat $\frac{\sum UPLM}{ALM}$ x 100	UPLM 1 = 0,1900 UPLM 2 = 0,0374 UPLM 3 = 0,1211 UPLM 4 = 0,0390 UPLM 5 = 1,0000 UPLM 6 = 0,0224 UPLM 7 = 0,3780 $\frac{\sum UPLM}{ALM}$ x 100 *= 25,54*	**25,54**	Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2024	Data Terlampir

24	**KEARSIPAN**	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	*T = (a + i + s + j) / 4* ***Keterangan :*** ***T** = tingkat ketersediaan arsip* ***a** = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip* ***i** = persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip* ***s** = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik* ***j** = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN*	a = 41 % i = 12 % s = 0 j = 0 T = (a+i+s+ j)/4 = (41+12+0+0)/4 = 53 / 4 = 13,25	**13,25**	Bidang Kearsipan	Data terlampir.
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	*T = (m + b + g + a + c + i) / 6* ***Keterangan :*** ***T** = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban* ***m** = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK* ***b** = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK* ***g** = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten dengan NSPK* ***a** = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasilalih media dengan NSPK* ***c** = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK* ***I** = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yangbersifat tertutup dengan NSPK*	m = 0 % b = 0 % g = 30 % a = 0 % c = 0 % i = 0 % T = (m + b + g + a + c + i) / 6 T = (0 + 0 + 30 + 0 + 0 + 0) / 6 = 30/6 = 5	**5**	Bidang Kearsipan	Ada Arsip pemekaran Daerah Kabupaten yaitu Naskah Sejarah Terbentuknya Polewali Mandar. Belum ada NSPK Pedoman layanan arsip statis karena kurangnya anggaran yang mendukung. Data dan Surat Keterangan terlampir

25	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	*Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten /Kota* ---------- *x 100%* *Target Produksi Perikanan (Tangkapdan Budidaya) yang ditetapkan* *(sumber data: one data KKP)*	77.874,23 ---------- x100% 64.436	**120,86 %**	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab, Polman	Produksi Tangkap = 30.048,29. Produksi Budidaya = 47.825,94 Sehingga Total = **77.874,23** Target Produksi Tangkap = 26.161 dan Budidaya = 38.275 sehingga total target produksi = **64.436** (Renstra DKP 2019-2024) Data Terlampir
26	**PARIWISATA**	1	Persentase pertumbuhan jumlah **wisatawan mancanegara** per kebangsaan	*(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)* ---------- *x 100%* *Jumlah wisatawan tahun n-1*	2024 - 2023 (1169 – 820) = 349 349 ---------- x100% 820	**42,56 %**	Bidang Promosi Wisata Dispop	**2023 = 820** **2024 = 1169** Data Terlampir.
		2	Persentase peningkatan perjalanan **wisatawan nusantara**yang datang ke kabupaten	*(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)* ---------- *x 100%* *Jumlah wisatawan tahun n-1*	2024 – 2023 (790.424 – 620.855) = 169.569 169.569 _____x100% 401.157	**27,31 %**	Bidang Promosi Wisata Dispop	**2023** = **620.855** **2024** = **790.424** Data Terlampir.
		3	Tingkat hunian akomodasi	*Jumlah kamar yang terjual* ---------- *x 100%* *Jumlah kamar yang tersedia*	29.048 ---------- x100% 171.185	**16,97 %**	Bidang Usaha Pariwisata Dispop	Data terlampir
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	*Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB* ---------- *x 100%* *Total PDRB Berlaku*	49,91 ----------x100% 17.770,78	**0,28 %**	Kab. Polman Dalam Angka 2025	Data Terlampir
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	*Total realisasi PAD dari sektor pariwisata* ---------- *x 100%* *Total realisasi PAD*	5.505.695.827,10 ----------x100% 228.329.475.747,03	**2,41 %**	Laporan Realisasi APBD TA. 2024, Bakeu Kab. Polman	Data Terlampir

27	**PERTANIAN**	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	*Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun* ---------- *x 100%* *luas panen*	266.148,01 ---------- x100% 38.433,33	**692,49 %**	Bidang Tanaman Pangan Distanpan	Data Terlampir
		2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	*Jumlah kejadian / kasus penyakit hewan menular tahun berjalan (t) – jumlah kejadian / kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)* ---------- *x 100%* *jumlah kejadian / kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)*	2024 – 2023 = 54 – 233 = **-179** ---------- x100% **233**	**-76,82 %**	Bidang Peternakan Distanpan	2023 = 233 2024 = 54 Data terlampir
28	**KEHUTANAN**		(1) Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura. (2) Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga (3) Pemulihan ekosistem pada Tahura (4) Menurunnya gangguan kawasan TAHURA		**100**	**100**	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bukan kewenangan Kabupaten. Surat Keterangan terlampir
29	**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten	*Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin* ---------- *x 100%* *Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi*	0 ---------- x100% 1	**0**	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM	Tidak ada program kegiatan ESDM terkait panas bumi. **Surat Keterangan Terlampir**
30	**PERDAGANGAN**	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	*Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan* ---------- *x 100%* *Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota*	47 ---------- x100% 48	**97,92 %**	Bidang Perdagangan Disperindagkop dan UKM	Data Terlampir
		2	Persentase kinerja realisasi pupuk	*Realisasi* ---------- *x 100%* *RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani)*	19.527,92 ---------- x100% 43.408,20	**44,99 %**	Bidang Perdagangan Disperindagkop dan UKM	Data Terlampir

		3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	*jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan* ---------- *x 100%* *jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota*	1.472 ---------- x100% 3.058	**48,14 %**	UPTD Meterologi Legal	Data Terlampir
31	**PERINDUSTRIAN**	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	*Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n – Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1* ---------- *x 100%* *Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1*	2024 – 2023 7.068 – 6.987 = 81 ---------- x100% 6.987	**1,16 %**	Bidang Perindustrian	IKM 2023 = 6.987 IKM 2024 = 7.068 Data Terlampir.
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut dan setiap sasaran memiliki bobot 20%. dokumen perencanaan pembangunan industri daerah yang terdiri dari: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota dengan bobot maksimal sebesar 20 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan: • Jika capaian 100% maka perhitungan (100% X 20%) = 20%; • Jika Capaian 90% maka perhitungan (90% x 20%) = 18% ; • jika Capaian 80% maka perhitungan (80% x 20%) = 16% ; • dst 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB		**0 %**	Bidang Perindustrian	Belum ada RPIK yang ditetapkan. Surat Keterangan terlampir

				Kabupaten/kota (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentasi capaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/kota dengan bobot maksimal 20 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan: • Jika capaian 100% maka perhitungan (100% X 20%) = 20%; • Jika Capaian 90% maka perhitungan (90% x 20%) = 18% ; • jika Capaian 80% maka perhitungan (80% x 20%) = 16% ; • dst 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota (satuan orang) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota dengan bobot maksimal sebesar 15 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan: • Jika capaian 100% maka perhitungan (100% X 20%) = 20%; • Jika Capaian 90% maka perhitungan (90% x 20%) = 18% ; • jika Capaian 80% maka perhitungan (80% x 20%) = 16% ; • dst 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota (satuan US$) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota dengan bobot maksimal sebesar 20%, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran. Contoh perhitungan:				

				• Jika capaian 100% maka perhitungan (100% X 20%) = 20%; • Jika Capaian 90% maka perhitungan (90% x 20%) = 18% ; • jika Capaian 80% maka perhitungan (80% x 20%) = 16% ; • dst 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terdiri dari Penanaman Modal Asing (satuan US$) dan Penanaman Modal Dana Negeri (satuan Rp.) Kabupaten/kota diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/kota dengan bobot maksimal sebesar 20 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan: • Jika capaian 100% maka perhitungan (100% X 20%) = 20%; • Jika Capaian 90% maka perhitungan (90% x 20%) = 18% ; • jika Capaian 80% maka perhitungan (80% x 20%) = 16% ; • dst				
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	*Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan* ---------- *x 100%* *Jumlah izin yang dikeluarkan*	5 ---------- x100% 5	**100 %**	Bidang Perindustrian dan Bidang Perizinan DPMPTSP	Data Terlampir
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan olehinstansi terkait	*Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan* ---------- *x 100%* *Jumlah izin yang dikeluarkan*	0 ---------- x100% 1	**0 %**	Bidang Perindustrian	Disperindagkop dan UKM tidak mengeluarkan IPUI karena belum ada kawasan industri. Surat Keterangan terlampir.

		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten	*Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan* ---------- *x 100%* *Jumlah izin yang dikeluarkan*	0 ---------- x100% 1	**0 %**	Bidang Perindustrian	Disperindagkop dan UKM tidak mengeluarkan IUKI dan IPKI karena belum ada kawasan industri. Surat Keterangan terlampir.
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Informasi Industri: - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%); - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%); - Tidak menyampaikan informasi industri (0%). 2) Kelengkapan informasi industri meliputi: - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%); - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%); - Informasi bahan bakar/ energy (10%); - Informasi tenaga kerja (10%); - Informasi investasi (10%). Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)		**65%**	Bidang Perindustrian Disperindagkop dan UKM	Belum Bisa ditargetkan Belum Bisa ditargetkan Data Base IKM Belum tersedia Belum tersedia Data Base IKM Data Base IKM
32	**TRANSMIGRASI**		1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya 2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya 3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina	*1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya* *2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya* *3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina*	1. 1 Kawasan (Kawasan Tubbi Taramanu). 2. 6 Satuan Permukiman 3. 1 Satuan Permukiman (SP Ratte)	**100**	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM	Data Terlampr.

LAMPIRAN 2

INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

LPPD POLEWALI MANDAR
TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

No	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI		RUMUS	PEMBILANG / PENYEBUT	CAPAIAN KINERJA (%)	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	**PERENCANAAN DAN KEUANGAN**	1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	*Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan* - ---------- *x 100%* *Jumlah APBD*	140.399.991.571 ---------- x100% 1.572.789.715.366,31	**8,93 %**	Badan Keuangan-Bid. Anggaran	*Data Unaudited* Data Terlampir
		2	Rasio PAD	*Jumlah PAD* - ---------- *x 100%* *Jumlah Pendapatan pada APBD*	230.174.576.115,26 ---------- x100% 1.567.871.754.243,96	**14,68 %**	Badan Keuangan-Bid. Anggaran	*Data Unaudited* Data Terlampir
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	*Tingkat Maturitas SPIP apabila tidak melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai 0, Tidak dievaluasi nilai 1, level 2 dan level 3. Berdasarkan Laporan Evaluasi Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh BPKP.*	Level 3	**Level 3**	Inspektorat	Data Terlampir
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	*Tingkat Kapabilitas APIP apabila tidak melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai 0, Tidak dievaluasi nilai 1, level 2 dan level 3. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Daerah yang dikeluarkan oleh BPKP*	Level 3	**Level 3**	Inspektorat	Data Terlampir
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	*Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures* - ---------- *x 100%* *Jumlah belanja APBD*	(1.431.126.108.218 – 325.520.465.368) = **1.105.605.642.850** ----------x100% **1.572.789.715.366,31**	**70,30 %**	Badan Keuangan-Bid. Akuntansi*)	*Data Unaudited* Data Terlampir

		6	Opini Laporan Keuangan	*Opini Laporan Keuangan*	WTP	**7**	Bidang Akuntansi BPKAD.	10 tahun terakhir : WTP : 7 kali WDP : 3 kali Data Terlampir
2	**PENGADAAN**	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	*jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n* *- ---------- x 100%* *jumlah kontrak keseluruhan tahun n*	0 - ----------x100% 1	**0 %**	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Belum pernah dilaksanakan. Surat Keterangan terlampir
		2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	*jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif* *- ---------- x 100%* *Jumlah seluruh pengadaan*	69 - ----------x100% 479	**14,41 %**	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Data Terlampir
		3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	*Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan* *- ---------- x 100%* *Total belanja operasi dan modal*	143.237.376.079 - ---------- x100% 353.612.442.430	**40,51 %**	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Data Terlampir
		4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Daerah	*Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)* *- ---------- x 100%* *Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)*	(2024 – 2023) 143.237.376.079 - 238.585.021.117 = -95.347.645.038 - ---------- x100% 238.585.021.117	**-39,96 %**	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	2023 = Rp. 238.585.021.117 2024 = Rp. 143.237.376.079 Data Terlampir

3	**KEPEGAWAIAN**	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah / Dasar (%) **(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**	*Jumlah pegawai menurut Pendidikan Perguruan Tinggi ke atas (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)* / *Seluruh jumlah pegawai (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)* *x 100%*	1.720 / 2.149 x100%	**80,03 %**	BKPP Polewali Mandar	D1 (2), D2 (28), D3 (123), D4 (18), S1 (1.131), S2 (415), S3 (3). **Total : 1.720** Struktural (561), Fungsional (319), Pelaksana (1.269). **Total : 2.149** Data Terlampir
		2	Rasio Pegawai Fungsional **(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**	*Jumlah Pegawai PNS Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)* / *Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)* *x 100%*	319 / 2.149 x100%	**14,84 %**	BKPP Polewali Mandar	JF Keahlian : 295 JF Terampil : 24 **Total : 319** Struktural (561), Fungsional (319), Pelaksana (1.269). **Total : 2.149** Data Terlampir
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) **(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)**	*Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (diluar guru dan tenaga kesehatan)* / *seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)* *x 100%*	45 / 319 x100%	**14,11 %**	BKPP Polewali Mandar	Data Terlampir
4	**MANAJEMEN KEUANGAN**	1	Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	*1 - (Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi / total belanja APBD) x 100%*	1 - (1.572.789.715.366,31 / 1.639.650.779.700,87) x100%	**4,08 %**	Badan Keuangan-Bid. Akuntansi*)	*Data Unaudited* Data Terlampir
		2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	*1 - (Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi / Total PAD belanja APBD) x 100%*	1 - (230.174.576.115,26 / 246.100.435.095,87) x100%	**6,47 %**	Badan Keuangan-Bid. Akuntansi*)	*Data Unaudited* Data Terlampir

		3	Manajemen Aset	*1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) = **YA***	1. Ada daftar asset tetap		**4**	Bidang Aset BPKAD. Data Terlampir
				*2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) = **YA***	2. Ada Kertas Kerja Rekonsiliasi			
				*3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) = **YA***	3. Ada SK Tim Inventarisasi			
				*4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak) = **YA***	4. Ada Rekapitulasi Barang ke Neraca			
		4	Rasio Anggaran Sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	*Nilai Realisasi SILPA* - ---------- *total belanja anggaran tahun sebelumnya*	5.977.330.675,27 ---------- 1.512.773.072.001,00	**0,40**	Badan Keuangan-Bid. Akuntansi*)	*Data Unaudited* Data Terlampir
5	**TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK**	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	*Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda* ---------- *x 100% Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda*	302.937.722 ---------- x100% 314.425.581	**96,35 %**	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian	Data Terlampir
		2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	*Jumlah dokumen yang dipublikasi di website Pemda* ----------*x 100% total jumlah dokumen yang telah dirinci*	11 ----------x100% 12	**91,67 %**	Seksi Pengelolaan Aspirasi Publik	Data Terlampir

LAMPIRAN 3
INDIKATOR KINERJA KOMPONEN OTONOMI DAERAH

LPPD POLEWALI MANDAR
TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA KOMPONEN OTONOMI DAERAH

No	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR / DEFENISI OPERASIONAL		RUMUS	PEMBILANG / PENYEBUT	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	**FASILITASI KEPALA DAERAH, DPRD DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA (FKDH)**	1	Ketepatan waktu penyampaian LKPJ kepada DPRD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	**Tepat Waktu** / Tidak Tepat Waktu	29 Maret 2024 Tepat Waktu	- Bagian Tapem Setda - Setwan DPRD	Berita Acara Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati
		2	Ketepatan waktu pelaksanaan pembahasan LKPJ oleh DPRD	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu 1. Undangan Pembahasan LKPJ : 2. Risalah Rapat : 3. Berita Acara : 4. Keputusan DPRD tentang Rekomendasi : 5. Dokumentasi:	**Ada**/Tidak Ada **Ada**/Tidak Ada Ada/Tidak Ada Ada/Tidak Ada Ada/Tidak Ada	**Ada**	- Bagian Tapem Setda - Setwan DPRD	Untuk Pembahasan LKPJ **melampirkan Undangan Pembahasan LKPJ,Risalah -Rapat, Berita Acara, Keputusan DPRD tentang Rekomendasi dan Dokumentasi**
		3	Penyampaian Rekomendasi LKPJ - Kab/Kota kepada Bupati Walikota dan Tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri	Ada/Tidak Ada	Ada/Tidak Ada	**Ada**	- Bagian Tapem Setda - Setwan DPRD	Untuk Penyampaian Rekomendasi LKPJ Kab/Kota kepada Bupati/Walikota dan Tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri **melampirkan Surat pengantar dan Tanda Terima**

No	INDIKATOR KINERJA		INDIKATOR / DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS	PEMBILANG / PENYEBUT	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
2	**PRODUK HUKUM DAERAH (PHD)**	1	Indeks Kepatuhan Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah **(indikator untuk Provinsi)**	Memastikkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah telah sesuai dengan mekanisme atau tahapan pembentukannya, kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3848 Tahun	Skala indeks kepatuhan daerah		Bagian Hukum Setda	Screenshot hasil penilaian Indeks kepatuhan daerah (E-Perda)
		2	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun 2024	Tepat atau Tidak Tepat	Tepat atau Tidak Tepat	**Tepat**	- Bagian Hukum Setda - Badan Keuangan	- Perda Nomor 6 Tahun 2023 Tentang APBD T.A. 2024. Ditetapkan tanggal **29 Desember 2023.**
		3	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	Jumlah Penetapan Ranperda Berdasarkan Prolegda Tahun N ---------- x 100% Jumlah Ranperda yang tertuang dalam Prolegda Tahun N	7 ---------- x100% 15	**46,66 %**	Sekretariat DPRD Polewali Mandar	

No	INDIKATOR KINERJA		INDIKATOR / DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS	PEMBILANG / PENYEBUT	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
3	KELEMBAGAAN KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH (KKPD)	1	Kepatuhan Pemda dalam melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (PTUN Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)	Pemerintah Daerah melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat, dan mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum	YA	YA	Bagian Hukum Setda	Pada Tahun 2024 terdapat 3 kasus yang ditangani oleh Bagian Hukum Setda Polman yaitu Perkara Nomor : - 3/G/2024/PT.TUN.MKS - 5/G/2024/PT.TUN.MKS - 8/G/2024/PT.TUN.MKS Masih dalam proses banding
		2	Kepatuhan Pemda dalam menindaklanjuti peraturan perundang-undangan dibidang kelembagaan perangkat daerah. (PP 18/2016; PP 72/2019; PP 106/2021; beserta peraturan dibawahnya)	Pemerintah Daerah telah menerbitkan: a. Perda (pembentukan dan susunan perangkat daerah) (pasal 3 ayat 1 PP 18/2016). b. Perkada (kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah) terkait kelembagaan perangkat daerah	YA / TIDAK	**Ya, Ada**	Bagian Organisasi Setda	- Perda No 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Polewali Mandar - Perbup 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tupoksi, serta Tata Kerja PD.
		3	Kepatuhan Pemda dalam melaksanakan rekomendasi Menteri Dalam Negeri terkait kebijakan penyederhanaan birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan) Pemerintah daerah telah melaksanakan rekomendasi menteri dalam negeri persetujuan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan.	Jumlah tindaklanjut kepatuhan pemda ---------- x 100% Jumlah rekomendasi Mendagri	256 --------- x100% 256	**100 %**	Bagian Organisasi Setda	Data dukung : a. Persetujuan Menteri Dalam Negeri terkait penyederhanaan struktur organisasi b. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 1092 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional
		4	Persentase Jabatan Struktural yang Terisi	Jabatan Struktural yang terisi (Definitif) ---------- x 100% Jabatan Struktural yang ada	569 --------- x100% 606	**93,89 %**	- BKPP Polewali Mandar - Bagian Organisasi Setda	Data / Daftar jabatan struktural

No	INDIKATOR KINERJA		INDIKATOR / DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS	PEMBILANG / PENYEBUT	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
		5	Jumlah Diklat Jabatan Fungsional Tahun N	Jumlah Kegiatan Diklat Jabatan Fungsional - ---------- x 100% Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional	166 - ----------x100% 569	**29,17 %**	BKPP Polewali Mandar	Data terlampir
4	**EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN KAPASITAS DAERAH (EKPKD)**	1	Monitoring Center for Prevention Tahun N	Nilai MCP Tahun 2024	Nilai MCP Tahun 2024	**51,37**	Inspektorat Kabupaten	Sumber Data : Aplikasi JAGA Monitoring Center for Prevention.
		2	Jumlah Program yang Mendukung 7 Prioritas Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Perpres No 134 Tahun 2022. Program-Program yang Mendukung 7 Program Prioritas Nasional	Jumlah Program Kabupaten yang Mendukung 7 Prioritas Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Perpres No 134 Tahun 2022 - ---------- x 100% Prioritas Nasional	5 - ---------- x100% 7	**71,43 %**	Balitbangren	RKPD Polewali Mandar Tahun 2024 Data terlampir
		3	Persentase Realisasi Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun N	Realisasi Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun N - ---------- x 100% Anggaran Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun N	115.958.311.995 - ---------- x 100% 183.845.247.305	**63,07 %**	Laporan SPM Tahun 2024	Laporan SPM Tahun 2024
		4	Persentase Penurunan SILPA	(Nilai SILPA Tahun N dikurangi Nilai SILPA Tahun N-1) - ---------- x 100% Nilai SILPA Tahun N-1	-6.750.674.037,35 - ---------- x100% 12.260.291.797,62	**-53,04 %**	Badan Keuangan	**2023 :** 12.728.004.712,62 **2024 :** 5.977.330.675,27 Data terlampir
		5	Pertambahan Nilai Aset Tetap	(Nilai Aset Tetap Tahun N dikurang Nilai Aset Tetap Tahun N-1) - ---------- x 100% Nilai Aset Tetap Tahun N-1	-189.024.313.580,32 - ---------- x100% 3.327.888.283.886,66	**-5,68 %**	Badan Keuangan	**2023 :** 3.327.888.283.886,66 **2024 :** 3.138.863.970.306,34 Data terlampir
		6	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun N - ---------- x 100% Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahu N	84 - ---------- x100% 108	**77,78 %**	Inspektorat Kabupaten	Data terlampir.

No	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR / DEFENISI OPERASIONAL		RUMUS	PEMBILANG / PENYEBUT	CAPAIAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
		7	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023	88 – 100 : A : Kualitas Tertinggi 78 – 87,99 : B : Kualitas Tinggi 54 – 77,99 : C : Kualitas Sedang 32 – 53,99 : D : Kualitas Rendah 0 – 31,99 : E : Kualitas Terendah	**87,67** (B) Kualitas Tinggi	Bagian Organisasi Setda	Rekapitulasi Hasil Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh OMBUDSMAN
		8	Keberadaan Mall Pelayanan Publik	Ada atau Tidak	Ada atau Tidak	**Ada**	DPMPTSP	Perbup Polewali Mandar Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik
		9	Inovasi Daerah (sesuai dengan PP 38/2017)	Jumlah Inovasi Daerah (Jenis dan Manfaat)	Jumlah Inovasi Tahun 2021 - 2024 adalah 157 inovasi	**157**	SK Bupati No. 2121 Tahun 2024	Daftar Inovasi Terlampir
		10	Jumlah Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama yang masih berlaku dan Manfaatnya	30	**30**	Bagian Tata Pemerintahan Setda	Daftar Kerjasama yang masih berlaku dan Manfaatnya
		11	Jumlah Penanganan Konflik Tahun N	Jumlah Penanganan Konflik Tahun N	14	**14**	Badan Kesabangpol	Data Konflik
		12	Produk Unggulan	Jumlah Produk Unggulan	55	**55**	Balitbangren	Data Produk Unggulan
		13	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	*Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar Deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu* ---------- x 100% *Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama*	6.988 ---------- x100% 32.646	**21,41%**	Dinas Kesehatan	Data terlampir

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
Provinsi Sulawesi Barat